40653.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI, KABUPATEN TEGAL

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:
Drs. Moh.Taufik
NIM. 015635686

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40653.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Jakarta, 15 September 2011
Yang menyatakan

(Moh.Taufik)
NIM 015635686

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRACT

Implementation of Compulsory Primary Education Policy 9 Years in Municipal Margasari Tegal Regency

Moh. Taufik
Open University
drsmohtaufik@yahoo.com

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, APK,APS

This research was conducted to determine the implementation of the Compulsory Education Policy 9 Year Primary Education in Municipal Margasari, Tegal Regency, to identify the factors that the constraints are still many children aged 13-15 years of elementary school graduates have not followed the Compulsory Primary Education program 9 years and seek solutions, to know the efforts made by local governments, schools and communities in policy implementation Compulsory Primary Education 9 years.

The study was a descriptive study that aims to describe the problems under study based on data obtained. The Data were collected by using interviews, observation and documentation study.

The results at the study showed that the implementation of Compulsory Primary Education policy of 9 years begin with the socialization and communication hierarchy in accordance with the existing bureaucracy. Further data collection and mapping held mainly of primary school graduates and junior and who do not continue. Results of data collection and mapping used as input determination of policy. In the data collection and mapping are the implementation of 10 (ten) junior high schools both public and private Regular, 1 (one) Junior Open, and 1 (one) package Pursue Program B. APK Junior High School Municipal in 2009 Margasari is 55.87% (Under Pratt: <80%). APS Margasari Municipal Junior High School in 2009/2010 reached 109 or 2:01%. This means that government programs to reduce APS 1% is not reached.

The Factors that are influencing the implementation of Compulsory Primary Education policy of 9 years are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. While the factors that become barriers are social and economic conditions, lack of parental awareness of the importance of education, lack of transport facilities, geographical conditions, facing time constraints to make a living themselves or help their parents work. Efforts made by local governments, namely by continuing to communication, socialization, enlightenment to the target groups and set up package Unit New School District Junior High School . The School Efforts, in order to make the under graduate schoolchildren or drop out school children is that these children here to go to school. Community effort that involving children aged 13-15 years to follow the policy of Compulsory Primary Education policy of 9 years and come to monitor, oversee the implementation of compulsory schooling, to monitor child of compulsory school age who do not follow the compulsory education, compulsory education program organized around their homes .

In conclusion, this study proves that the implementation of Compulsory Primary Education policy until the year 2010 has not reached the target.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp.021.7415050, Fax.021.7415588

Kepada
Yth. Direktur PPs-UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa

Nama	:	Drs. Moh.Taufik
N I M	:	0I5635686
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar 100% sehingga dinyatakan **sudah layak uji** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).
Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Jakarta, Mei 2011

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hanif Nurcholis, M.Si	Dr. P. Eko Prasetyo, M.Si
NIP.195902021992031002	NIP.196801022002121003

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
Penyusun TAPM	: Drs. Moh.Taufik
NIM	: 015635686
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	: 15 September 2011

Menyetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hanif Nurcholis, M. Si.	Dr. P. Eko Prasetyo, M. Si.
NIP. 195902021992031002	NIP.196801022002121003

Mengetahui :

Kepala Bidang ISIP UT	Direktur Program Pascasarjana UT
Dra. Susanti, M.Si	Suciati, M.Sc. Ph. D.
NIP. 196712141993032002	NIP.195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40653.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	: Drs. Moh. Taufik
NIM	: 015635686
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul Tesis	: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 15 September 2011
Waktu	: 08.15 – 10.15

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji	: Dr. Sri Harijati, MA
Penguji Ahli	: Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si
Pembimbing I	: Dr. Hanif Nurcholis, M.Si
Pembimbing II	: Dr. P. Eko Prasetyo, M.Si

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyusun TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Suciati, Ph.D. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Drs. Gunoro Nupikso, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Semarang, selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Dr. Sri Harijati, MA selaku Ketua Komisi Penguji;
4. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si selaku Penguji Ahli;
5. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si dan Dr. P. Eko Prasetyo, M.Si, sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
6. Dra. Susanti, M.Si. Kepala Bidang ISIP UT selaku penanggung jawab Program Studi Administrasi Publik;
7. Abuseri, S. IP selaku Camat Margasari;
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materi dan moral.

Penulis menyadari dalam penulisan TAPM ini terdapat banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran konstruktif yang disampaikan akan penulis terima. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Semarang, September 2011

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kerangka Berfikir	35
C. Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian	41
B. Nara Sumber	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Prosedur Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHAHASAN	48
A. Wilayah Penelitian	48
B. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan Margasari	53
C. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar	86
D. Upaya Pemerintah Daerah, Sekolah dan Masyarakat	98
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	129
A. Simpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	134

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40653.pdf

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 4.1 Struktur Organisasi GNP-PWB/PBA 79

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40653.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Faktor Penentu Implementasi Menurut George C.Edward III ……..25

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Definisi Operasioanl 40
Tabel 4.1 Luas Lahan Berdasarkan Pemanfaatan 49
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Tahun 2010 50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 51
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pemcaharian 52
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Lulusan 53
Tabel 4.6 Data SMP/MTs Kecamatan Margasari Tahun 2010 60
Tabel 4.7 Banyak Sekolah, Guru, dan Siswa SMP/MTs 71
Tabel 4.8 Karakteristik Lokasi KKN Wajib Belajar Tahun 2010 87

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40653.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara..... 140

Lampiran 2 : UPTD Dikpora Kecamatan Margasari Tahun Pelajaran 2008/2009 Tentang Jumlah Lulusan SD/MI Yang Melanjutkan Ke SMP/MTs/ PONPES..... 143

Lampiran 3 : Rekap Jumlah Lulus SD/MI Yang Melanjutkan Ke SMP/MTs/PONPES Tahun Pelajaran 2010/2011 UPTD Dikpora Kecamatan Margasari 145

Lampiran 4 : Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kab.Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008/2009..... 147

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Kepada Wartono, S.Pd, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari..... 148

Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Kepada Marnadi, S.Pd, Kepala Seksi Dikdas Dikpora Kabupaten Tegal 157

Lampiran 7 : Transkrip Wawancara Kepada Sudarto, S.Pd, Kepala SMP Negeri 2 Margasari Kabupaten Tegal 161

Lampiran 8 : Transkrip Wawancara Kepada Juwahir Dirgahayu, S.Pd, Kepala SMP Negeri 3 Margasari Kabupaten Tegal 165

Lampiran 9 : Daftar Pertanyaan Wawancara..... 167

Lampiran 10 : Transkrip Wawancara Dengan Wartono, S.Pd, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Maargasari..... 168

Lampiran 11 : Transkrip Wawancara Kepada Abuseri, S.IP, Camat Margasari 171

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 12 : Transkrip Hasil Wawancara Kepada Guru SD Kelas 6, Kepala SD, Guru BP/BK SMP, Tokoh Masyarakat Dan Kasi Dikdas Dinas Dikpora Kab.Tegal 175

Lampiran 13 : Daftar Pertanyaan Wawancara tentang Implementasi Kebikajan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 179

Lampiran 14 : Transkrip Hasil Wawancara Kepada Drs. Hadiyanto, M.Ed 182

Lampiran 15 : Jumlah Siswa, Tenaga Pendidik, Guru Pamong Dan Tenaga Kependidikan SMP Terbuka Margasari Tahun 2010-2011 186

Lampiran 16 : Daftar Peserta Didik , Tutor/Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Paket B Baru "Tunas Bhakti" Kelas VII PKBM Setia Bhakti Margasari Tahun 2010 188

Lampiran 17 : Gambar Peta Administrasi Kecamatan Margasari 189

Lampiran18 : Gambar Foto Ujian Sekolah SMP Terbuka Margasari Tahun 2010/2011 190

Lampiran 19 : Surat Rekomendasi Riset/Kerja 191

Lampiran 20 : Surat Keterangan 192

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan nasional. Sidi (2001:87) menyatakan: "Belajar dari berbagai Negara baru di bidang industri (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur untuk meningkatkan pembangunan bangsa, diperlukan apa yang disebut *critical mass* di bidang pendidikan." Konsep ini mengusahakan adanya sustu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan oleh suatu bangsa agar pembangunan dapat meningkat dengan cepat, karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 berbunyi bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan itu menyiratkan adanya kesadaran yang tinggi dari para *founding fathers* kita bahwa pendidikan adalah elemen terpenting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pernyataan itu kemudian diperkuat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (4) Negara memprioritraskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Jika mengacu pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk setiap warga negara. Pihak manapun tidak berhak untuk mengecualikan orang lain untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan ada kewajiban bagi pemerintah untuk membiayainya. Dengan demikian, pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten dan kota, harus menjamin penyelenggaraan pendidikan tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ini bisa berarti, biaya-biaya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ditanggung negara, yaitu Biaya Satuan Pendidikan (BSP).

Biaya Satuan Pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standard pelayanan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang sederajat). Untuk itu perlu upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Sidi (2001) menyatakan bahwa:

> Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan *critical mass* tersebut. Wajib belajar dilaksanakan untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar yang esensial. Dengan kemampuan dasar diharapkan para lulusan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Karena itu penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan saja semata-mata sekedar untuk mencapai target angka partisipasi secara maksimal, tapi perhatian yang sama ditujukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih jauh dari standard nasional (hal.87).

Ada sejumlah alasan yang mendasari pentingnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007 (2007:58-67).

> *Pertama*, memperbaiki peringkat *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia. *Kedua*, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bernilai sangat strategis karena memungkinkan tersedianya manusia berkualitas dalam jumlah yang memadai, yang dikenal dengan *critical mass*. *Ketiga*, masyarakat yang berpendidikan tinggi relatif lebih mudah diajak maju. *Keempat*, pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menuntut masyarakat lebih berpendidikan. *Kelima*, tingginya tingkat pendidikan suatu bangsa meningkatkan daya saing. *Keenam*, ketuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan bagian komitmen bangsa Indonesia terhadap gerakan *Education for All* (EFA) yang diprakarsai UNESCO. *Ketujuh*, melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun kita sekaligus berusaha mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. *Kedelapan*, dilihat dari peserta didik, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa memungkinkan mereka untuk mengarungi hidup yang lebih baik. *Kesembilan*, dalam kontek sosial politik program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa berfungsi untuk merekatkan NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia).

Selanjutnya Tilaar (2004:65) menyatakan bahwa: "Indonesia melaksanakan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun yang telah dicapai tahun 1984 dengan penghargaan *Aviciena* dari *UNESCO* kepada Presiden Republik Indonesia. Kesuksesan wajib belajar 6 tahun dilanjutkan dengan pelaksanaan wajib belajar 9

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tahun atau wajib belajar sekolah lanjutan tingkat pertama." Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menunjukan bahwa peserta didik dalam usia pendidikan dasar harus dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya tanpa terputus selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, semua lulusan SD enam tahun secara otomatis harus bisa ditampung di jenjang SMP sebagai bagian dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994, direncanakan tuntas pada akhir tahun 2003/2004 yaitu tepat akan mulai berlakunya perdagangan bebas tingkat Asia Tenggara. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia lebih siap menghadapi dan memasuki pasar global. Rencana penuntasan wajib belajar ini nampaknya tidak akan tercapai sesuai target waktu sebagai akibat multi krisis yang melanda Tanah Air. Akibat krisis ekonomi itu jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Menurut Hasanuddin dalam Bentri (2008:1) menyatakan bahwa: "Dampak krisis ekonomi tersebut para orang tua murid banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar dan atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama."

Target waktu penuntasan setidaknya diperpanjang minimal tiga tahun, sehingga Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun seharusnya dapat dituntaskan paling lambat akhir tahun 2008 dengan melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-20014 menyebutkan: Salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, program penuntasan pendidikan dasar perlu dilakukan, karena sebagian tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Tegal di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Salah satu indikator ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Di Kabupaten Tegal pada tahun 2008/2009 APK Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 91.94% (Tuntas Utama) target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus dicapai pada tahun 2009/2010 dengan APK minimum 95% (Tuntas Paripurna). Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 3.06% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Hal itu tersebar di 18 kecamatan,diantaranya: Kecamatan Lebaksiu APK tingkat SMP sebesar 109.07%, Kecamatan Kedungbanteng APK tingkat SMP sebesar 86.29%, Kecamatan Pangkah APK tingkat SMP sebesar 93.11%, Kecamatan Slawi APK tingkat SMP sebesar 122.36%, Kecamatan Adiwerna APK tingkat SMP sebesar 191.07%, Kecamatan Dukuhturi APK tingkat SMP sebesar 119.63%, Kecamatan Talang APK tingkat SMP sebesar 262.00%, Kecamatan Warureja APK tingkat SMP sebesar 149.38%, sedang Kecamatan Margasari APK Tingkat SMP sebesar 85.25% (Tuntas Madya), dengan demikian pada saat ini di Kecamatan Margasari masih ada sekitar 9.75% anak usia 13-15 tahun tamatan SD/MI yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari menyatakan dari siswa lulusan SD tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 1625 yang melanjutkan 1462 dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang tidak melanjutkan 165. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Tegal Waudin (2011, 19 Maret) dalam *Suara Merdeka* mengatakan bahwa: "Siswa lulusan SD tahun ajaran 2009/2010 di Kabupaten Tegal yang tidak melanjutkan paling banyak di Kecamatan Margasari sebanyak 151 anak." (hlm.A). Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi masih cukup banyak tamatan SD/MI tidak mengenyam pendidikan dasar di tingkat SMP/MTs., termasuk di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

Kecamatan Margasari merupakan salah satu kecamatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal yang berjumlah 18 kecamatan. Tingkat ketuntasan yang belum tercapai di Kecamatan Margasari ini mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI yang saat ini tidak sekolah dengan berbagai kendala. Menurut Paparan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tegal yang menjadi kendala wajib belajar adalah "Ekonomi, Daya tampung, Geografis, Budaya, dan Alasan khusus."

Bertitik tolak dari kondisi Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal tersebut, upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun memerlukan penanganan yang menyeluruh dan didukung oleh penerapan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang ada, serta diarahkan supaya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan penuh tanggung jawab serta mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun membutuhkan peran serta masyarakat dan melibatkan berbagai komponen anak bangsa dalam arti luas, baik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam wadah organisasi maupun perorangan terutama untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar bersedia mengikuti program wajib belajar. Dalam rangka inilah penulis tertarik melalukan analisa kebijakan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Magersari, Kabupaten Tegal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan penelitian yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik/akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk mengembangkan teori kebijakan khususnya analisis kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2. Manfaat praktis/ guna tata laksana

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal pada umumnya, dan kepada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tegal pada khusunya tentang:

a. Keterlaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI yang belum mengikuti kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan mencari solusinya di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakekat program wajib belajar 9 tahun

Secara nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Pembinaan. Paparan Kebijakan Pembinaan SMP dan Wajar Dikdas Kemendiknas, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kemendiknas 2011 menyatakan kondisi ketercapaian Wajar Dikdas 9 Tahun: Dengan APK tahun 2010/2011 = 98.20% dan APM 75.64%, maka masih sekitar 235.451 anak usia 13-15 tahun belum mendapat layanan pendidikan SMP/MTs/sederajat karena faktor: kemiskinan; geografi (terpencil, terpencar, terisolir, perbatasan dengan negara tetangga), budaya (kawin muda, kebiasaan tidak sekolah). Masih ada disparitas antara kota dengan kabupaten.masih terdapat 1 propinsi (Papua Barat), dan 57 kabupaten yang APK SMP/MTs belum tuntas (<80%). Total yang belum tuntas paripurna (<95%0 = 201 dari 497 kabupaten /kota (40.44%).

Paparan tentang Wajib Belajar Dikdas Kabupaten Tegal vs Program Pokok Pendidikan menyebutkan ketercapaian WAJAR DIKDAS KAB.TEGAL: Tahun 2001 = 82,06 -> Pratama; Tahun 2002 = 83,12 -> Pratama; Tahun 2003 = 84,39 -> Pratama; Tahun 2004 = 84,91 -> Pratama; Tahun 2005 = 85,11 -> Madya; Tahun 2006 = 86,26 -> Madya; Tahun 2007 = 86,95 -> Madya; Tahun 2008 = 87,31 -> Madya; Tahun 2009 = 93.67 -> Utama. Adapun . kendala program

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wajib Belajar Pendidikan dasar meliputi: Ekonomi; Daya Tampung; Geografis; Budaya; Alasan Khusus.

Sa'ud (2008) menyatakan:

> Implementasi Penuntasan Wajar Dikdas di Jawa Barat belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kendala manajemen yang menjadi penyebab dari masalah tersebut terutama belum optimalnya sinergitas dan koordinasi yang terjadi antara propinsi, kabupaten/kota bahkan menyentuh wilayah kecamatan dengan desa/kelurahan. Selain itu, ditemukan juga adanya kendala teknis yang berpengaruh secara langsung terhadap lambatnya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, antara lain:
> a) Keterbatasan daya tampung pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat.
> b) Animo masyarakat yang masih relatif tinggi terhadap sekolah negeri.
> c) Kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas untuk pembiayaan pendidikan.
> d) Lokasi sekolah yang tidak dapat dijangkau oleh penduduk.
> e) Penghargaan dunia usaha dan dunia industri yang relatif masih rendah terhadap kualifikasi lulusan sekolah.
> f) Budaya sebagian masyarakat yang belum menempatkan pendidikan sebagai hal yang penting merupakan prioritas.

Pendidikan merupakan wahana ke arah pembentukan pribadi mandiri untuk meniti kehidupan idealnya, sehingga sekolah pada tingkat dasar dan menengah bertugas mempersiapkan setiap warga negara untuk menguasai iptek. Sekolah pada tingkat perguruan tinggi bertugas membentuk warga negara yang mampu menguasai kemahiran/ketrampilan yang pada gilirannya memberikan kewenangan dalam melakukan suatu keahlian tertentu. Dengan demikian bagi sekolah lebih penting memikirkan persiapan untuk membentuk watak pribadi siswa dari pada memikirkan teknik-teknik pengalihan iptek. Betapa pentingnya peranan pendidikan dalam kehidupan, karena kehidupan bersifat probabilitas (belum pasti menjadi kenyataan) dan tidak *ready made*.

Dalam kehidupan ini, kita menghadapi iptek yang semakin kompleks dan jenis pekerjaan/ketrampilan semakin banyak. Walaupun yang harus kita kuasai semakin

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

banyak, tapi usia kita ada batasnya. Keterbatsan waktu tersebut memicu kita untuk meningkatkan aktivitas pendidikan agar melahirkan sifat cerdas, terampil, kerja keras, teliti, tekun, dan disiplin. Dalam kehidupan modern timbunan iptek bertumpuk dan jenis pekerjaan terus bertambah serta upaya mempelajarinyapun tidak sederhana, terutama dalam menggunakan metodenya. Kenyataan tersebut seolah memaksa setiap orang untuk belajar, sehingga kesempatan belajar seharusnya dapat diikuti oleh siapa saja. Dalam hubungan ini, Sa'ud,2008, mengemukakan pernyataan Komisi Pendidikan untuk Abad 21 yang mengutip Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*, Pasal 1 Ayat 1), sebagai berikut:

> Setiap orang anak, remaja, orang dewasa akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok. Keuntungan ini terdiri atas alat belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan isi belajar yang pokok (seperti pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpatisipasi secara penuh dalam pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus menerus belajar.

Pada salah satu tujuan nasional/negara kita yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan "mencerdaskan kehidupan bangsa." Mengapa mencerdaskan? Begitu pentingkah mencerdaskan?

Komar (2006:97) menyatakan bahwa:

> Logis bila mencerdaskan begitu penting, karena: a) hidup seseorang mengemban masa depan, maka ia harus menguasai faktor yang membuat masa depan yang akan diwujudkan, b) bahan-bahan alami perlu dibuat menjadi benda-benda baru yang diperlukan dalam kehidupan,c) perlu nilai tambah pada barang-barang yang telah ada supaya lebih baik, d) menciptakan regenerasi yang lebih baik, dan e) menghayati akal karunia Allah SWT.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Makna pendidikan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Komar (2006:153) menyatakan bahwa: "Pendidikan mempunyai tujuan akhirnya yaitu tercapainya kedewasaan secara universal."

Aliran filsafat Fenomenologi yang meyakini adanya tujuan pendidikan, membagi fase tujuan pendidikan ke dalam enam tingkat, yaitu tujuan yang bersifat universal/umum. Tujuan khusus bersifat khas berhubungan dengan suatu keyakinan aliran atau suatu bangsa tertentu. Tujuan sementara yang bersifat dimensioanl dari salah satu kehidupan sosial. Tujuan intermidier yang sifatnya berhubungan dengan salah satu perbuatan perantara untuk mencapai perbuatan berikutnya. Tujuan tentatif yang sifatnya berhubungan dengan salah satu perbuatan yang terus menerus perlu pengulangan. Tujuan insidental adalah tujuan untuk satu perbuatan.

Berdasarkan pandangan mengenai hakekat manusia yang berbeda lahirlah rumusan tentang tujuan proses pendidikan itu. Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan itu adalah kebijakan pendidikan. Tilaar & Riant Nugroho, (2009:27-38) berpendapat tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pendidikan adalah: Pendidikan sebagai transmisi kebudayaan; Pendidikan sebagai pengembangan kepribadian; Pendidikan sebagai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengembangan akhlak mulia serta religius; Pendidikan sebagai pengembangan warga negara yang bertanggungjawab; Pendidikan sebagai memepersiapkan pekerja-pekerja yang terampil dan produktif; Pendidikan adalah pengembangan pribadi paripurna atau seutuhnya; Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia baru.

Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dasar sangat erat dengan hak azasi manusia. Sa'ud (2008) menyatakan bahwa:

> Hal ini sejalan dengan Deklarasi Beijing tentang Perempuan yang antara lain menyatakan sebagai berikut: Pendidikan adalah hak azasi manusia dan sebuah alat yang pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif memberikan keuntungan baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, dan dengan demikian pada akhirnya membantu untuk mencapai hubungan yang mempunyai kesamaan yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Kesamaan dalam kemudahan mendapatkan dan mencapai mutu pendidikan adalah perlu apabila lebih banyak perempuan harus menjadi agen perubahan. Perempuan yang melek huruf merupakan sebuah kunci penting untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan dalam keluarga dan untuk memberdayakan perempuan untuk berpatisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan formal dan noformal serta latihan bagi para gadis dan perempuan, dengan hasil sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, telah terbukti menjadi salah satu cara pencapaian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan (tanpa nomor halaman).

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu muncul pertanyaan apakah yang seharusnya kita dan pendidik lakukan untuk memimpin anak didik itu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hal itu diperlukan jawaban yang berupa konsep-konsep tentang isi dan proses

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan yang mempertemukan potensi anak didik dan gambaran manusia yang ideal sesuai dengan tujuan tersebut diatas.

Kedudukan Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai alat dan tujuan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sifat sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Adapun target yang ingin dicapai meliputi:

- Pemberian pendidikan dasar;
- Pemberian hak memperoleh pendidikan;
- Pemberian hak memperoleh pendidikan;
- Pemeberian kesempatan memperoleh pendidikan dasar;
- Pengakuan pengalaman seumur hidup merupakan pendidikan seumur hidup;
- Pendayagunaan sumber daya pendidikan disediakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam kamus pendidikan di dunia dikenal istilah pendidikan semesta (*universal education*) dan wajib belajar (*compulsory education*).

Soedijarto (2008:294-295) mengatakan bahwa:

> Istilah *universal education* atau pendidikan semesta, yaitu kebijakan yang memberikan kesempatan kepada semua warga negara mengikuti pendidikan sesuai dengan kemampuan. Disamping itu dikenal istilah *Compulsory education* (wajib belajar). *Compulsory education* merujuk pada suatu kebijakan yang mengahruskan pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu, dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Wajib belajar yang sesungguhnya, seperti yang dilaksanakan di negara-negara seperti Jerman, Skandinavia, AS atau Jepang, peserta wajib belajar bukan hanya tidak membayar sekolah tetapi juga tidak membayar biaya transport dan diberi buku serta keperluan yang memungkinkan mereka dapat sekolah. Negara yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melaksanakan kebijakan wajib belajar akan mengenakan sangsi kepada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya yang usia wajib belajar.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar). Jika dilihat dilihat dari pengetian wajib belajar sebagai terjemahan *compulsory education*, sesungguhnya di Indonesia belum berlaku wajib belajar, tetapi baru pada pengertian *universal education*. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (2) dengan tegas mengatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini diperkuat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Jalur pendidikan sekolah memiliki jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jenjang pendidikan merupakan tahapan dalam pendidikan berkelnjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Komar (2006:61) menyatakan:

> Jenjang pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga Negara agar memperoleh pendidikan yang bersifat pengetahuan dasar bagi tiap-tiap warga Negara. Warga Negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, sedangkan yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar pada jalur mana saja. Pendidikan dasar diselenggarakan pada tingkat SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun atau kesetaraan SD dan SLTP.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar).

Berangkat dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 6 Ayat (1) yaitu: Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Pasal 11 Ayat (2) yaitu: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dan Pasal 34 Ayat (2) yaitu: Pemrintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sesungguhnya Pemerintah sudah harus melaksanakan wajib belajar sebagai *compulsory education* dan bukan *universal education.* Memang untuk melaksanakan kebijakan wajib belajar dalam pengertian *compulsory education* diperlukan dana sesuai dengan kebutuhan.

Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itulah dilakukan perintisan wajib belajar sembilan tahun yang dimulai tahun 1989.

Panduan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemetaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (2010) menyatakan dalam masa perintisan ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tujuan utama adalah menyiapkan konsepsi tentang wajib belajar 9 tahun, pengorganisasian, penentuan sistem pendataan dan pemetaan, mencari jenis pola wajib belajar 9 tahun, teknik sosialisasi, penyuluhan dan publikasi, serta penyiapkan lokasi perintisan yang setiap provinsi diambil satu kabupaten/kota (kotamadya saat itu). Masa perintisan ini sekaligus menyiapkan untuk dapat dicanangkannya wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994.

Wajib belajar 9 tahun secara intensif dilakukan sejak tahun 1994 yaitu sejak dicanangkannya wajib belajar 9 tahun pada tanggal 2 Mei 1994, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto mengumumkan dimulainya pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 Tahun, setara dengan pendidikan minimal SMP dan yang sederajat. Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep pendidikan dasar untuk semua (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Program wajib belajar 9 tahun memiliki empat ciri utama: (1) tidak dilakukan melalui paksaan tetapi himbauan, (2) tidak memiliki sangsi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, (3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, (4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 7-15 tahun.

Semula wajib belajar belajar 9 tahun ini direncanakan tuntas pada tahun 2003/2004 yaitu tepat akan dimulai berlakunya perdagangan bebas tingkat Asia Tenggara. Akan tetapi, karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, program ini tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga target tidak tercapai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penuntasan wajib belajar 9 tahun dijadwal ulang dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2008 dengan melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Pencepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tersebut antara lain ditegaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/pendidikan yang sederajat sekurang-kurangnya mencapai 95% (tuntas paripurna) pada akhir tahun 2008.

Panduan Penyelengaraan Pendataan dan Pemetaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (2010) menyatakan tuntas paripurna telah berhasil diraih dengan dicapainya APK SMP/MTs/pendidikan yang sederajat sebesar 96,18% pada tahun 2008/2009. Pada tahun2009/2010 APK nasional SMP/MTs/ pendidikan yang sederajat sudah mencapai angka 98,11%. Meskipun secara nasional SMP/MTs/pendidikan yang sederajat telah melebihi target, ternyata ketuntasan ini belum merata untuk seluruh provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2009/2010 provinsi yang telah tuntas paripurna baru 21 provinsi. Provinsi-provinsi lain baru mencapai tuntas utama sebanyak 7 provinsi, tuntas pratama 1 (satu) provinsi, dan masih ada 2 (dua) provinsi yang belum tuntas.

Kesenjangan ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Seluruh kota di Indonesia sudah mencapai tuntas paripurna, tetapi masih banyak kabupaten yang belum mencapai tuntas paripurna termasuk Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal pada tahun 2008/2009 APK

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tingkat SMP sebesar 91.94% (Tuntas Utama) target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus dicapai pada tahun 2009/2010 dengan APK minimum 95% (Tuntas Paripurna). Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 3.06% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sedang di Kecamatan Margasari pada tahun 2008/2009 APK Tingkat SMP sebesar 85.25% (Tuntas Madya), dengan demikian pada saat ini masih ada sekitar 9.75% anak usia 13-15 tahun tamatan SD/MI yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar.

2. Implementasi kebijakan wajib belajar

Untuk memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan wajib belajar, terlebih dahulu perlu mengetahui maksud yang terkandung didalamnya. Ada tiga konsep utama yang harus dimengerti. *Pertama,* adalah konsep tentang implementasi, *kedua*, adalah konsep tentang kebijakan dan *ketiga* adalah konsep wajib belajar. Namun untuk memudahkan dalam memahami tiga konsep itu, maka pembahasan konsep tersebut akan dimulai dengan *Pertama* kebijakan, *Kedua* implementasi kebijakan dan *Ketiga* wajib belajar kemudian ketiga konsep itu dipahami secara utuh.

Pertama Kebijakan.

Terdapat beraneka ragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy dalam Kismartini (2009:1.4), yaitu sebagai berikut. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Implikasi dari pengertian ini adalah: Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan. Kebijakan itu berisi tidakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa. Menurut Ramlan Surbakti, (1984) dalam Ekowati (2009:1) menyatakan bahwa: "Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah."

Terdapat banyak ragam pengertian kebijakan publik. Irfan Islamy dalam Kismartini (2009: 1.6-1.7) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik, seperti pendapat Thomas R.Dye, George C.Erwards dan Ira Sharkansky, James Anderson dan David Easton. Jika diperhatikan dengan seksama terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.

Thomas R.Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan." Sedang George

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C.Edwards III dan Ira sharkansky mengemukakan kebikan publik adalah "apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah." Sementara James E. Anderson mengatakan "Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah."

b. Kebijakan publik dipandang sebagai sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan: "Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah." Sedang David Easton mengatakan "Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat."

c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.

James E.Anderson: "Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah." Sedang George C. Edwards III dan Ira Sharkansky: "Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan."

Dari ketiga sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Menurut Thomas R.Dye, hal ini disebabkan oleh tiga hal dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu:

a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang direstui lembaga-lembaga pemerintah yang berkenaan untuk mencapai tujuan atau sasaran dan hasil akhir yang diharapkan serta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dan waktu tertentu. Dan kebijakan (publik) adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai.

Kedua Implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Indiahono (2009:143) menyatakan bahwa: "Implementasi kebijakan menunjuk aktifitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan." Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh benar-benar diterapkan dan dilaksanakan di lapangan serta berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan.

Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Ekowati (2009:72) mengemukakan: "Implementasi adalah melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh pemerintah baik eksekutif maupun keputusan peradilan." Juga dikemukakan definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi antar usaha mentransformasi keputusan ke dalam tindakan operasional, berusaha mencapai perubahan besar dan kecil sebagaimana yang dimandatkan oleh keputusan kebijakan.

Soesilowati (2008:47) menyatakan bahwa: "Mengimplentasikan berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)*; to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sesuatu)." Artinya implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Merumuskan proses implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan, pemerintah, atau keputusan peradilan). Van Meter dan Van Horn dalam Soesilowati (2008:47) menyatakan bahwa merumuskan proses implementasi sebagai *"those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achiecement of objectives set forth in prior policy decisions."* Sedangkan Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Soeliwati (2008:47) menjelaskan makna implementasi:

> Sebagai pemahaman apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan apa yang disampaikan kedua ahli tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa proses implentasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan-badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan melahirkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, akan tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atu tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan. Implementasi kebijakan dimaksudkan tidak saja berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, tetapi menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Geiger dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

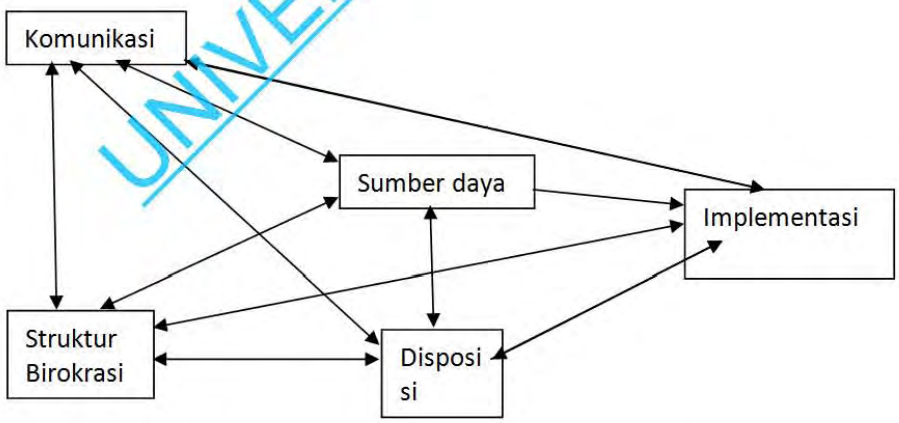
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Implementation of public policy: Issues of theory and practice mengatakan: *"There is what we want then there is what we get. Implementing public policy is frequently plagued with the realization that expectations often fall short when theory is translated into real world practices."*

Apa yang kita inginkan kemudian apa yang kita dapat. Pelaksanaan kebijakan umum sering dipersulit dengan kenyataan harapan-harapan sering tidak sukses ketika teori diterjemahkan ke dalam praktik yang sesungguhnya.

Menurut G eorge C. Edwards III (dalam Ekowati, 2009:37), ada 4 (empat) faktor kritis atau variabel dalam implementasi kebijakakan publik untuk menjawab pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil? apakah sarana utama implementasi kebijakan dapat berhasil? yaitu *communications* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions* atau *attitudes* (sikap), *bureaucratic structure* (struktur birokrasi), sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 berikut ini:

UNIVERSITAS TERBUKA



Gambar 2.1
Faktor Penentu Implementasi menurut George C. Edward III
Sumber : Diadopsi dari Nawawi 2009:138

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Komunikasi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, jika penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Agar komunikasi berjalan efektif, siapa bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima personel dan mereka harus jelas, akurat dan konsisten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas spesifikasinya, mereka boleh jadi tidak memahami siapa yang mereka arahkan sesungguhnya, kebingungan para implementor tentang apakah yang mereka lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka tidak akan melaksanakan sutu kebijakan yang diharapkan. Tidak cukupnya komunikasi juga memberikan implementor dengan kebijaksanaan agar mereka berusaha kembali kebijakan umum ke tindak-tindak spesifik. Kebijaksanaan ini tidak akan diperlukan melatih pencapaian tujuan pembuat keputusan aslinya. Jadi, intruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan yang bersangkutan. Arahan yang tepat mengarahkan pada implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

2. Sumber Daya.

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metoda. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan masalah bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Jika personel bertanggung jawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif.

Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efesien. Pentingnya sumber daya melihat: ukuran staff dan dengan perlu keahlian, informasi relevan dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (meliputi bangunan, sarana prasana, tanah dan *supply*) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak memadai akan berakibat kebijakan tidak dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dapat diberikan dan peraturan-peraturan tidak dapat dikembangkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi.

Disposisi atau sikap (*implementor*) merupakan faktor krusial ketiga pada pendekatan kita dari studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan (diharapkan). Disposisi atau sikap yang dimiliki implementor kebijakan, sepert komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalakan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementor kebijakan jika memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Banyak implementor melatih mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk membebaskan diri dari superior utamanya merumuskan kebijakan. Alasan lainya adalah kekomplekan kebijakan itu sendiri. Cara implementasi melatih kebijaksanaanya tergantung pada bagian besar atas diposisinya ke arah kebijakan. Siapnya, akan dipengaruhi oleh cara dia memandang kearah kebijakan perseorangan dan bagaimana mereka melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan kepentingan personel. Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi atau kerja dilingkungan disposisi implementor atau mencoba mengurangi kebijaksaan implementor.

4. Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). Fungsi SOP menjadi pedoman bagi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

setiap implementor dalam bertindak. Jika sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya dalam struktur Birokrasi Fragmentasi Organisasi boleh jadi menghalangi, koordinasi diperlukan dalam implementasi secara berhasil.

Suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerja sama (*cooperation*) banyak orang. Pemborosan sumber daya yang langka merintangi perubahan, menciptakan kebingungan, mengarahkan kerja kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting terlupakan. Seperti kebijakan mengelola unit organisasi mereka mengembangkan *Standard Operating Prcedure* (SOP). Mengambil alih situasi rutin dengan menguraikan aturan-aturan. SOP didesain kebijakan terus menerus seringkali tidak tampak sebagai kebijakan baru dan banyak kasus-kasus kebal terhadap perubahaan, penundaan, pemborosan, atau tindakan yang tidak diinginkan. SOP kadang-kadang merintangi daripada membantu implementasi.

Keempat faktor dilaksanakan secara simultan dan antarhubungan antara satu dengan lainnya, pendekatan ideal akan mencerminkan kekomplekskannya melalui diskusi secara menyeluruh. Lebih jauh kita perlu mengingat bahwa implementasi setiap kebijakan adalah suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak variabel. Masing-masing bagian mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Melihat bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi.
2. Menjelaskan mengapa faktor-faktor yang muncul sebagai saran implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dimana alasannya dapat dikemukakan juga, subkategori dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dipertimbangkan dalam bermacam-macam keadaan. Pendekatan ini kita harapkan mengumpulkan peengertian semakin mendalam dari keragaman hubungan yang terkait dalam implementasi kebijakan publik.

Howlett dan Ramesh (dalam Soesilowati, 2008:70) mengatakan bahwa:

> Implementasi kebijakan selalu dipengaruhi oleh: (1). Kejelasan pangkal tolak permasalahan, artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berdomain sosial, politik, ekonomi ataupun kebudayaan akan lebih memudahkan implementor kebijakan melaksanakan.(2).Tingkat kekuatan masalah yang di hadapi, semakin akut persoalan yang di hadapi maka akan membutuhkan waktu penyelesaian yang lama dan pengorbanan sumberdaya material maupun immaterial yang banyak pula.(3). Ukuran kelompok yang di targetkan, semakin kecil *targeted groups* yang di tuju sebuah kebijakan publik akan semakin mudah dikelola ketimbang kelompok target yang besar dan mempunyai ruang lingkup yang luas. (4). Dampak perilaku yang di harapkan, jika dampak yang di inginkan semata-mata kuantitatif maka akan lebih mudah menanganinya ketimbang jika dampak yang di inginkan merupakan perilaku seseorang.

Selanjutnya Soesilowati, (2008:70) mengatakan:

> Untuk diperlukan paling tidak; (1) penegtahuan, keahlian dan ketrampilan untuk mengelola proses implementasi kebijakan;(2) pemahaman mengenai desain kebijakan secara utuh; (3) pengetahuan mengenai keseluruhan aspek sistem, peta dan kondisi linkungan aktual dimana yang bersangkutan berperan atau dimana kebijakan dilaksanakan; (4) informasi dini mengenai perkembangan dan pelaksanaan (5) kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemungkinan langkah tindak lanjut, yang dapat berwujud *policy adjustment* ataupun legal *reforms, system improvement* tertentu dan sebagainya.

Sedang Mustopadidjaya dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Soesilowati (2008:71) mengatakan bahwa: "Berhasil atau gagalnya suatu kebijakan memang tergantung pada beberapa kondisi, (a) ketepatan kebijakan itu sendiri, (b) konsistensi, evektivitas dan pelaksanaannya, (c) terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan *(any unanticipated condition)*."

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kondisi (a) semestinya sudah di capai pada tahapan formulasi dan itu dapat disimak pada desain kebijakan. Yang perlu dicermati lebih jauh pada tahapan implementasi adalah (1) vadilitas asumsi- asumsi yang mendasari dilihat dalam kontek dinamika perkembangan keadaan "Lingkungan kebijakan" yang aktual dan dari "wilayah kerja" dimana kebijakan tersebut dilaksanakan yang dapat bervariasi atau berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya, (2) ketepatan momentum pemberlakuannya yang dapat berbeda sebagai akibat dinamika perkembangan dan bervariasinya kondisi lingkungan strategic menurut wilayah. Kondisi (b) tergantung pada beberapa faktor dimana kemungkinan kegagalan (*policy failure*) dapat disebabkan oleh *non-implementation* ataupun oleh *unsuccessful-implementation*. Kondisi *non-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, disebabkan oleh tiadanya kerjasama antar pelaksana, terdapat beberapa kendala yang teratesi dan sebagainya. Sedangkan *unsuccessful implementation* terjadi apabila kebijakan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan padahal telah dilaksanakan secara utuh. Kondisi (c) merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan untuk mengontrolnya.

Bridgman, J. & Davis, G. dalam Soesilowati (2008:73) menyatakan: Walaupun tidak banyak studi tentang bagaimana mendesain kesuksesan implementasi kebijakan, namun dari beberapa literatur dapat disarikan bahwa: (1) jika sebuah kebijakan publik tidak didasarkan pada kerangka dan acuan teori yang kuat dan jelas, maka implementasinya akan terganggu; (2) antara kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkanpun jelas; (3) implementasi akan gagal jika terlalu banyak institusi yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bermain, artinya mesti disusun sebuah koordinator pengelola agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik; (4) sosialisasi kebijakan sangatlah penting terutama pada jenjang level paling bawah (*street level bureaucracy*); dan (5) evaluasi kebijakan harus terus menerus dilakukan mengingat kebijakan berevolusi menjadi baik dan efisien jika ada evaluasi yang berkesinambungan.

Ketiga Wajib Belajar. Dalam kamus pendidikan di dunia dikenal istilah pendidikan semesta (*universal education*) dan wajib belajar (*compulsory education*). Menurut Soedijarto (2008) pendidikan semesta (*universal education*) adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada semua warga negara mengikuti pendidikan sesuai dengan kemampuan. Wajib belajar (*compulsory education*) merujuk pada suatu kebijakan yang mengahruskan pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu, dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar). Jika dilihat dilihat dari pengertian wajib belajar sebagai terjemahan *compulsory education*, sesungguhnya di Indonesia belum berlaku wajib belajar, tetapi baru pada pengertian *universal education*. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (2) dengan tegas mengatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini diperkuat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madarasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar). Berangkat dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 6 Ayat 1 yaitu: Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Pasal 11 Ayat 2 yaitu: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dan Pasal 34 Ayat 2 yaitu: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sesungguhnya pemerintah sudah harus melaksanakan wajib belajar sebagai *compulsory education* dan bukan *universal education.* Memang untuk melaksanakan kebijakan wajib belajar dalam pengertian *compulsory education* diperlukan dana sesuai dengan kebutuhan.

Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Sa'ud (2008) menyatakan bahwa:

> Wajar Dikdas 9 Tahun bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* yang dilaksanakan di negara-negara maju yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah (tanpa nomor halaman).

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan *universal education* dari pada *compulsory education*. *Universal education* berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasif; (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undang-undang khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar. Bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Secara rinci, bentuk-bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi situasi yang normal;

(2) SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku;

(3) SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah;

(4) SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.

(5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dibawah bimbingan Departemen Agama.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI yang belum mengikuti program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan mencari solusinya di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Metode penelitian ini menggunakan metode kwalitatif yang berjenis deskriptif dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Selain itu dilakukan observasi dan penkajian dokumen untuk melengkapi dan dan fakta yang diperlukan. Jenis deskriptif adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal) dari sudut pokok kajian analisis kebijakan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Metode kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Metode kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis.

Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya? Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *indepth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal (Finlay, 2006).

Tujuan utama metode kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understandable*) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru. Selanjutnya Moleong (2007) berpendapat bahwa: Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, berjenis deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiaanya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian.

Salah satu indikator ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Di Kabupaten Tegal pada tahun 2008/2009 APK Tingkat SD 126.29 dan APK Tingkat SMP sebesar 91.94% (Tuntas Utama) target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus dicapai pada tahun 2009/2010 dengan APK minimum 95% (Tuntas Paripurna). Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 3.06% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sedang di Kecamatan Margasari pada tahun 2008/2009 APK Tingkat SMP sebesar 85.25% (Tuntas Madya), dengan demikian pada saat ini masih ada sekitar 9.75% anak usia 13-15 tahun tamatan SD/MI yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar.

Menurut Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari dari siswa lulusan SD tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 1625 yang melanjutkan 1462 dan yang tidak melanjutkan 165.

Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi masih cukup banyak tamatan SD/MI tidak mengenyam pendidikan dasar di tingkat SMP/MTs, termasuk di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Kecamatan Margasari merupakan salah satu kecamatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tegal yang berjumlah 18 kecamatan. Tingkat ketuntasan yang belum tercapai di Kecamatan Margasari ini mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI yang saat ini tidak sekolah dengan berbagai kendala. Menurut Paparan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tegal yang menjadi kendala Wajib Belajar adalah kendala ekonomi, daya tampung, geografis budaya, dan alasan khusus.

Bertitik tolak dari kondisi Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal tersebut, upaya percepatan penuntasan wajib belar pendidikan dasar 9 tahun memerlukan penanganan yang menyeluruh dan didukung oleh penerapan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang ada, serta diarahkan supaya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan penuh tanggung jawab serta mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Penuntasan wajib belajar membutuhkan peran serta masyarakat dan melibatkan berbagai komponen anak bangsa dalam arti luas, baik dalam wadah organisasi maupun perorangan terutama untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar bersedia mengikuti program wajib belajar. Dalam rangka inilah penulis tertarik melakukan analisa kebijakan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Magersari, Kabupaten Tegal.

Konsepsi Edward III tentang implementasi kebijakan menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan empat elemen yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil penelitian ini adalah berupa laporan deskriptif tentang implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dilaksanakan di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

C. Definisi Operasional

Variabel utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Secara teoritis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keempat faktor tersebut, dengan asumsi keempat faktor tersebut dalam kondisi baik, maka dengan sendirinya akan berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Keempat faktor tersebut dioperasionalkan dalam Tabel 2.1 pada halaman 40 berikut ini:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sumber Data Primer	Sumber Data Sekunder
1	Komunikasi	a. Kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan wajar dikdas b. Koordinasi antar bagian/seksi terkait	Wawancara	Permendiknas
2	Sumber daya	a. Staff yang kompeten b. Sumberdaya finansial c. Sarana dan Prasarana	Wawancara	Data Kepegawaian Di lapangan
3	Disposisi	a. Respon implementor terhadap kebijakan b. Pemahaman terhadap kebijakan c. Preferensi nilai yang dimiliki implementor	Wawancara	Data Kepegawaian Di lapangan
4	Struktur birokrasi	a. Tersedia prosedur opererasi yang standar b. Pola-pola dalam hubungan dalam organisasi c. Kejelasan aturan dalam birokrasi	Wawancara	Permendiknas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah ingin memetakan dan merekontruksi apa yang secara nyata maupun realitas yang implisit dari berbagai faktor; menggambarkan kondisi objek penelitian dari sudut pokok kajian analisis kebijakan implemtasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; berusaha memahami apa makna di balik realitas yang ada; dan lebih tertarik pada alasan mengapa implemtasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, KabupatenTegal seperti itu.

Untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, peneliti memulainya dari pengumpulan data di lapangan (10 SMP/MTs), melakukan wawancara kepada Guru SD kelas VI, Kepala SD, Kepala SMP, Guru BP/BK SMP, Tokoh Masyarakat, Kepala UPTD Dikpora, Camat di Kecamatan Margasari, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, melakukan pengamatan dan pemanfaatan dokumen resmi.

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (transkrip wawancara), gambar (hasil memotret), dan dokumen yang diperoleh dari SMP/MTs, UPTD Dikpora Kecamatan Margasari, Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Subdit Program Direktorat Pembinaan SMP Kemendiknas dan instansi terkait lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Pemilihan penelitian ini dilakukan secara sengaja dikarenakan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Kajian mengenai implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun semakin penting, mengingat salah satu program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan yaitu dengan melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dimana pada program tersebut mentargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 95% anak usia sekolah harus menempuh pendidikan sampai jenjang SMP, akan tetapi kenyataan di lapangan terdapat fakta 94.71 % dan terdapat Angka Putus Sekolah 1.51 % (74 dari jumlah siswa SMP/MTs 4897) pada tahun 2010.
2. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-20014 menyebutkan: Salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, program penuntasan pendidikan dasar perlu dilakukan, karena sebagian tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Tegal di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
3. Salah satu indikator ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Di Kabupaten Tegal pada tahun 2008/2009 APK Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 91.94% (Tuntas Utama) target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

harus dicapai pada tahun 2009/2010 dengan APK minimum 95% (Tuntas Paripurna).

Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 3.06% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Hal itu tersebar di 18 kecamatan (Lampiran 4), diantaranya: Kecamatan Lebaksiu APK tingkat SMP sebesar 109.07%, Kecamatan Kedungbanteng APK tingkat SMP sebesar 86.29%, Kecamatan Pangkah APK tingkat SMP sebesar 93.11%, Kecamatan Slawi APK tingkat SMP sebesar 122.36%, Kecamatan Adiwerna APK tingkat SMP sebesar 191.07%, Kecamatan Dukuhturi APK tingkat SMP sebesar 119.63%, Kecamatan Talang APK tingkat SMP sebesar 262.00%, Kecamatan Warureja APK tingkat SMP sebesar 149.38%, sedang Kecamatan Margasari APK Tingkat SMP sebesar 85.25% (Tuntas Madya), dengan demikian pada saat ini di Kecamatan Margasari masih ada sekitar 9.75% anak usia 13-15 tahun tamatan SD/MI yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar.

4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari menyatakan dari siswa lulusan SD tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 1625 yang melanjutkan 1462 dan yang tidak melanjutkan 165.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Tegal Waudin (2011, 19 Maret) dalam *Suara Merdeka* mengatakan bahwa: "Siswa lulusan SD tahun ajaran 2009/2010 di Kabupaten Tegal yang tidak melanjutkan paling banyak di Kecamatan Margasari sebanyak 151 anak." (hlm.A). Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi masih cukup banyak tamatan SD/MI tidak mengenyam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan dasar di tingkat SMP/MTs., termasuk di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

Kecamatan Margasari merupakan salah satu kecamatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal yang berjumlah 18 kecamatan. Tingkat ketuntasan yang belum tercapai di Kecamatan Margasari ini mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI yang saat ini tidak sekolah dengan berbagai kendala. Menurut Paparan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tegal yang menjadi kendala wajib belajar adalah "Ekonomi, Daya tampung, Geografis, Budaya, dan Alasan khusus."

Bertitik tolak dari kondisi Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal tersebut, upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun memerlukan penanganan yang menyeluruh dan didukung oleh penerapan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang ada, serta diarahkan supaya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan penuh tanggung jawab serta mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. Nara Sumber.

Pada tahap awal memasuki lapangan dipilih nara sumber yang memiliki pengetahuan di bidang pendidikan dasar dan juga pengetahuannya akan siapa lagi yang dapat dijadikan informan yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari, sehingga mampu "membukakan pintu" kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Disamping nara sumber diatas, informan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak-anak tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs dan anak-anak yang putus sekolah SMP/MTs dan orang tuanya melalui Guru SD kelas VI dan Kepala SD, Kepala SMP, Guru BP/BK, Camat serta tokoh masyarakat.

C. Instrumen Penelitian

Agar dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen atau alat penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan penulis sendiri sebagai instrumen utama penelitian. Data yang ingin dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari nara sumber atau informan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman *review* dokumen (*document review*).

D. Prosedur Pengumpulan Data

Mengingat metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, maka teknik pengambilan sumber data dilakukan secara selektif, dimana peneliti memakai berbagai pertimbangan berdasar konsep teori yang dipergunakan, keingintahuan peneliti, karakteristik pribadi dan sebagainya. Sehingga memperoleh informasi yang *valid* dan penuh pemaknaan dan lebih berharga dari sekedar ungkapan dalam bentuk angka. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki pengetahuan di bidang pendidikan dasar yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dan Kepala

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UPTD Dikpora Kecamatan Margasari, sehingga mampu "membukakan pintu" kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Adapun informan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak-anak tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs dan anak-anak yang putus sekolah SMP/MTs dan orang tuanya melalui Guru SD kelas VI dan Kepala SD, Kepala SMP, Guru BP/BK, Camat serta tokoh masyarakat.

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Peneliti sebagai instrumen kunci melakukan pengamatan secara seksama terhadap fenomena terkait dengan perhatian masyarakat dalam implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Untuk melengkapi data yang dijaring melalui observasi maka peneliti juga menggunakan teknik interview (wawancara) dan telaahan dokumen.

E. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data secara induktif. Untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, peneliti memulainya dari pengumpulan data di lapangan (10 SMP/MTs), melakukan wawancara kepada Guru SD kelas VI, Kepala SD, Guru BP/BK SMP, Kepala SMP, Tokoh Masyarakat, Kepala UPTD Dikpora, Camat di Kecamatan Margasari, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, melakukan pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (transkrip wawancara), gambar (hasil memotret), dan dokumen resmi yang diperoleh dari SMP/MTs, UPTD Dikpora Kecamatan Margasari, Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Subdit Program Direktorat Pembinaan SMP Kemendiknas dan instansi terkait lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapngan, dan setelah di lapangan. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder (dokumen resmi) seperti peraturan dan perundang-undangan terkait dengan Wajib Belajar. Pada saat pengumpulan data berlangsung, seperti pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian berupa hasil pengumpulan data dan pembahasan berupa hasil penelitian.

A. Wilayah Penelitian

1. Gambaran umum

Kecamatan Margasari dengan ibukota di Desa Margasari, merupakan kecamatan yang berjarak 24 Km dari pusat Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Menurut BPPP Kecamatan Margasari (2010:7) "Kecamatan Margasari memiliki batas-batas: Sebelah Utara: Wilayah Kecamatan Pagerbarang, Sebelah Timur: Wilayah Kecamatan Balapulang, Sebelah Selatan: Wilayah Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Sebelah Barat: Wilayah Kabupaten Brebes."

Kecamatan Margasari tersusun oleh 13 (tiga belas) Desa, yaitu:

- Selatan: Desa Pripuk Selatan, Desa Prupuk Utara, Desa Kaligayam, Desa Wanasari
- Utara : Desa Margasari, Desa Kalisalak, Desa Jatilaba, Desa Karangdawa
- Timur : Desa Danaraja, Desa Jembayat
- Barat : Desa Dukuhtengah
- Tengah: Desa Margasari, Desa Pakulaut

2. Karakteristik lahan

Berdasarkan Tabel 4.1 pada halaman 49 diketahui Luas Lahan berdasar Pemanfaatan berjumlah total 8.499.233, terdiri Sawah 3.465,329, Tegalan 711,400, Pekarangan 1.134,739, Hutan 3.187,765, Lain-lain 191.031 yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tersebar di 13 desa. Dari data tersebut dapat disimpulkan penyediaan lahan tertinggi ialah untuk sawah di desa Jembayat seluas 443.157 Ha, sedangkan penyediaan lahan terendah (paling sempit) ialah di desa Marga Ayu seluas 2000 Ha.

Tabel 4.1 Luas Lahan Berdasar Pemanfaatan

No	Desa	Luas (Ha)				
		Sawah	Tegalan	Pekarangan	Hutan	Lain-lain
1	Prupuk Selatan	152,070	144,478	75,452	-	40,000
2	Prupuk Utara	135,015	47,000	70,985	135,000	35,000
3	Kaligayam	232,000	43,682	58,618	750,000	11,400
4	Dk. Tengah	186,120	37,620	69,954	-	2,500
5	Wanasari	237,565	22,475	11,235	823,000	5,156
6	Danaraja	150,200	14,110	58,555	166,000	13,375
7	Margasari	199,380	26,250	74,080	110,900	19,929
8	Pakulaut	397,000	145,000	81,000	-	7,000
9	Jembayat	443,157	5,000	147,110	337,000	34,671
10	Karang Dawa	319,725	2,000	730,000	243,100	11,000
11	Jatilaba	210,097	27,600	67,650	200,000	5,500
12	Kalisalak	418,472	172,242	262,600	256,265	2,750
13	Marga Ayu	210,097	2,000	84,500	160,500	2,750
	Jumlah	**3,465,329**	**711,400**	**1.134,739**	**3.187,765**	**191,031**

Sumber : Diadopsi dari Programa Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan BPPP Kecamatan Margasari Tahun 2010 hal.8

Wilayah BPPPK Kecamatan Margasari memiliki bentang elevasi ketinggian 50 – 400 meter dari permukaan laut, dengan kemiringan bentang 15 – 25 derajat (tabel tidak ditampilkan).

3. Penduduk

a. Komposisi penduduk

Berdasarkan Tabel 4.2 pada halaman 50 diketahui komposisi penduduk masing-masing desa wilayah kerja UPTD TANBUNHUT berjumlah total 110.382 jiwa, terdiri laki-laki 54.429 jiwa dan wanita 55.953 jiwa. Bila dibandingkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan jumlah total tahun sebelumnya (tahun 2009) yaitu 108.298 jiwa, dengan laki-laki 53.251 jiwa dan wanita 55.045 jiwa yang tersebar 13 desa maka dapat disimpulkan telah terjadi kenaikan populasi sebesar 2.084.

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Tahun 2010

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Prupuk Selatan	5.314	5.390	10.553
2	Prupuk Utara	2.704	2.742	5.446
3	Kaligayam	1.132	1.156	2.288
4	Dk. Tengah	4.090	4.267	8.357
5	Wanasari	1.453	1.350	2.803
6	Danaraja	1.714	1.741	3.455
7	Margasari	5.771	6.530	11.963
8	Pakulaut	5.068	4.925	9.993
9	Jembayat	7.461	8.368	15.829
10	Karang Dawa	7.687	7.668	15.355
11	Jatilaba	4.971	5.103	10.074
12	Kalisalak	4.769	4.895	9.664
13	Marga Ayu	2.295	2.314	4.609
	Jumlah	**54.429**	**55.953**	**110.382**

Sumber: Diadopsi dari Program Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan BPPP Kecamatan Margasari Tahun 2010 hal.9

b. Kelompok umur

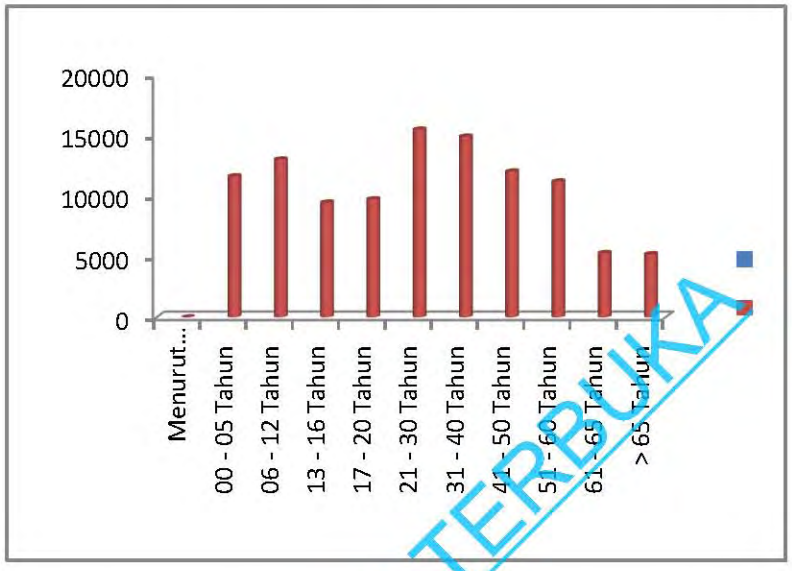
Berdasarkan Tabel 4.3 pada halaman 51 berikut diketahui bahwa jumlah total penduduk Kecamatan Margasari pada tahun 2009 berdasarkan kelompok umur sebesar 108.296 orang, dengan jumlah tertinggi pada kelompok umur 21-30 tahun sebesar 15.527 orang, kemudian kelompok umur 31-40 tahun sebesar 14.945 orang, kelompok umur 6-12 tahun sebesar 13.055 orang, kelompok umur 41-50 tahun sebesar 12.065 orang, kelompok 0-5 tahun sebesar 11.666 orang, kelompok umur 51-60 tahun sebesar 11.239 orang, kelompok umur 17-20 tahun sebesar 9.761 orang, kelompok umur 13-16 tahun sebesar 9.497 orang, kelompok umur

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

61-65 tahun sebesar 5.316 orang dan jumlah terendah pada kelompok usia > 65 Tahun sebanyak 5.225 orang.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur



Sumber: Diadopsi dari Data Kependudukan Kecamatan Margasari Tahun 2009

c. Mata pencaharian

Berdasarkan Tabel 4.4 pada halaman 52 berikut diketahui bahwa jumlah total mata pencaharian Kecamatan Margasari pada tahun 2009 yang bekerja sebesar 49.040. Kemudian, mata pencarian penduduk yang tertinggi ialah buruh tani sebesar 20253 orang (41.29 %) , diikuti oleh petani sendiri (yaitu petani dengan lahan sendiri) sebesar 15328 orang (31.25), Bangunan/Konstruksi sebesar 2284 orang (4.65%), PNS/ABRI/POLRI sebesar 2050 orang (4.18%), Industri sebesar 1858 orang (3.78), Pert/Penggalian sebesar 715 orang (1.45%), Pensiunan sebesar 698 orang (1.42%) dan lain-lain sebesar 286 orang (0.58%). Data nelayan, petugas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

listrik, dan pegawai bank berturut-turut nomor 3, 6, dan 10 tidak ditemukan sehingga diberi jumlah nol.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani Sendiri	15.328	31.25
2	Buruh Tani	20.253	41.29
3	Nelayan	0	0
4	Industri	1.858	3.78
5	Pert. / Penggalian	715	1.45
6	Listrik/ Gas/ Air minum	0	0
7	Bangunan / Kontruksi	2.284	4.65
8	Perdagangan	3.898	7.94
9	Angkutan / Transportasi	1.670	3.40
10	Bank / Lembaga keuangan	0	0
11	PNS/ ABRI/ POLRI	2.050	4.18
12	Pensiunan	698	1.42
13	Lain-lain	286	0.58
	Jumlah total	**49.040**	**100**

Sumber: Diadopsi dari Program Balai Penyuluhan Pertanian Dan Kehutanan BPPP Kecamatan Margasari tahun 2010 hal.9

d. Tingkat pendidikan

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Margasari Tahun 2009 Tabel 4.5 pada halaman 53, jumlah penduduk Kecamatan Margasari 108.296, sedang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan secara berurutan adalah yang pertama lulusan SD:26.121 orang (24.12%), yang kedua lulusan SLTP: 18.060 orang (16.67%), yang ketiga lulusan SLTA: 14.447 orang (13.34), yang keempat Tidak Tamat SD: 12.128 orang (11.19%), selebihnya Belum Sekolah: 11.687 orang (10.79%) dan Lain-lain: 23.896. (22.06%).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasar Jumlah Lulusan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	11.687	10.79
2	Tidak Tamat SD	12.128	11.19
3	SD	26.121	24.12
4	SLTP	18.060	16.67
5	SLTA	14.447	13.34
6	Perguruan Tinggi/ Akademi	1.957	1.80
7	Lain – lain	23.896	22.06
	Jumlah	**108.296**	**100**

Sumber: Diadopsi dari Data Kependudukan Kecamatan Margasari Tahun 2009

B. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan Margasari

George C. Edwards III (dalam Ekowati, 2009:37) berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor kritis atau variabel dalam implementasi kebijakan publik untuk menjawab pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil? apakah sarana utama implementasi kebijakan dapat berhasil?, yaitu *communications* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions* atau *attitudes* (sikap), *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Kondisi masing-masing faktor dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Paling tidak ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan faktor komunikasi, yaitu kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; koordinasi antar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bagian/seksi terkait; bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan? (metode yang digunakan; intensitas komunikasi).

Kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan wajar dikdas, berarti pihak yang merumuskan kebijakan harus memberikan penjelasan secara rinci mengenai sasaran dan tujuan kebijakan wajar dikdas yang hendak dicapai. Berbagai masalah serius timbul apabila perintah keliru dimengerti, keitika informasi resmi dari atasan tidak disampaikan dengan benar. Setiap situasi seperti itu disebabkan oleh kegagalan salah satu aspek selama berlangsungnya proses komunikasi. Persoalan sebenarnya adalah apakah seorang manajer dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak. Gibson, Ivancevich & Donnelly (1985:105) mengemukakan: "Komunikasi tidak dapat dielakkan dalam setiap fungsi organisasi. Setiap manajer harus menjadi seorang komunikator. Komunikasi antara orang-orang tergantung pada kekuatan dalam masyarakat dan lingkungannya. Komunikasi adalah "proses" yang terjadi di dalam masyarakat."

Di tengah berjalannya pelaksanaan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, Rabu, 28 Maret 2007 lalu telah meluncurkan Program Sosialisasi dan Publikasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun), di Depdiknas, Jakarta. Launching dan Deklarasi Tekad Penuntasan Wajar Diknas 9 Tahun oleh Mendiknas. "Program Wajar Dikdas 9 Tahun merupakan program prioritas pemerintah yang memerlukan perhatian khusus. Wajar Dikdas ini merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa, khususnya dalam menghadapi tangtangan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global," jelas Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam Pelangi Pendidikan (2007:17).

Untuk mendukung upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Departemen Pendidikan Nsional meluncurkan program sosialisasi, kampanye, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:

a. Road Show Penuntasan Wajib Belajar ke Kabupaten/Kota;
b. Sosialisasi dan publikasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisonal;
c. Kuliah Kerja Nyata Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (KKN Wajar) bekerja sama dengan sasaran 18 Perguruan Tinggi, dengan sasaran 30 kabupaten dengan APK SMP/MTs dibawah 80%;
d. Sosialisasi dan Asistensi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di 20 kabupaten dengan APK SMP/MTs dibawah 80%;
e. Sosialisasi Wajib Belajar melalui program Sarjana Dan Pemuda Penggerak Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SP2WB) di 40 kabupaten dengan APK SMP/MTs dibwah 80%;
f. Sosialisasi Wajib Belajar bekerja sama dengan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga penyelenggara pendidikan, seperti: Muslimat NU, Maarif NU, Aisyiah, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Dharma Wanita Persatuan, PKK, dan Yayasan sekolah Rakyat;
g. Sosialisasi Wajib Belajar bersama dengan dinas Pendidikan Provinsi melalui program dekonsentrasi di 441 kabupaten/kota di seluruh Indonesia;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

h. Sosialisasi wajib Belajar bersama Departemen Agama di sekitar 6.061 (5.187 sudah ikut) pondok pesantren salafiah di seluruh Indonesia;

i. Workshop sosialisasi Wajar Dikdas dengan Pontren;

j. Penganugrahan dan pemberian block grant Widyakrama terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang sudah tuntas Wajar).

Dalam acara peluncuran program Sosialisasi dan Publikasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di gedung Depdiknas, hadir 25 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 90 Kepala Dinas Kabupaten terpilih, Ketua LPM dari 14 Perguruan Tinggi Pelaksana KKN Wajib Belajar, Pimpinan Pusat beberapa lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga penyelenggara pendidikan, Tim Asistensi Wajib Belajar Tingkat Nasional, dan Kelompok Kerja Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang akan melaksanakan sosialisasi, kampanye dan pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di daerah.

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, maka hal itu diwujudkan dengan adanya komuniksasi berjenjang sesuai birokrasi yang ada. Dinas Dikpora Kabupaten Tegal memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala UPTD Dikpora Kecamatan. Dalam hal ini diantaranya telah diberikan pemaparan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Januari 2010 di Kecamatan Adiwerna kepada para Kepala Dinas Dikpora Kecamatan tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Tegal vs Program Pokok Pendidikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi pada umumnya implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun disampaikan dengan jelas. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari bahwa sudah ada informasi seperti yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tanggal 18 September 2006 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara.(GNP-PWB/PBA) dan Panduan Penyelengaraan Pendataan Dan Pemetaan Dalam Rangka Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama - Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah - Kementerian Pendidikan Nasional.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis merupakan bagian penting dalam proses komunikasi. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan memberikan pedoman tentang cara-cara teknis dan koordinasi antar bagian/seksi terkait oleh Tim Koordanasi Kecamatan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Wajib Belajar Pendidikan Dasar per desa;
2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB yang dilakukan di setiap desa;
3) menunjuk dan/atau mengusulkan lembaga atau organisasi masyarakat serta tenaga kependidikan sebagai penyelenggara atau pengelola program;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan GNP-PWB yang dilaksanakan baik oleh lembaga atau organisasi masyarakat di seluruh desa;
5) melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha dalam mendukung GNP- PWB di seluruh desa;
6) memantau dan menghimpun laporan tentang proses dan hasil penyelenggaraan program secara periodik dari penyelenggara atau pengelola pada setiap desa;
7) melaporkan pelaksanaan GNP-PWB kepada Bupati setiap akhir bulan Mei.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKC dapat membentuk sekretariat TKC yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di kecamatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB sehari-hari di seluruh desa di wilayahnya.

Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga mempercepat akses anak usia 13-15 tahun di SMP/MTs/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pendidikan yang setara SMP/MTs yang ada dilaksanakan di Kecamatan Margasari adalah:

1) SMP Terbuka yang berlokasi di SMPN 1 Margasari. SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif layanan belajar pada pendidikan dasar 9 tahun, merupakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

salah satu subsistem pendidikan formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri yaitu belajar yang lebih mengutamakan keaktifan dan kemandirian siswa dengan seminimal mungkin bantuan dari orang lain.

2) Program Kejar Paket B yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Setia Bhakti Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Raya Utara Km 01 Margasari. PKBM Setia Bhakti Margasari Kabupaten Tegal merupakan satuan lembaga Pendidikan Non Formal di bawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Bidang PNFI yang menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C.

Adapun yang menjadi kelompok sasaran kebijakan adalah anak yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTs/pendidikan yang setara beserta orang tuanya.

Jumlah anak yang putus sekolah di SMP/MTs adalah tergambar pada Tabel 4.6 pada halaman 60 berikut ini:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.6 Data SMP/MTs Kecamatan Margasari Tahun 2009/2010

No	Nama SMP/MTs	Jumlah Siswa SMP/MTs			
		Total	LK	PR	Angka Putus sek
1	SMPN 1 MARGASARI	846	371	475	22
2	SMPN 2 MARGASARI	804	415	389	29
3	SMPN 3 MARGASARI	836	432	404	19
4	SMP MUHAMMADIYAH MARGASARI	346	186	160	-
5	SMP MAARIF NU MARGASARI	267	130	137	5
6	SMP BAKTI PRAJA MARGASARI	389	208	181	30
7	MTs NURUL ULUM JEMBAYAT	670	315	355	-
8	MTs ASY-SYAFIIYAH KARANGASEM	496	229	267	4
9	MTs DARUL MUJAHADAH PRUPUK	181	102	79	-
10	MTs NU MIFTAHUL ULUM MARGASARI	580	296	284	-
	JUMLAH	5.415	2.684	2.731	109

Sumber: diambil dari 10 sekolah

Berdasarkan Tabel 4.6 Tabel Data SMP/MTs Kecamatan Margasari Tahun 2009/2010 jumlah SMP/MTs di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal sebanyak 10 sekolah, terdiri dari: Jumlah siswa seluruhnya: 5.415 dan jumlah angka putus sekolah (APS) sebanyak 109 orang. Untuk SMPN anak putus sekolah sebanyak: 70 orang. SMP dan MTs Swasta anak putus sekolah sebanyak: 39 orang. APS: 109 : 5.415 x 100% = 2.01%. Jadi yang masih aktif sebagai pelajar 5.415 – 109 = 5306 orang atau 5306 : 5.415 x 100% = 97.99%. Sedang jumlah anak usia 13-16 tahun berjumlah 9.497 orang sebagai tergambar dalam Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk kelompok umur 13-16 tahun yang setara usia SMP/MTs adalah 9.497 anak itulah yang menjadi kelompok sasaran kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kecamatan Margasari.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya: 5.415 dan jumlah angka putus sekolah sebanyak 109 orang. Untuk SMPN anak putus sekolah sebanyak: 70 orang. SMP dan MTs Swasta anak putus sekolah sebanyak: 39 orang. Berdasarkan selisih jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 13-16 tahun yang setara usia SMP/MTs dengan jumlah siswa SMP/MTs dan dikurangi jumlah angka putus sekolah adalah sebanyak 9.497 - 5.415 - 109 = 3.973 orang. Pertanyaannya, kemana penduduk kelompok umur 13-16 tahun yang setara usia SMP/MTs berada?

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai satu rangkaian gerakan nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu meningkatkan persentase peserta didik SMP/MTs/pendidikan yang setara terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008. Menurunnya angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/ pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1 %.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Jika berdasarkan pengertian di atas, maka APK SMP sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMP/MTs yaitu 5.306 orang dibagi jumlah penduduk kelompok umur 13-15 tahun, dalam hal ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelompok umur 13-16 tahun yaitu 9.497 orang atau 5.306 : 9.497 x 100% = 55.87%. Jadi APK SMP di Kecamatan Margasari pada tahun 2009 adalah 55.87%. artinya ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Dibawah Pratama: <80%. Sementara APK tingkat SMP Kecamatan Margasari tahun 2008/2009 menurut Dinas Dikpora Kabupaten Tegal sebesar 85.25 atau Tuntas Madya (Lampiran 4).

Mengenai angka putus sekolah sesuai dengan program pemerintah disebutkan menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs/ pendidikan yang setara pada akhir tahun 2008 setinggi-tingginya menjadi 1%. Angka Putus Sekolah (APS) mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Berdasarkan data pada tabel 4.6 angka putus sekolah SMP/MTs Kecamatan Margasari pada tahun 2009/2010 mencapai 109 atau 2.01%. Artinya program pemerintah untuk menurunkan APS 1% belum tercapai. Apalagi jika APS SMP/MTs yang berjumlah 109 ditambah lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan tahun 2008/2009 sebesar 165 orang sehingga jumlah total 274 orang tentu akan memperbesar persentase APS tingkat SMP meningkat.

Melalui Pemaparan Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Januari 2010 di Kecamatan Adiwerna tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Tegal vs Program Pokok Pendidikan kepada para Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan dikatakan:

> Dalam pemerataan dan perluasan akses disampaikan untuk melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan. Juga disampaiakan tentang indikator wajib belajar pendidikan dasar yaitu Penduduk Usia, Siswa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Usia, APK & APM, Permasalahan, Strategi. Juga disampaikan tentang ketuntasan Wajar dikdas Kabupaten Tegal.

Adapun tingkat ketuntasan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Dibawah Pratama : < 80%
- Tuntas Pratama : 80% - 85%
- Tuntas Madya : 85% - 90%
- Tuntas Utama : 90% - 95%
- Tuntas Paripurna : > 95%

Ketercapaian tingkat ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Tegal dari tahun 2001 sampai 2009 dalam paparan dikatakan sebagai berikut:

Tahun 2001 – 82,06 -> Pratama
Tahun 2002 – 83,12 -> Pratama
Tahun 2003 – 84,39 -> Pratama
Tahun 2004 – 84,91 -> Pratama
Tahun 2005 – 85,11 -> Madya
Tahun 2006 – 86,26 -> Madya
Tahun 2007 – 86,95 -> Madya
Tahun 2008 – 87,31 -> Madya
Tahun 2009 – 93.67 -> Utama

Lebih lanjut disampaikan tentang kendala pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Strategi penuntasannya yaitu sebagai berikut:

No.	Kendala		Program/Strategi Penuntasan
1	Ekonomi	→	Beasiswa Siswa Miskin (BSM); BOS
2	Daya Tampung	→	USB SMP/MTs; RKB SMP/MTs
3	Geografis	→	SD-SMP Satap; SMPT/MTsT
4	Budaya	→	Program Paket B, WAJAR DIKDAS DI PONTREN
5	Alasan Khusus	→	SMPLB

Sedang upaya yang dilakukan oleh Dikpora Kabupaten Tegal untuk mencapai target optimis penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat ditempuh melalui:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Advokasi ⟶ Sarjana masuk desa
- Asistensi ⟶ Dharma Wanita, PKK, Organisasi sosial kemasyarakatan
- Penjelasan kepada masyarakat

  Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari mengatakan:

  Penyuluhan dan publikasi itu dilakukan bersifat lintas sektoral melalui rapat koordanasi yang dihadiri Kepala Desa, orang tua wali murid yang di SD/MI. Metode yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal menggunakan pendekatan persuasif, metode ceramah melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan.

Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tanggal 18 September 2006 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) dikatakan tentang sosialisasi GNP-PWB.

a. Kegiatan sosialisasi GNP-PWB bertujuan untuk:
   1) menggugah kesadaran masyarakat agar memahami/ menghayati dan mau berpartisipasi, berkontribusi dan berdedikasi dalam pelaksanaan GNP-PWB
   2) mengkampanyekan dan mempublikasikan GNP-PWB kepada seluruh elemen masyarakat;
   3) meningkatkan peranserta masyarakat dalam GNP-PWB
   4) menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan GNP-PWB
   5) menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan GNP-PWB
b. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui:
   1) media massa seperti media cetak (koran, majalah,leaflet, brosur dan lain-lain), elektronik (radio, televisi);
   2) pertemuan-pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) dan Tim Koordinasi Desa (TKD) sesuai lingkup tugas masing-masing;
   3) menyisipkan pesan GNP-PWB dalam berbagai forum-forum yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tingkat intensitas komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi timbal balik antara pemangku kepentingan, UPTD Dikpora, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan telah mengkomunikasikan secara formal dan non formal, melalui media di desa seperti pengajian, salapanan desa. Komunikasi telah dilakukan agar tujuan dan sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal sampai kepada kelompok sasaran (*target group*) dengan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis), kami sampaikan ke kelompok, ke orang tua dan peserta didik.

Komunikasi juga telah dilakukan oleh guru Pamong dalam rangka membantu penyuluhan dan publikasi pada SD terdekat (khususnya kelas VI), pada pertemuan bersama tokoh masyarakat di Masjid, Langgar dan tempat pertemuan lain tentang SMP Terbuka. SMP terbuka adalah suatu sub sistem pendidikan pada tingkat SMP yang mengutamakan siswanya belajar secara mandiri dengan bimbingan terbatas dari orang lain. SMP Terbuka merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat SLTP yang diselenggarakan oleh SMP Reguler.

SMP Terbuka mempunyai misi untuk melayani anak-anak tamatan SD/MI yang berusia 13-15 tahun atau maksimal 18 tahun yang kurang beruntung karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu untuk mencari nafkah sendiri atau membantu orang tua bekerja, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti sebagai siswa SMP Reguler.

Tujuan SMP Terbuka sama dengan SMP Reguler yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> Memberi bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di Sekolah Dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga Negara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan/atau mengikuti pendidikan selanjutnya ke sekolah menengah. (Kepmen Dikbud No.54/U/1993 tentang SLTP).

Dasar hukum keberadaan SMP Terbuka adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka. Pengelolaan Penyelenggara dari SMP Terbuka adalah Pemerintah. Kegiatan Pembelajaran SMP Terbuka dilaksanakan sebagai berikut:

1) Siswa belajar mandiri atau berkelompok sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam satu minggu yang dibimbing oleh guru pamong di Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
2) Siswa belajar secara tatap muka di kelas pada Sekolah induk sekurang-kurangnya 12 jam pelajaran dalam satu minggu yang dibimbing oleh Guru bina

Siswa SMP Terbuka adalah warga negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Usia Maksimal 18 tahun
- Berijazah dan mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar

Siswa SMP Terbuka dapat pindah ke SMP Lainnya dan sebaliknya tenaga kependidikan meliputi kepala Sekolah, guru Bina, guru pamong, dan tenaga kependidikan kepala Sekolah dari SMP Terbuka adalah kepala Sekolah Induk yakni Drs. Sudiyono.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Guru bina adalah guru pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di SMP Terbuka sesuai mata pelajaran yang ditentukan. Guru pamong adalah pembimbing belajar mandiri siswa yaitu Anggota masyarakat yang peduli akan pendidikan. Dengan ketentuan pendidikan minimal SMA, dan berada pada lingkungan sekitar Tempat Kegiatan Belajar. Tempat Kegiatan Belajar (TKB) adalah sebuah tempat yang memadai untuk sebuah kegiatan belajar secara kelompok.

Tempat Kegiatan Belajar SMP Terbuka Margasari bertempat di SMP N 1 Margasari. Sekolah Induk adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah memenuhi sarat sebagai sekolah induk dalam hal ini adalah SMPN 1 Margasari Pembelajaran dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at pukul 13.30-17.30 bertempat di SMPN 1 Margasari pukul 13.30 – 17.30 WIB. Siswa SMP Terbuka sepenuhnya dibebaskan dari pungutan apapun. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional SMP Terbuka sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah. Modul adalah buku teks atau buku pegangan siswa, dalam kegiatan belajar mandiri.

Siswa SMP Terbuka diperuntukkan bagi anggota masyarakat usia sekolah tertutama bagi mereka yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan reguler (sekolah umum), baik karena kemampuan ekonomi, jarak tempuh, waktu dan lain-lain.

UPTD Dikpora Kecamatan Margasari melalui Penilik PLS Agus Warnoto telah melakukan komunikasi dan sosialisai dalam upaya menekan tingginya anak putus sekolah dengan mengoptimalkan bidang pendidikan non formal. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Program yang diselenggarakan dalam Pendidikan Non Formal (PNF) diantaranya Program Kesetaraan Pendidikan Dasar Luar Sekolah yaitu Program Kejar Paket B setara SLTP. Tujuan Program Kejar Paket B adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga belajar, setara pengetahuan, ketrampilan dan sikap pendidikan dasar 9 tahun atau pendidikan setara SLTP.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Setia Bhakti Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang beralamat Jl. Raya Utara KM.01 Margasari-Tegal sebelah utara kantor UPTD Dikpora Kecamatan Margasari yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan daerah setempat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu ujung tombak pengembangan program PLSP ditingkat lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sini diharapkan pengelola PKBM mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dalam melayani dan mengembangkan program pemberdayaan di masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan. PKBM hendaknya menjadi pemicu dan penyulut motivasi dan kreasi masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Para implementor memiliki kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan dengan cukup bagus sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya kami di Dikpora, Penilik Luar Sekolah (PLS), Pengawas TKSD, Kepala SD, di Kecamatan melalui rapat Kepala Desa dan dinas-dinas terkait.

Apa yang yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, .jika penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.

2. Sumber daya.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Kasubdit Program pada Direktorat Pembinaan SMP Kementrian Pendidikan Nasional yang diwakili Hadiyanto mengatakan: Mengenai implementor ada pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Nomor 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Percepataan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara diantaranya berisi Organisasi dan Tata Kerja GNP-PWB-PBA. Tim koordinasi GNP-PWB/PBA: Tim Koordinasi Nasional (TKN) yang dibentuk oleh Menko Kesra, berkedudukan di Departemen Pendidikan Nasional, yang terdiri dari: Menko Kesra sebagai ketua, Mendiknas sebagai ketua harian, dan pimpinan instansi lain yang terkait sebagai anggota.

Pembiayaan dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan GNP-PWB tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tanggal 18 September 2006 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA), yaitu:

a. Pembiayaan untuk pelaksanaan GNP-PWB/PWB bersumber dari:
    1) Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
    2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) propinsi;
    3) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
    4) Sumber lain yang tidak mengikat.
b. Sumber pendanaan tersebut diupayakan dengan proporsi sebagai berikut:
    1) APBN Pusat; antara 50%-60%
    2) APBD Provinsi; antara 20%-30
    3) ABPD Kabupaten/Kota; antara 20%-30%
c. Prosedur tentang pengajuan dana, pencairan dana, rincian penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana, mengacu pada peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk sumber daya manusia yaitu ketersediaan tenaga pendidik/guru SMP/MTs di Kecamatan Margasari berjumlah 266 orang yang terdistribusikan di sepuluh SMP/MTs, sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 4.7 Banyaknya Sekolah, Guru dan Siswa SMP/MTs

Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Murid Terhadap		
				Sekolah	R.Belajar	Guru
10	148	266	5.415	10	36.58	20.35

Sumber : diambil dari 10 sekolah SMP/MTs di Kecamatan Margasari

Tenaga pendidik/guru berdasarkan data yang diperoleh telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan umumnya kualifikasi akademik melalui pendidikan formal. Dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing telah dilakukan upaya agar tenaga pendidik memiliki kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Adapun sumber daya manusia program Kejar Paket B setara SMP meliputi tenaga Tutor, Nara Sumber Teknis (NST), dan Pengelola program. Tutor ada dua kelompok yaitu: Tutor mata pelajaran dan Tutor Ketrampilan. Berdasarkan Data Tutor/Pendidik pendidikan kesetaraan program Kejar Paket B di Kecamatan Margasari Laki-laki 5 orang dan perempuan 2 orang jumlah 7 orang semuanya berpendidikan S1. Data tersebut diambil dari Rangkuman Data Pendidikan Nonformal Kabupaten Tegal TahunPendataan 2010.

Mengenai apakah sumber daya manusia (SDM) pelaksana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan Margasari secara kualitas memadai?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kepala UPTD Dikpora mengatakan:

Belum, kelemaahannya: 1. Dari sisi tenaga tutor kadang- kadang sulit mencari. 2. Jangankan secara kualitas, kuantitaspun masih belum banyak diharapkan, karena kantong-kantong drop out itu kadang-kadang banyak alasan yang klasik yaitu faktor sosial ekonomi, contoh di Desa Jatilaba, kami kondisikan Paket B, tapi respon mereka mengatakan sekolah Paket B itu sekolah apa?

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP Terbuka Margasari terdiri dari 5 guru Pamong, 9 guru Bina, dan 3 tenaga kependidikan.

Guru pamong adalah pembimbing belajar mandiri siswa yaitu Anggota masyarakat yang peduli akan pendidikan. Dengan ketentuan pendidikan minimal SMA, dan berada pada lingkungan sekitar Tempat Kegiatan Belajar. Guru Bina adalah guru yang mempunyai keahlian mata pelajaran tertentu, yang bertugas melakukan proses perbaikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Guru bina adalah guru pada sekolah induk (SMPN 1 Margasari) yang diberi tugas untuk mengajar di SMP Terbuka sesuai mata pelajaran yang ditentukan.

Mengenai ketersediaan dana, berapa dana yang dialokasikan, prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi kebijakan. Faktor dana atau keuangan juga berperan penting dalam implementasi kebijakan. Faktor dana berfungsi untuk mendukung kegiatan operasinanilasi, seperti untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari mengatakan:

Kurang mengetahui tentang dana yang dialokasikan untuk program/kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Yang jelas tentang kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ditopang oleh pemerintah melalui dana BOS regular, BOS pendamping, BOS buku dan Bea Siswa Miskin (BSM).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selanjutnya terkait dana Kejar Paket B Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari mengatakan: "Kalau kaitannya dana Paket B itu normatif artinya dana cukup, tutor ada honornya sarana ya ada, bahkan untuk siswa yang dapat seragam biru putih dan topi serta sepatu."

Solusi dan pola penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dalam hal biaya menurut paparan Kebijakan Pembinaan SMP dan Wajar Dikdas Kemendiknas, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kemndiknas, 2011 adalah: BOS, Beasiswa SMP Terbuka, Beasiswa Siswa Miskin

Mengenai siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa, atas pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari mengatakan: "Tanggung jawab secara struktural UPTD Dikpora dan Muspika, sedangkan secara kolektif semua unsur masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Margasari."

Sementara upaya pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran telah dilakukan dengan meberikan informasi dan tanggung jawab moral kepada semua jajaran kami dan arahan pentingnya pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer untuk mengentaskan dan memberi masukan-masukan agar dalam peningkatan sumber daya manusia untuk mengantaskan derajat pendidikan di Margasari. Mengenai sumber daya sarana prasarana untuk SMP Terbuka tidak ada masalah, karena apa yang ada di SMP induk dimanfaatkan juga oleh SMP Terbuka.

Tentang sarana dan prsarana Kejar Paket B belum memadai terutama media pembelajaran seperti Laboratorium, di Kejar Paket B laboratorium tidak ada,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembelajarannya lebih bersifat teori semua. Tempat belajar berlangsung di SDN Margasari 01.

Sumber daya manusia dalam hal ini tenga pendidik (guru, guru bina, guru pamong dan tutor), tenaga kependidikan termasuk mereka yang ada di UPTD Dikpora Kecamatan Margasari maupun di Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dirasa cukup baik kualitas maupun kuantitas sebagai implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Demikian juga sumber daya finansial adalah kecukupan biaya investasi, biaya operasional , bantuan biaya pendidikan dan beasiswa akan menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan temuan di atas, mengenai sumber daya manusia walaupun dirasa cukup baik kualitas maupun kuantitas, tapi bila terbentuk TKC yang berarti melibatkan sumber daya manusia seperti Camat, Mantri Statistik, KUA, lembaga/organisasi masyarakat dan keagamaan di tingkat kecamatan, juga TKD di 13 (tiga belas) desa yang berarti melibatkan sumber daya manusia seperti Kepala Desa, para unsur-unsur tenaga kependidikan, pamong desa, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keagamaaan di tingkat desa. Apalagi Direktorat Pembinaan SMP telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk KKN Wajib Belajar, Program Sarjana dan Pemuda Penggerak Wajib Belajar, dan Program Dharma Wanita Persatuan Penggerak Wajib Belajar, yang berarti banyak komponen masyarakat yang terlibat secara aktif dan bersinergi dalam kegiatan penuntasan wajib belajar, seperti pendataan, pemetaan, penyuluhan, sosialisasi, asistensi, fasilitasi, dan sebagainya. Bila hal itu terwujud, maka sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana akan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terbantu. Sebab banyak komponen masyarakat yang akan peduli dan komitmen terhadap kebijakan wajib belajar. Jika demikian tentu akan menaikkan APK dan menurunkan APS.

3. Disposisi.

Disposi merupakan karakter dan watak pelaksana yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan tingkat demokratis. Tentang komitmen .dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guidline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan gideline semakin tinggi komitmennya.

Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi juga terkait dengan respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Terkait dengan respon implementor, maka diperlukan adanya dukungan dari pelaksana kebijakan, agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik. Ternyata Kepala UPTD Dikpora mendukung terhadap pelaksanakan kebijaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan alasan agar anak usia sekolah dalam target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun jangan sampai gagal warga negara terentas sampai pendidikannya, dukungan kami diantaranya memperbaiki sistem walaupun disini adalah Camat diharpakan Camat harus

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membangun garis koordinasi dengan baik, sementara untuk tenaga pendidik di SMP/MTs telah memenuhi kualifikasi sesuai ijasah yang telah dimiliki, artinya mata pelajaran bahasa Inggris telah diampu oleh guru/pendidik yang berijasah Bahasa Inggris, itu misalkan. Demikian juga yang ada pada Kejar Paket B maupun SMP Terbuka, tutor atau guru bina berijasah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berpedoman pada kurikulum yang berlaku (KTSP).

Tingkat demokratis dapat diukur dengan intesitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan *guidline* guna mencapai tujuan dan sasaran program.

Untuk SMP/MTs pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara umum normatif sesuai aturan yang berlaku. Sedang untuk SMP terbuka ada diskresi terutama tentang hari efektif masuk sekolah yang dalam seminggunya hanya berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Juga waktu tatap muka perjam pelajarannya hanya 30 menit. Dan lebih banyak memanjakan siswanya. Sedang untuk Program Kejar Paket B waktu belajar 4 kali seminggu, 10-11 jam pelajaran/hari. Jam belajar ditentukan bersama antara tutor dan Warga Belajar. Realisasi pembelajaran dilaksanakan dengan tutorial setiap hari Senin, Rabu dan Jum'at pukul 13.30-17.30 bertempat di SDN Margasari 01.

Agar efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(diharapkan). Disposisi atau sikap yang dimiliki implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.

Cara implementasi melatih kebijaksanaanya tergantung pada bagian besar atas diposisinya ke arah kebijakan. Sikapnya, akan dipengaruhi oleh cara dia memandang kearah kebijakan perseorangan dan bagaimana mereka melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan kepentingan personel. Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi atau kerja dilingkungan disposisi implementor atau mencoba mengurangi kebijaksaan implementor.

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan instrumen yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan pola hubungan koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi. Aspek yang terkait dengan struktur birokrasi diantaranya mekanisme dan struktur organisasi. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya sudah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* kebijakan.

Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). Fungsi SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Jika sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam struktur Birokrasi. Suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerja sama (*cooperation*) banyak orang.

Mengenai prosedur operasi yang standar telah tersedia berupa Panduan Penyelengaraan Pendataan Dan Pemetaan Dalam Rangka Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama - Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah - Kementerian Pendidikan Nasional. SOP dalam hal ini Buku Panduan Pelaksanaan diterbitkan agar program dan/atau kegiatan teresebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Dengan buku panduan tersebut diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sempai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Pendataan dan pemetaan sekolah yang mencakup SD/MI dan SMP/MTs/pendidikan yang sederajat serta penduduk usia pendidikan dasar yang sudah maupun yang belum bersekolah merupakan langkah yang mutlak yang harus ditempuh. Pendataan ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi pada lingkup Kecamatan Margasari. Pemetaan ditujukan untuk mendapatkan gambaran peta gugus pendidikan dasar di tingkat kecamatan.

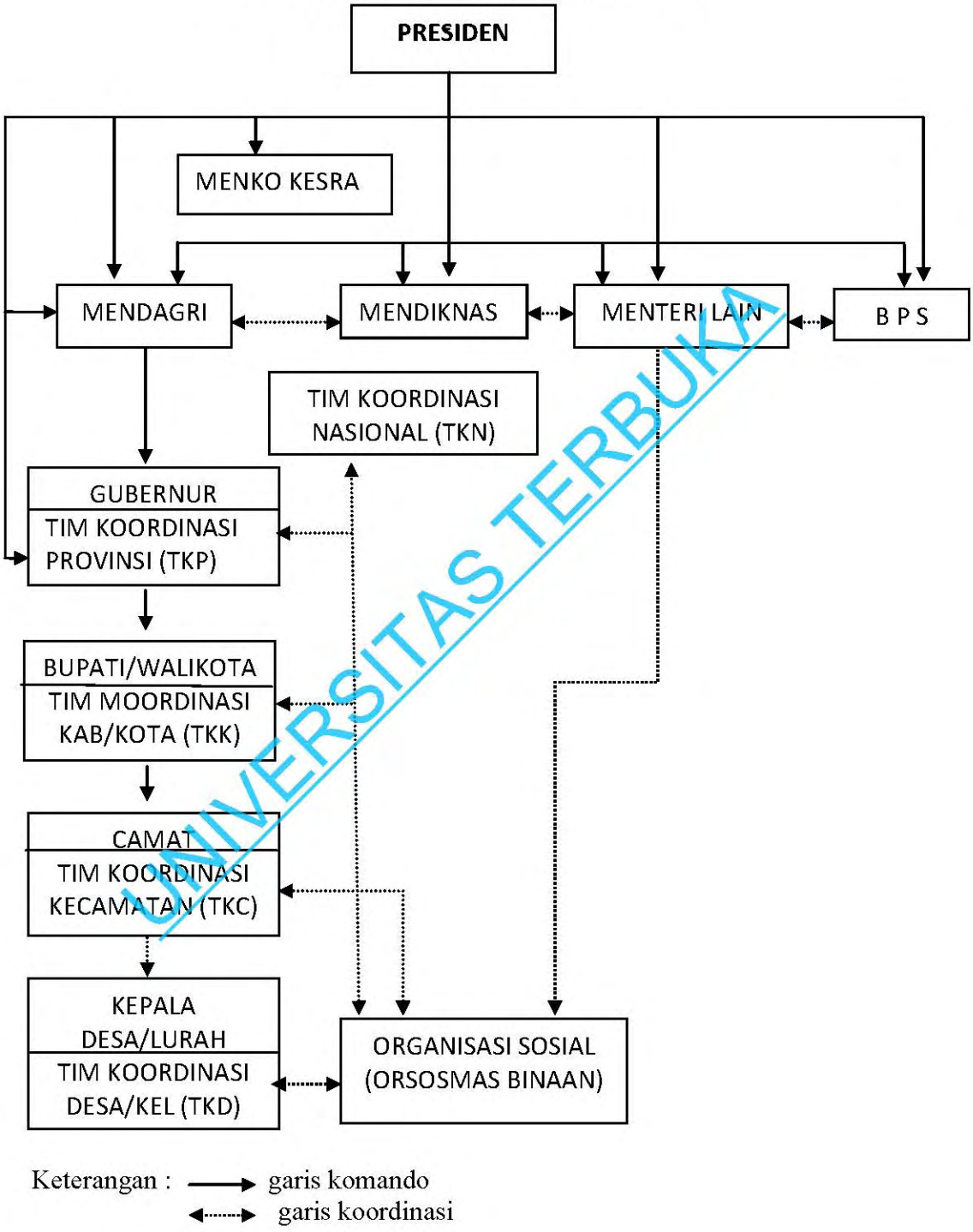
Juga Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tanggal 18 September 2006 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang diantaranya berisi Struktur Organisasi GNP-PWB/PBA berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI GNP-PWB/PBA



Bagan 4.1 Struktur Organisasi GNP-PWB/PBA
Sumber : Diadopsi dari Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2006

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) yang dibentuk oleh Camat, berkedudukan di kantor kecamatan, yang terdiri dari: Camat sebagai ketua, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai ketua harian, dan para tenaga kependidikan (jalur formal dan nonformal), Mantri Statistik, Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga/organisasi masyarakat dan keagamaan di tingkat kecamatan sebagai anggota.

Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Wajar Dikdas dan buta aksara per desa/kelurahan;
2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA yang dilakukan di setiap desa/kelurahan;
3) menunjuk dan/atau mengusulkan lembaga atau organisasi masyarakat serta tenaga kependidikan sebagai penyelenggara atau pengelola program;
4) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan GNP-PWB/PBA yang dilaksanakan baik oleh lembaga atau organisasi masyarakat di seluruh desa/kelurahan;
5) melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha dalam mendukung GNP- PWB/PBA di seluruh desa/kelurahan;
6) memantau dan menghimpun laporan tentang proses dan hasil penyelenggaraan program secara periodik dari penyelenggara atau pengelola pada setia desa/kelurahan;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7) melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Bupati/Walikota setiap akhir bulan Mei.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKC dapat membentuk sekretariat TKC yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait di kecamatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari di seluruh desa/kelurahan di wilayahnya.

Tim Koordinasi Desa/Kelurahan (TKD) yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa, berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan, yang terdiri dari : Kepala Desa/Lurah sebagai ketua, dan para unsur-unsur tenaga kependidikan (jalur formal dan nonformal), pamong desa, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di tingkat desa/kelurahan sebagai anggota.

Tim Koordinasi Desa/Kelurahan (TKD) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Melakukan pendataan secara periodik pada setiap bulan:
   a) Anak usia 7-12 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah di SD/MI/pendidikan yang setara;
   b) Anak usia 13-18 tahun yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara tetapi belum mengikuti pendidikan tingkat SMP/MTs atau putus sekolah SMP/MTs/pendidikan yang setara;
   c) Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas;
2) Melakukan sosialisasi pentingnya wajib belajar dikdas 9 tahun dan melek aksara bagi setiap anggota masyarakat;
3) Mengkoordinasikan dan membantu lembaga atau organisasi masyarakat sebagai penyelenggara atau pengelola program;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Mendaftar anak-anak usia 7-15 tahun yang belum sekolah dan mewajibkan orangtuanya untuk mengirimkan mereka ke sekolah atau lembaga PNF kesetaraan dalam rangka mendukung Wajar Dikdas 9 tahun;
5) Mendaftar penduduk usia 15 tahun ke atas dari setiap keluarga yang masih buta aksara dan mewajibkan mereka mengikuti pendidikan keaksaraan;
6) Melakukan pemantauan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan ke setiap kelompok belajar secara periodik;
7) Menghimpun laporan proses dan hasil penyelanggaraan program GNP-PWB/PBA dari setiap RT/RW secara periodik setiap bulan;
8) Melaporkan pelaksanaan GNP-PWB/PBA kepada Camat dan Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, TKD dapat membentuk sekretariat TKD yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instanisi terkait di desa/kelurahan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan GNP-PWB/PBA sehari-hari baik oleh sekolah maupun kelompok belajar. Tapi penulis tidak mendapatkan adanya TKC maupun TKD di Kecamatan Margasari seperti yang tertuang dari Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2006.

Terkait dengan TKC, Peneliti bertanya kepada Camat margasari, bagaimana dengan Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) dalam struktur organisasi GNP-PWB? Beliau menjawab: TKC lebih detail ada di Dikpora. Coba Tanya pada staf yang menangani. Peneliti atas ijin Camat mencari di staf kecamatan, ternyata tidak ditemukan tentang TKC.

Berdasarkan temuan tersebut berarti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tanggal 18 September 2006 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara.(GNP-PWB/PBA), khususnya tentang struktur organisasi GNP-PWB tidak dilaksanakan di Kecamatan Margasari, apalagi di tingkat desa. Terkait TKC menurut Wartono Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari tidak tahu masalah TKC, mestinya Camat yang lebih tahu, dengan alasan waktu itu belum menjabat. Selanjutnya penulis bertanya tentang TKC apakah sudah dibentuk atau belum kepada Waudin mantan kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari tahun 2006 beliau menjawab belum. Hal itu diperkuat oleh Kepala Desa Margasari bahwa tidak pernah atau tidak tahu tentang TKD. Selanjutnya Waudin menyatakan belum dibentuknya TKC dikarenakan tugas percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar melekat pada tugas Kepala UPT Dikpora Kecamatan beserta jajarannya seperti Penilik PLS yang antara lain tugasnya menangani Kejar Paket B.

Elu (2009:1.28) menyatakan: "Struktur organisasi yaitu suatu bangunan pembagian kerja yang terdiri dari unit yang terspesialisasi, mekanisme koordinasi, komunikasi, pertanggungjawaban dalam melaksanakan strategi organisasi." Hal itu berarti struktur organisasi merupakan alat untuk mengkoordinasikan pekerjaan, sehingga tujuan dapat dicapai dengan efektif.

Gibson, Ivancevich & Donnelly (1985:15) mengemukakan:

> Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, para manajer harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur. Dengan memandang suatu bagan organisasi, sesorang hanya melihat suatu sususan posisi, tugas-tugas pekerjaan dan garis wewenang dari bagian-bagian organisasi. Akan tetapi, struktur organisasi lebih rumit daripada yang digambarkan dalam bagan itu.

Struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan di antara subunit dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan pola formal tentang cara pengelompokkan orang dan pekerjaan dalam suatu organisasi. John A. Pearce II

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

and Fred R. David dalam Gibson, Ivancevich & Donnelly (1985:9) mengemukakan: "Struktur juga memepengaruhi perilaku dan fungsi kelompok dalam organisasi." Struktur organisasi terdiri dari hubungan pekerjaan dan kelompok pekerjaan yang relatif tetap dan stabil. Struktur organisasi seringkali diilustrasikan dengan suatu bagan organisasi. Tujuan utama struktur organisasi ialah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga mencapai prestasi yang efektif.

Tidak adanya TKC maupun TKD sebagai wujud variabel struktur birokrasi berarti tugas dan fungsi TKC maupun TKD tidak dapat dilakukan. Salah satu tugas dan fungsi TKD adalah melakukan pendataan secara periodik. Memang pendataan telah dilakukan oleh UPTD Dikpora Kecamatan Margasari seprti yang tergambar dalam rekapitulasi jumlah peserta didik baru Kelas I, jumlah lulusan SD yang melanjutkan SMP/MTs/PONPES. (lihat Lampiran 3 dan 4) dan data kepegawaian dan keadaan murid SMP/MTs sekecamatan Margasari tahun pelajaran 2009/2010. Tapi hasil pendataan itu belum lengkap sesuai dengan kondisi riil, karena kesulitan komunikasi dan koordanasi.

Sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk keperluan pengukuran dan penilaian tingkat keberhasilan pada setiap tahapan, perlu diketahui kondisi riil yang aktual. Untuk itu langkah yang mutlak harus ditempuh adalah melakukan pendataan dan pemetaan sekolah mencakup SD/MI dan SMP/MTs/pendidikan yang sederajat serta penduduk usia pendidikan dasar yang sudah atau yang belum sekolah.

Tujuan pendataan untuk mendapatkan data dan informasi pada lingkup daerah tertentu (desa, gugus dikdas, dan kecamatan) tentang:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

b. Jumlah SMP/MTs dan persebarannya.

c. Jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya dan yang berumur 13-15 tahun.

d. APK, angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka kelulusan.

e. Rasio guru-siswa, rasio rombongan belajar-siswa, rasio laboratorium-rombongan belajar, guru yang layak, kelas yang rusak.

f. Penduduk usia 13-15 tahun yang belum pernah sekolah atau putus sekolah SD/MI/pendidikan yang sederajat beserta alasan dan persebaraanya.

g. Penduduk usia 13-15 tahun yang sudah tamat SD/MI/pendidikan yang sederajat tetapi tidak sekolah atau putus sekolah SMP/MTs/pendidikan yang sederajat beserta alasan dan persebaraanya.

h. Kapasitas daya tamping yang tersedia pada satuan pendidikan dasar (SMP/MTs) yang ada.

Tujuan pemetaan untuk mendapatkan gambaran tentang:

a. Peta gugus pendidikan dasar yang memuat persebaran SMP/MTs dalam darah jangkauan dilengkapi dengan data nama sekolah, data siswa,angka mengulang, APS, angka kelulusan, data guru yang layak, data kelas, data rombongan belajar, data ruang lab., data penduduk usia pendidikan dasar, dan katagori sekolah dilihat dari tingkat pelayanan, serta peta penduduk usia pendidikan dasar yang tida bersekolah lengkap dengan alas an dan persebarannya.

b. Pada tingkat kecamatan yang merupakan penggabungan dari hasil pemetaan tingkat gugus, dan menggambarkan urutan atau peringkat penuntasan wajib belajar berdasar APK yang dicapai tiap gugus dilengkapi dengan data indicator

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang lain, serta penduduk usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah dengan alas an dan persebaraanya.

Tidak adanya TKC maupun TKD sebagai wujud variabel struktur birokrasi akan mempengaruhi variabel lainnya yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi dalam mencapai tujuan kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun di Kecamatan Margasari.

C. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2008 dengan melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, tapi terdapat sejumlah masalah. Sidi (2001:91-92) mengatakan:

> Terdapat sejumlah masalah pelaksanaan wajib belajar, disamping masalah krisis ekonomi. Masalah –masalah tersebut meliputi:
> a. Kurangnya daya tampung siswa SLTP, khususnya didaerah pedesaan, daerah terpencil, daerah pedalaman, dan daerah perbatasan.
> b. Tingginya angka putus sekolah tingkat SD+MI (919 ribu orang tahun 1998) dan tingkat SLTP+MTs (643 ribu orang).
> c. Rendahnya mutu pendidikan dasar yang diukur berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM) sebagai salah satu indicator mutu pendidikan.
> d. Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
> e. Kordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, dan kecamatan) belum berjalan secara efektif.

Panduan Pelaksanaan Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Yang Bermutu Melalui KKN Wajib Belajar Dan SAP2WB (2010:7) menyatakan Lokasi KKN Wajib Belajar adalah Kabupaten yang APK SMP/MTs/sederajat masih di bawah 95% dan dipilih kecamatan yang APK-nya rendah tetapi angka absolutnya (usia13-15 tahun yang belum masuk SMP/MTs/sederajat) tinggi, terutama pada lokasi yang memiliki karakteristik tertentu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.8 Karakteristik Lokasi KKN Wajib Belajar Tahun 2010

No	Karakteristik Lokasi
1	Masyarakat pada lokasi yang secara geografis atau geologis menyebabkan anak yang berusia 13-15 tahuntidak dapat mengikuti program Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.
2	Masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga anak mereka yang berusia 13-15 tahun tidak mengikuti program Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.
3	Masyarakat yang patuh dan hormat terhadap tradisi yang melemahkan keinginan anak usia 13-15 tahun untuk mengikuti program Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.
4	Masyarakat berpendidikan rendah sehingga anak berusia 13-15 tahun tidak mengikuti program Wajar Dikdas Sembilan tahun yang bermutu.
5	Masyarakat yang tertimpa bencana alam atau konflik sehingga anak usia 13-15 tahun tidak mengikuti Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.
6	Masyarakat yang mengalami depresi budaya yang karena malas belajar maka anak usia 13-15 tahun tidak mengikuti program Wajar Dikdas Sembilan tahun yang bermutu.
7	Masyarakat kawasan industri atau perkebunan yang kurang tertarik mengikuti pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat

Paparan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal di Adiwerna tanggal 22 Januari 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Tegal vs Program Pokok Pendidikan menyebutkan kendala Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Tegal ialah: 1) Ekonomi, 2) Daya tampung, 3) Geografis 4) Budaya, 5) Alasan khusus.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Waudin (2011, 2 Februari) dalam *Suara Merdeka* menyatakan bahwa:

> Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Tegal dinilai bukan kesalahan pemerintah dan sekolah. Angka putus sekolah hingga tahun ini (2011) yang mencapai 2000 anak lebih dinilai karena faktor ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Orang tua siswa masih keberatan untuk biaya pendidikan sehari-hari. Juga dipengaruhi minat anak untuk melanjutkan sekolah. Mereka lebih memilih langsung terjun di dunia kerja (hal.C).

Tajuk rencana (2011, 7 Mei). Mayoritas Pekerja Lulusan SD dalam *Suara Merdeka*, dikemukakan:

UNIVERSITAS TERBUKA

> Meningkatnya jumlah pekerja lulusan SD dilatarbelakangi oleh banyak kemungkinan. Faktor satu berkaitan dengan faktor lain. Ada dugaan, terjadi kemiskinan yang meluas, sehingga mengharuskan para orang tua memaksa anak-anaknya berhenti sekolah, dan memasuki dunia kerja. Dugaan lain, pendidikan tidak mampu menciptakan daya tarik sekaligus memunculkan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Lulusan SD dibandingkan SMP atau SMA relatif tidak ada bedanya. Jika masuk ke lapangan kerja, lulusan SD, SMP ataupun SMA berada di satu level dengan pangkat yang rendah. Jika tidak ada bedanya dalam "kelas" pekerja, untuk apa harus susah payah menghabiskan waktu sampai lulus SMA. Sebab lain, tingginya biaya sekolah, meski ada slogan gratis tetapi faktanya tidak demikian. Aneka kebutuhan sekolah bukan hanya membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). Apalagi jika di sekolah ternyata anak-anak menemukan keadaan yang "menjemukan" yang terekspresi dalam banyak bentuk (hal.6).

Apa yang dikemukakan di atas merupakan masalah-masalah yang menjadi kendala. Oleh karena itu, kebijakan, strategi dan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, hendaknya lebih memperhatikan faktor-faktor berilkut:

1. Faktor Sosial budaya

Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa persepsi atau pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan. Peserta didik selalu melakukan kontak dengan masyarakat. Pengaruh-pengaruh budaya yang negatif dan salah terhadap dunia pendidikan akan turut berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Peserta didik yang bergaul dengan teman-temannya yang tidak sekolah atau putus sekolah akan terpengaruh dengan mereka.

Buku Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007 (2007:82-83) menyebutkan:

> Prof. Slamet mengatakan banyak hambatan budaya terkait dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan, misalnya di sebagian masyarakat anak-anak wanita cenderung dinikahkan dalam usia sangat muda. Setelah lulus SD, mereka tidak merasa perlu melanjutkan ke SMP karena langsung dinikahkan oleh orang tuanya. Di banyak pedesaan masih bisa dijumpai anak-anak petani tidak masuk atau bahkan berhenti sekolah karena diminta orang tuanya membantu ke sawah. Masih terkait dengan hambatan budaya, Ramijo pernah bertemu anak-anak pemetik daun teh. Ia bertanya kepada orang tuanya mengapa tidak disekolahkan ke SMP. Mereka bilang, dengan bekerja memetik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> kebun the anak-anak tersebut mendapat bayaran yang besarnya bukan didasarkan pada tingkat pendidikannya, tetapi hasil petikannya. Mereka bahkan berpendapat, memasukkan anaknya ke sekolah sama saja dengan membuang uang, sementara kalau bekerja di kebun teh mendapat uang. Prof. Slamet menambahkan, masyarakat yang mengalami hambatan budaya dan kemiskinan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tidak bisa mengubah dirinya sendiri.

Di sebagian kelompok masyarakat, Waudin mengatakan: Masih ada anggapan masyarakat yang menyatakan sing penting wong urip bisa maca tulis cukup. (yang penting orang hidup dapat membaca dan menulis itu cukup). Wahyudin mengatakan: "Masih adanya pomeo "sekolah buat apa, toh nantinya di dapur kemudian mau menjadi apa?" Budaya itu harus dikikis, terhadap masyarakat yang demikian perlu diberikan pengertian tentang betapa arti pentingnya pendidikan.

Faktor lingkungan keluarga, karena pengaruh teman sebaya yang tidak bersekolah dalam lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian masyarakat Margasari di beberapa desa anak-anak usia SMP banyak ikut mbahnya (nenek atau kakeknya) karena orang tuanya bercerai, orang tua mencari kehidupanya di daerah transmigrasi, orang tuanya menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI), ada juga anak perempuan yang bekerja di Jakarta mengikuti jejak anak perempuan tetangganya yang sukses bekerja di Jakarta, ada juga karena lingkungan teman-temannya yang tidak sekolah. misalnya di desa Kalisalak banyak anak disuruh orang tuanya menggembala sapi dan orang tua berpendidikan rendah yang menyebabkan kesadaran akan pendidikan rendah. Itulah kondisi riil yang peneliti temukan dan ditambah pernyataan-pernyataan di bawah ini:

a. Teguh Setiaadi Guru BK pada SMPN 1 Margasari mengatakan:

> Penyebab anak putus sekolah karena pengaruh teman- sebaya yang tidak bersekolah dalam lingkungan tempat tinggalnya. Bermula dari sering tidak masuk, dan ahirnya putus sekolah atau *drop out*. Juga pengaruh orang tua

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang bercerai, anak terlantar ikut nenek dan dengan kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua menyebabkan anak putus sekolah.

b. Sukadarini Guru BK pada SMP Bakti Praja mengatakan:

"Anak putus sekolah ada 22 anak dalam periode 3 tahun, siswa keluar karena kerena lingkungan dimana teman-temannya tidak sekolah, dan orang tuanya broken home."

c. Endang Marhaeni Guru BK SMPN 2 Margasari mengatakan:

Mengapa banyak anak putus sekolah hal itu dikarenakan rata–rata disebabkan oleh faktor intern (anak sendiri) dan faktor ekstern (lingkungan keluarga), rata-rata anak disini dititipkan ke tetangga atau ke mbahnya sehingga anak kurang perhatian, tidak ada monitor orang tua, sehingga anak malas, BK panggil orang tua tapi yang datang saudaranya. BK home visit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, ternyata bukan masalah ekonomi. Adakan konferensi kasus yang hasilnya anak mengundurkan diri. Memindahkan ke sekolah lain harus tetap sekolah.

d. Marnadi Kasi Dikdas Dikpora Kab.Tegal mengatakan:

"Yang menjadi kendala wajar dikdas diantaranya: 1. Kesadaran orang tua yang belum semuanya menyekolahkan anaknya SD sampai dengan SMP. 2. Belum adanya aturan sangsi tegas yang mengikat setiap warga negara agar sekolah sampai dengan SMP."

Dari uraian di atas dapat dimaknai, masih adanya di sebagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa untuk memperoleh penghidupan tidak harus bersekolah, rendahnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan dan lingkungan sosial yang menjadi faktor yang mempengaruhi Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Oleh karena itu, perlu intervensi dari pemerintah, anatara lain berupa penyuluhan dan advokasi tentang arti pentingnya pendidikan, melakukan sosialisasi, pbulikasi, dan mobilisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pendidikan serta meningkatkan minat dan motivasi belajar anak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Faktor Ekonomi

Krisis ekonomi yang menghajar sejak akhir tahun1997, hanya sebagian dari sekian banyak faktor yang membuat program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berjalan tertatih-tatih. Hambatan ekonomi, yaitu tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007 (2007:80) menyebutkan "Faktor ekonomi ini merupakan hambatan paling serius dalam program wajib belajar," kata Hamid Muhammad.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994, direncanakan tuntas pada akhir tahun 2003/2004 yaitu tepat akan mulai berlakunya perdagangan bebas tingkat Asia Tenggara. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia lebih siap menghadapi dan memasuki pasar global. Rencana penuntasan wajib belajar ini nampaknya tidak akan tercapai sesuai target waktu sebagai akibat multi krisis yang melanda Tanah Air. Akibat krisis ekonomi itu jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Menurut Hasanuddin dalam Bentri (2008:1) menyatakan bahwa: "Dampak krisis ekonomi tersebut para orang tua murid banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar dan atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama."

Target waktu penuntasan setidaknya diperpanjang minimal tiga tahun, sehingga Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun seharusnya dapat dituntaskan paling lambat akhir tahun 2008 dengan melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Berdasarkan Tabel 4.4 pada halaman 50 berikut diketahui bahwa jumlah total mata pencaharian Kecamatan Margasari pada tahun 2009 yang bekerja sebesar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

49.040. Kemudian, mata pencarian penduduk yang tertinggi ialah buruh tani sebesar 20253 orang (41.29 %), merekalah yang tentu mengalami kesulitan ekonomi dan merupakan kelompok masyarakat yang terkungkung dalam kemiskinan.

Di bawah ini disajikan petikan wawancara dengan nara sumber tentang faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

a. Suherman Kepala SDN Jatilaba 01, mantan Kepala SDN Margaayu, mantan Kepala SDN Kalisalak, mantan Kepala SDN Prupuk Utara mengatakan:

> Ada beberapa faktor penyebab anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP yaitu: masalah ekonomi orang tua, utamanya ekonomi; rata-rata anak-anak Jatilaba di rumah dengan mbahnya (nenek atau kakeknya); mereka rata-rata anak seorang janda. Di Desa Margaayu faktor penyebab anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP ialah orang tua yang mencari penghidupan di daerah trasmigrasi, orang tua yang menjadi Tenaga Kerja di Luar negeri (TKI) dan anaknya ikut neneknya, juga faktor transportasi yang menjadi beban berat karena harus menyediakan ongkos setiap harinya. Di Desa Kalisalak faktor penyebabnya adalah banyak anak disuruh orang tuanya mengembala sapi. Di desa Prupuk Utara banyak anak tidak sekolah SLTP dikarenakan ikut menjadi pedagang asongan di Kereta Api dan di Panorama tempat pemberhentian Bis.

b. Parwiti Guru Kelas VI SDN Jatilaba 01 mengatakan: "Sebab lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP rendahnya kemampuan untuk membiayai kebutuhan penunjang seperti ongkos transportasi dan uang saku, kemudian bagi anak puteri lebih memilih bekerja untuk membantu orang tua, seperti tetangganya yang bekerja di Jakarta."

c. Setiya Guru Kelas VI SDN Prupuk Selatan 04 mengatakan:

> Ada 7 anak yang tidak melanjutkan ke SLTP. Mengapa lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP menurut analisa kami faktor utama yang mereka sampaikan, kebanyakan dikarenakan alasan ekonomi walaupun bahwa SLTP pendidikan dasar yang bebas dari biaya, tetapi menurut mereka pendidikan tetap memerlukan biaya, mereka merasa tidak mampu, mereka tidak melanjutkan, mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja untuk membantu orang tua. Bukan mereka mau tidak mau pinter. Padahal melihat nilai mereka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

nilainya di atas rata-rata, mereka bisa masuk di Sekolah Margasari, karena NEM/ UASBN anak-anak peringkat ke tiga se kecamatan.

d. Wahyudin Sekretaris Desa Jatilaba mengatakan:

Ada 4 SD di Desa Jatilaba, tapi banyak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP dan sangat memprihatinkan dikarenakan masyarakat berpenghasilan dari sektor pertanian yang tidak menetap/cukup, 75% masyarakatnya petani, tingkat kesadaran pendidikan rendah sebagai efek dari masyarakat yang berpenghasilan rendah, masih adanya pomeo "sekolah buat apa, toh nantinya di dapur kemudian mau jadi apa", faktor geografis yang jauh dari lokasi sekolah, bersekolah bukan masalah gratisnya tetapi masalah kebutuhan sehari-hari misalnya untuk transportasi asumsinya sehari Rp5000,- 30 hari sudah Rp 150.000,-, bagaimana untuk makan saja masih kurang."

e. Sujono Ymt. Kepala SDN Jatilaba 04 mengatakan: "Banyak lulusan SD Jatilaba tidak melnajutkan ke SLTP dikarenakan anak membantu orang tua, terutama anak perempuan bekerja di Jakarta, jauhnya tempat ke lokasi sekolah mereka tidak keberatan bayar sekolah tapi yang berat ongkos harian lima ribu rupiah."

f. Sukadarini Guru BK pada SMP Bakti Praja mengatakan: "Anak putus sekolah ada 22 anak dalam periode 3 tahun, siswa keluar karena berat ongkos hariannya."

Cukup banyak anak-anak kita yang tidak bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan pemerintah dalam program wajib belajar karena terpaksa membantu orang tuanya bekerja. Kesulitan ekonomi itu dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terkungkung dalam kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih serba kekurangan, apalagi kalau harus membiayai sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, maka penulis dapat menyampaikan bahwa kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat kecamatan Margasari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang terkungkung dalam kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Untuk membantu mengatasi persoalan ini, sejak tahun 2005 pemerintah menggulirkan bantuan operasioanl sekolah (BOS). Kementrian Pendidikan Nasional harus bekerja habis-habisan agar dapat menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya dan gratis total.

3. Faktor Politik

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah pusat hanya sebatas membuat regulasi dan standar-standar nasional.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007 (2007:83) menegaskan bahwa di era otonomi daerah pemerintah daerah memiliki peran besar dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Di bawah kendali pemerintah daerah, wajah pendidikan menjadi agak berbeda. Jika pemerintah daerah tersebut mempunyai kepedulian tinggi, maka pendidikannya akan maju. Sebaliknya mereka acuh tak acuh, maka program-program pendidikan, termasuk Wajib Belajar, bisa berjalan tersendat-sendat. Kalau Bupati atau Kepala Dinas Pendidikannya tidak punya kapasitas yang memadai, pasti jadi masalah.

Kunci keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Tanpa komitmen dari unsur-unsur itu, akan sangat sulit tercapai. Seperti Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kecamatan, Tim Koordinasi Desa dalam struktur Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, peneliti tidak menemukan. Hal itu tentu merupakan salah satu indikator kurang adanya komitmen terhadap implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Salah satu kunci keberhasilan meraih tuntas angka partisipasi kasar (APK) 95% adalah semakin mudahnya akses pendidikan. Di desa Jatilaba direncanakan pembentukan SD-SMP Satu Atap di SD Negeri Jatilaba 01 maupun pembangunan Unit Sekolah Baru yaitu SMP Negeri Margasari 04 di desa Jatilaba, namun mendapat protes dari beberapa pengelola pendidikan swasta (SMP/Mts swasta), mereka keberatan, karena merasa terancam kekurangan calon siswa dari desa tersebut. Waudin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal mengatakan:

> Semestinya sudah ada pagu atau plafon pendirian SMP Negeri, namun manakala ditanyakan kepada masyarakat ternyata tidak mendapat dukungan dari pengelola-pengelola pendidikan swasta, mereka keberatan, mendapat pertentangan dari lingkungan setempat. Tidak mungkin mendirikan Sekolah Negeri manakala mendapat pertentangan dari lingkungan masyarakat setempat, karena kami tidak mau mencari masalah. Selagi SMP/MTs masih dapat menampung, ya *no problem*.

Dari pihak pemerintah kabupaten melalui Dinas Dikpora telah memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, namun di sisi sebagain masyarakat yakni beberapa pengelola lembaga pendidikan swata menolak. Sehingga tanpa komitmen yang kuat dari unsur-unsur itu, akan sangat sulit dicapai.

Berdasarkan hasil temuan di atas, yakni adanya penolakan beberapa pengelola lembaga pendidikan terhadap rencana pendirian SD-SMP Satu Atap maupun pendirian Unit Sekolah Baru berupa SMP Negeri yang berlokasi di desa Jatilaba

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan faktor politis yang berpengaruh terhadap peningkatan APK, yang berarti berpengaruh terhadap program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

4. Faktor Geografis

Cukup banyak masyarakat kita yang tinggal di dukuh terpencil, terpencar, terisolir, tentu menurut ukuran Kecamatan Margasari sehingga sangat sulit dijangkau oleh berbagai model layanan pendidikan. Mereka yang tinggal di dukuh-dukuh seperti itu umumnya juga lekat dengan kemiskinan. Hambatan geografis terutama banyak dijumpai di desa Jatilaba, Danaraja, Kalisalak, dan Margaayu.

Untuk Desa Jatilaba Sujono Ymt.Kepala SDN Jatilaba 04 mengatakan:

> "Banyak lulusan SD Jatilaba tidak melnajutkan ke SLTP dikarenakan jauhnya tempat dari desa ke SMP yang membutuhkan transportasi, mereka membutuhkan ongkos untuk membayar transportasi, anak sekarang malas naik sepeda, anak-anak inginnya naik sepeda motor, naik colt, naik angkutan desa, mereka membutuhkan paling tidak Rp 5000,-, mereka tidak keberatan bayar sekolah tapi yang berat ongkos harian Rp.5000,- ."

Upaya yang dilakukan, Sujono mengusulkan kepada Kepala MTs Asy Syafiiyah Karangasem sekolah yang terdekat dengan desa Jatilaba, agar anak-anak dari Jatilaba ketika sekolah diantar jemput. Kepala MTs menyanggupinya dan telah berjalan. Tapi ketika hal itu berjalan ada laporan bahwa supir yang mengangkut anak-anak dengan gratis mendapat ancaman dari para supir angkutan desa yang tentunya merasa terkurangi penghasilannya, sehingga antar jemput berhenti.

Suherman Kepala SDN Jatilaba 01, mantan Kepala SDN Margaayu, mantan Kepala SDN Kalisalak, mantan Kepala SDN Prupuk Utara mengatakan: "Ada beberapa faktor penyebab anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP yaitu jauhnya tempat tinggal (Jatilaba) dengan SMP Negeri yang berlokasi di Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Margasari sekitar 5 KM; Di Margaayu faktor transportasi yang menjadi beban berat karena harus menyediakan ongkos setiap harinya."

Parwiti Guru Kelas VI SDN Jatilaba 01 mengatakan: "Sebab lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP rendahnya kemampuan untuk membiayai kebutuhan penunjang seperti ongkos transportasi."

Wahyudin Sekretaris Desa Jatilaba mengatakan:

> Ada 4 SD di Desa Jatilaba, tapi banyak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP dan sangat memprihatinkan dikarenakan secara geografis/lokasi cukup jauh dari lokasi sekolah SLTP, faktor geografis yang jauh dari lokasi sekolah, bersekolah bukan masalah gratisnya tetapi masalah kebutuhan sehari-hari misalnya untuk transportasi asumsinya sehari Rp5000,- 30 hari sudah Rp 150.000,-, bagaimana untuk makan saja masih kurang

Sukadarini Guru BK pada SMP Bakti Praja mengatakan: "Anak putus sekolah ada 22 anak dalam periode 3 tahun, siswa keluar karena berat ongkos hariannya, rumahnya jauh dari sekolah."

Dari uraian di atas faktor geografis, jauhnya tempat tinggal anak dengan lokasi sekolah, khususnya SMP Negeri, ditambah faktor ekonomi (kemiskinan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Salah satu cara untuk mengatasinya, sejak tahun 2004 pemerintah menggulirkan program pendidikan terpadu, atau SD-SMP Satu Atap. Model sekolah satu atap ini merupakan implementasi konsep *to reach the unreach* (menjangkau mereka yang tidak terjangkau) yang digulirkan UNESCO. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Dikpora juga telah berkomitmen untuk mendirikan Unit Sekolah Baru, tapi baik SD-SMP Satu Atap atau Unit Sekolah Baru mendapat penolakan dari beberapa pengelola pendidikan swasta.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Upaya Pemerintah Daerah, Sekolah dan Masyarakat

1. Upaya pemerintah daerah

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintah daerah adalah penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Menurut pendapat Wilson (1993) dalam Nurcholis (2007:287) "Lembaga yang menangani sektor publik terdiri atas tiga komponen: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD."

Penyediaan pendidikan merupakan fungsi yang harus diemban oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pendidikan Pemerintah Indonesia yaitu mewajibkan semua warga negara usia pendidikan dasar (7-15 tahun) tanpa memandang agama, status sosial, etnis, dan gender untuk menempuh minimal pendidikan dasar. Program ini selanjutnya disebut Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Yang Bermutu. Tujuan utama adalah menyediakan layanan pendidikan anak usia pendidikan dasar tanpa kecuali.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksaanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yaitu dengan terus melakukan komunisasi, sosialisasi, pencerahan kepada kelompok sasaran mengenai hak-hak dan kewajiban melalui media elektronik, media cetak, dan rapat koordinasi, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa mengenai hal-hal berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakann satu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang sederajat. Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 31 meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan, beaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta pendanaan pendidikan di luar negeri.

Biaya Investasi satuan pendidikan dan biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah akan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Sedang biaya operasi satuan pendidikan dan biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah akan meliputi biaya personalia dan biaya non-personalia. Demikian pula dengan bantuan biaya, beasiswa dan pendanaan pendidikan diluar negeri semuanya diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dengan disertai dengan ancaman pengenaan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:

Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

a. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
b. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
c. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Tak dapat disangkal, untuk memperoleh pendidikan yang baik dibutuhkan biaya pendidikan yang jumlahnya cukup besar . Bagi orang yang mampu dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

banyak uang, masalah biaya ini tidak terlalu menjadi persoalan .Tapi bagi sebagian orang, yakni orang kurang mampu masalah biaya ini, merupakan persoalan yang cukup berat. Jangankan untuk biaya pendidikan, untuk biaya makan sehari-hari saja mereka nyaris tak punya. Apalagi problema biaya pendidikan ini, dari hari ke hari diberbagai jenjang pendidikan menunjukkan grafik yang terus meningkat. Jelas, bagi kelompok masyarakat kurang mampu ini, menggapai pendidikan menjadi semakin sulit dan dan sukar untuk diwujudkan.

Meskipun begitu, ditengah susah dan beratnya masalah beban biaya pendidikan ini, bagi sekelompok orang atau pelajar yang kretif, dengan bekal semangat, do'a serta usaha yang ulet .serta berusaha membangun jaringan silaturahmi dengan pihak lain yang berkompeten ternyata biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan bisa diatasi dengan baik. Sehingga kendala biaya yang selama ini dianggap menakutkan bisa diatasi. Salah satu cara para pelajar tersebut mengatasi kendala biaya adalah dengan cara mencari dan mendapatkan beasiswa.

Beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada siswa karena nilai tinggi atau karena yang bersangkutan tidak mampu membayar. Keberadaan beasiswa ini sudah pasti merupakan angin segar bagi para pelajar yang kurang mampu segi ekonomi tetapi memiliki semangat untuk sukses menggapai pendidikan. Realitasnya telah banyak para pelajar yang tadinya kurang mampu secara ekonomi ternyata berkat adanya bantuan beasiswa ini seperti BSM dan BKSM mereka mampu menyelsaikan pendidikan. Bahkan tak sedikit dari para penerima beasiswa ini mampu mencapai jenjang pendidikan yang cukup tinggi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah juga telah menyediakan pedanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yaitu program Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS).

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS Depdiknas tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Biaya bantuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.
b. Dengan kanaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
c. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
d. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.
e. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Pemerintah pusat dan daerah kini sedang berusaha keras mengatasi permasalahan putus sekolah tersebut. Salah satunya dengan menggiatkan sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memberikan pengertian serta penyadaran atas pentingnya pendidikan sekolah bagi anak kepada orang tua.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Paparan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal di Adiwerna pada tanggal 22 Januari 2010 tentang Wajib Belajar Pendikan Dasar Kabupaten Tegal vs Program Pokok Pendidikan yang menjadi kendala Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Tegal adalah: "1) Ekonomi, 2) Daya Tampung, 3) Geografis, 4) Budaya, 5) Alasan Khusus."

Program/Strategi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Tegal adalah:

1. Bea Siswa Miskin (BSM); BOS.
2. USB SMP/MTs; RKB SMP/MTs.
3. SD-SMP SATAP; SMPT/MTsT.
4. Program Paket B; Wajar Dikdas di Pontren
5. SMPLB.

Upaya Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dinilai telah maksimal dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan. Selain itu Dinas Dikpora telah mengoptimalkan bidang pendidikan nonformal, seperti Program Kejar Paket B. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari mengatakan:

> Pemerintah sudah yang bersifat membantu mendirikan SMP Terbuka , alternatif Kejar Paket B, dana BOS, pemerintah saat muncul untuk didirikan SMP satu atap tetapi dipandang kurang efektif, sehingga untuk menuntaskan wajar dikdas sudah diprogamkan mendidirikan SMPN 4 di Jatilaba, karena ada kantong-kantong *drop out.*

Anak-anak tamatan SD/MI yang berusia 13-15 tahun atau maksimal 18 tahun yang kurang beruntung kaerana keadaan ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu untuk mencari nafkah atau membantu orang tua bekerja, sehingga tidak memungkinkan mereka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

untuk mengikuti pelajaran sebagai siswa SMP/MTs Reguler. Untuk mereka di Kecamatan Margasari telah disediakan SMP Terbuka dan Kejar Paket B.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Tegal tahun 2009-2014 telah ditetapkan sasaran, kebijakan dan program pembangunan pendidikan.

Sasaran:

1) Meningkatnya jumlah dan mutu sarana prasarana pendidikan.
2) Meningkatnya dayatampung pendidikan.
3) Menigkatnya APK, APM dan AT serta menurunnya angka putus sekolah (DO).
4) Meningkatnya fasilitasi Kejar Paket A,B,dan C serta pembinaan pemuda dan olah raga.
5) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua tingkat dan jenjang pendidikan.
6) Meningkatnya mutu menejemen pendidikan dan kemandirian sekolah.

Kebijakan:

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
2) Meningkatnya daya tampung sekolah.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan pada berbagai aspek pendidikan baik teknis maupun non teknis.
4) Pembinaan dan pengawasan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
5) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan pada berbagai aspek khususnya bidang ketenagaan dan profesionalisme.
6) Peningkatan mutu dan peran serta masyarakatr dalam pengelolaan pendidikan.

Program:

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
2) Meningkatnya daya tampung sekolah melalui program Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Nonformal dan Informal.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan pada berbagai aspek pendidikan baik teknis maupun non teknis melalui program Wajar Dikdas, Bantuan operasional sekolah (BOS), dan Pemberian beasiswa.
4) Pembinaan dan pengawasan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga melalui program Pendidikan Nonformal dan Informal, dan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
5) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan pada berbagai aspek khususnya bidang ketenagaan dan profesionalisme melalui program Pembinaan tenaga pendidikan dan kependidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6) Peningkatan mutu dan peran serta masyarakatr dalam pengelolaan pendidikan melalui program Pembinaan pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan dan program tersebut di atas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang akan disusun pada penyusunan perencanaan kegiatan tahunan baik secara operasional maupun tingkat kinerja yang diharapkan.

Waudin dalam Seminar Pendidikan yang bertema Aktualisasi Pemkab Tegal dalam meningkatkan SDM di bidang pendidikan pada 17 Pebruari 2007 di Margasari mengatakan: "Upaya dan strategi penuntasan wajar dikdas dan buta aksara adalah membentuk Tim Koordinasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (GN-P2WB) pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Tugas dan fungsi tim Koordinasi adalah merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan GN-P2WB."

Strategi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, saat ini, mestinya dilaksanakan dengan menerapkan beberapa pendekatan, meliputi: pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan agama, pendekatan birokrasi, dan pendekatan hukum.

(1) Pendekatan Budaya

Sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut, misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(2) Pendekatan Sosial

Sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Kejar Paket B.

(3) Pendekatan Agama

Pada desa tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat mentaati ayat-ayat suci. Untuk desa seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep Wajib Belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto "belajar adalah ibadah" yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

(4) Pendekatan Birokrasi

Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Pembentukan tim koordinasi di tingkat kecamatan dan desa merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain.

(5) Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep "*universal basic education*" dan belum menerapkan konsep "*compulsary education*". Artinya, program Wajib Belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep *compulsary education*, sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik.

2. Upaya sekolah

Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan Pemerintah dan atau pemerintah daerah atau masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program wajib belajar. Tanggung jawab satuan pendidikan atau sekolah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008, Bab 3 tentang Penyelenggaraan pasal 5 yang berbunyi:

(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
(4) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan massa (*mass education*) atau *education for all* yang diwajibkan diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu (*compulsory education*). Pendidikan dasar (*basic education*) tidak sama dengan sekolah dasar (*primary/elementary school*). Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menunjukan bahwa peserta didik dalam usia pendidikan dasar harus dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya tanpa terputus selama sembilan tahun, yaitu 6 tahun di tingkat SD dan 3 tahun di tingkat SMP atau satuan pendidikan yang sederajat. Dalam wajib belajar 9 tahun, semua lulusan SD 6 tahun secara otomatis harus bisa ditampung di jenjang SMP sebagai bagian dari program pendidikan dasar 9 tahun.

a. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari pemerintah, dalam bentuk dana atau buku, untuk menjamin terlaksananya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun hingga tuntas. Diharapkan dapat pula mendukung peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola dan pencitraan pendidikan yang positif di hadapan publik. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis setempat, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang heterogen.

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun (2007: 11) menyatakan:

> Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
> 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
> 2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
> 3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
> 4) Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6) BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Berdasarkan panduan BOS, program BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

Marnadi mengatakan: Disamping BOS regular, ada BOS pendamping untuk memenuhi kebutuhan individu anak, seperti tidak punya sepatu dibelikan sepatu, tidak punya tas dibelikan tas, bahkan membeli sepeda untuk transportasi, ada Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Juwahir Dirgahayu mengatakan: Upaya menurunkan angka putus sekolah adalah memberikan motivasi kepada siswa, memberikan bantuan transport, bea siswa dan bantuan-bantuan lain yang bisa diusahakan sekolah.

b. Upaya persuasif.

Setiya Guru Kelas VI SDN Prupuk Selatan 04 mengatakan:

> Ada 7 (tujuh) anak yang tidak melanjutkan ke SLTP. Upaya yang dilakukan kami mendatangi rumah mereka dan dikatakan anda belum selesai sekolah pendidikan dasar, awalnya lebih dari 7, hampir 50% dari jumlah 27 yaitu 13 anak, mereka juga datang ke tokoh masarakat untuk memberikan pencerahan, termasuk melalui jamiah pengajian Lailatul Ijtima dan Jamiah Al-Ittihad untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membantu mereka agar meneruskan ke SLTP. Juga secara tidak formal sebagai guru menemui Guru SMPN 3 Margasari untuk memberitahukan bahwa masih ada anak-anak tidak sekolah, apalagi ada yang rangking satu. Kemudian diketahui ada anak yang akhirnya masuk ke SMPN 3 Margasari.

Dalam upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Teguh Septiaadi mengatakan:

Pada tahun ajaran baru sekolah mengumumkan tentang penerimaan peserta didik baru melalui media cetak seperti pengumuman yang ditempel di papan pengumuman, brosur, dan spanduk; media elektronik melalui radio dan melalui orang tua/ wali siswa ketika rapat pengambilan ijasah, laporan hasil belajar siswa, juga melalui siswa. Dalam pengumuman dicantumkan adanya fasilitas atau kemudahan.

Bahkan tidak jarang bagi sekolah swasta melakukan penawaran yang menggiurkan, bagi siswa yang masuk tidak akan dipungut biaya pendidikan alias gratis, bebas uang gedung dan akan diberi seperangkat pakaian seragam dan sepasang sepatu. Pada saat sudah menjadi siswa, terutama bagi siswa yang tidak mampu diberi uang transport. Di sekolah juga diadakan Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA). Demikian juga ketika bulan puasa diadakan pengumpulan zakat fitrah yang salah satu penerimanya adalah mereka siswa yang tidak mampu.

Endang Marhaeni mengatakan:

Mengapa banyak anak putus sekolah hal itu dikarenakan rata–rata disebabkan oleh faktor intern (anak sendiri) dan faktor ekstern (lingkungan keluarga), rata-rata anak disini dititipkan ke tetangga atau ke mbahnya sehingga anak kurang perhatian, tidak ada monitor orang tua, sehingga anak malas, BK (Bimbingan Karier) memanggil orang tua tapi yang datang saudaranya. BK home visit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, ternyata bukan masalah ekonomi. Selanjutnya diadakan konferensi kasus yang hasilnya anak mengundurkan diri.

Selanjutnya Endang Marhaeni mengatakan: "Anak yang mengundurkan diri diarahkan untuk pindah ke sekolah lain, karena anak harus tetap sekolah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Memindahkan ke sekolah lain harus tetap diusahakan kerena anak harus tetap sekolah."

Menurut Sujono:

> Pada setiap saat pembagian ijazah Kepala Sekolah memberikan dorongan kepada orang tua agar puteranya untuk melanjutkan ke SLTP juga kepada anaknya untuk melanjutkan ke SLTP, juga menyarankan kepada SLTP terdekat agar anak-anak kami pulang pergi ke Sekolah supaya diantar-jemput, dan sekolah menyanggupinya, tapi setelah beerapa kali berlangsung berhenti, dikarenakan diancam oleh supir angkutan desa yang merasa dirugikan dengan adanya program antar jemput siswa yang sekolah di SLTP oleh pihak sekolah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan Beasiswa adalah "bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi." **Beasiswa** adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar yang diinginkan.

Sekolah dapat mengusahakan bea siswa atau bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Adapun jenis-jenis beasiswa tersebut, adalah beasiswa siswa miskin (BSM) dan beasiswa khusus siswa miskin (BKSM).

c. Pengenalan SMP Terbuka dan Program Kejar Paket B.

1) SMP terbuka Margasari

Menurut Petunjuk Operasonal SMP Terbuka (2005:2) "menjelang tahun pelajaran baru, kegiatan utama yang perlu dilakukan adalah meberikan penyuluhan dan publikasi."

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kegiatan ini bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang SMP Terbuka.
b. Memberikan motivasi kepada tamatan SD dan anak putus SMP atau yang sederajat untuk dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan geografisnya.
c. Menciptakan kondisi masyarakat sehingga keberadaan SMP Terbuka dapat dirasakan sebagai kebutuhan, dan keharusan, bukan sebagai penghambat.

Adapun materi penyuluhan dan publikasi antara lain:

a. Informasi tentang SMP Terbuka Margasari.
b. Tata cara pendaftaran calon siswa dan penjadwalannya.
c. Informasi tentang TKB (Tempat Kegiatan Belajar) Mandiri dan PPK (Program Pendidikan Ketrampilan).

Pada setiap awal tahun pelajaran dilakukan kegiatan penerimaan siswa baru bertempat di SMP Induk (SMP Negeri 1 Margasari). Tapi untuk lebih memudahkan calon siswa mendaftar, pendaftaran dapat juga melalui guru bina, guru pamong, kepala desa, atau kepala SD/MI. Untuk keperluan ini tentu saja formulir harus sudah disebarkan sebelumnya, lengkap dengan penjelasan persyaratannya.

2) Program Kejar Paket B

Penuntasan wajib belajar tidak hanya melalui berbasis persekolahan. Pelayanan pendidikan dasar tidak seharusnya bertumpu pada jalur persekolahan yang formal saja, tetapi juga perlu penguatan jalur-jalur pendidikan lainnya, seperti jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat non formal. Apalagi tidak semua wilayah bisa terjangkau layanan persekolahan. Begitu pula tidak semua populasi sasaran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

wajib belajar bisa dengan nyaman mengenyam pendidikan persekolahan. Diperlukan juga perluasan akses pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tidak semata-mata harus diatasi dengan membangun unit sekolah baru, karena hal ini bisa saja tidak efisien jika infra strukturnya minim dan tidak menunjang. Oleh karena itu diperlukan pembukaan akses pendidikan alternatif, seperti Kejar Paket B.

Menurut usulan penyelenggaraan program Kejar Paket B kelas baru (2010:2) tujuan penyelenggaraan program kesetaraan adalah:

Tujuan umum:
Memberikan wadah pembelajaran program Paket B setara SMP dan memberikan kepada mereka yang karena suatu hal tidak bisa belajar.
Tujuan khusus:

a. Agar Warga Belajar memiliki pengetahuan dan ketrampilan setara SMP.
b. Agar Warga Belajar memiliki sikap setara SMPyang dapat menjadi tuntunan hidup dalam masyarakat.
c. Memberikan kesempatan Warga Belajar untuk melanjutkanpendidikan yang lebih tinggi.

Program Kejar Paket B setara SMP telah diselenggarakan di wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai andalan utama pelaku pembangunan di segala bidang, maka pemerintah khususnya Kabupaten Tegal telah meluncurkan program Kejar Paket B setara SMP yang pada tahap awal ini dikhususkan di desa Margasari. Dengan diselenggarakan program Kejar Paket B setara SMP di wilayah Kecamatan Margasari, maka masyarakat yang telah menyelesaikan Kejar Paket A setara SD,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lulusan SD/MI, serta mereka yang putus SMP/MTs dapat melanjutkan pendidikan tersebut.

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal diantaranya Kejar Paket B setara SMP/MTs yang menekankan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan fungsional, pengembangan sikap, kepribadin profesional peserta didik.

Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Kejar Paket B mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SMP/MTs untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam memasuki lapangan pekerjaan.

3. Upaya masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Krishna (2003) dalam Prasojo (2007:5.3) didefinisikan sebagai "peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan (*development*) dan pilihan (hidup) dan mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka." Sedang Arbi Sanit dalam Chalid (2008:5.1) mengatakan: "Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi suatu kekuatan nyata, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kehidupan." Berdasarkan pengertian ini, pada dasarnya masyarakat diharapkan dapat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah.

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat.

Menurut Prasojo (2007:5.3-5.4) Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menemukenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal keahlian, pengetahuan, keuangan) mereka sendiri dengan cara yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Partisipasi masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk memajukan pendidikan sangat diperlukan. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu bisa diupayakan secara konkrit melalui dukungan masyarakat pula. Untuk itu perlu digali sumber daya masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menuntut pendidikan yang bermutu, tetapi juga berperan serta memberikan masukan pikiran, tenaga dan biaya bagi kemampuan pendidikan

Sebagai wujud transformasi segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan nyata dan rasa tanggung jawab jawab masyarakat terhadap kesinambungan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri, dalam hal ini tentunya berperan serta dalam mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, maka mereka berpartisipasi aktif dalam wadah lembaga GN-OTA, Komite Sekolah, dan SMP/MTs swasta.

a. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal. Dukungan dan peran masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Membantu anak-anak dari sanak-keluarga atau keluarga lain yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan sudah sejak lama tumbuh sebagai tradisi dalam masyarakat kita.

Upaya ini dilakukan secara perorangan, berkelompok, maupun melalui yayasan/lembaga sosial. Akan tetapi, karena diselenggarakan secara sendiri-sendiri dan sporadis, cara-cara semacam itu tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Potensi masyarakat yang sangat besar sebagai orang tua asuh sudah saatnya digalang dan dikoordinasikan. Penulis berpendapat peran lingkungan yakni orang-orang sekitar sangat membantu dalam pengentasan anak putus sekolah, diantaranya dengan konseling melalui pendekatan dari hati ke hati kepada orang tua ataupun si anak. Membantu secara finansial dengan menjadi orang tua asuh atau memberi bantuan langsung atau lewat lembaga yang menaungi, menyalurkan si anak yang putus sekolah kepada lembaga yang peduli mereka, seperti Panti Asuhan Muhammadiyah Margasari, dan masih banyak hal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lain lagi yang kita bisa perbuat. Junainah M. Asa guru MTs/MA Darul Mujahadah Prupuk Utara mengatakan: "GN-OTA di MTs Darul Mujahadah berlangsung berupa subsidi silang yang dilakukan orang tua/wali siswa, bagi yang mampu membayar SPP lebih, sementara yang tidak mampu membayar SPP kurang dari semestinya."

Abuseri Camat Margasari mengatakan: "Pernah GN-OTA itu terbentuk dan berjalan di tingkat kecamatan , namun tidak atau belum sesuai dengan harapan, karena kepedulian mereka-mereka belum tersentuh secara keseluruhan."

Hal itu sejalan pernyataan Wartono Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari tentang GN-OTA:

> GN-OTA kalau bersifat lokal tidak terealisir, kesannya bersifat instruktif, perintah dari pusat, yang mendominasi kuat adalah lembaga yang di atas, kalau ada dana ya dari pusat, dana GN-OTA dikucurkan dari atas, dari masyarakat yang mendaftar sebagai anggota GN-OTA atau sebagai penyantun tidak ada, apalagi sudah ada BOS seolah-olah anak sudah tercukupi.

Tujuan GN-OTA diantaranya adalah: Memasyarakatkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) sebagai upaya memberdayakan potensi dan sumber masyarakat untuk menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Menghimpun dan menerima sumbangan dari masyarakat selaku orang tua asuh untuk disalurkan sebagai bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, anak penyandang cacat dan anak yang tinggal di daerah terpencil, agar dapat melanjutkan pendidikan dasar sampai tamat.

b. Komite Sekolah.

Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumbenr pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Bab VII Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 13 menyatakan:

(1) Masyarakat berhak:

a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta
b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

(2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.

(3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, Bab VII, Pasal 13, ayat (3) di atas tentunya untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam wajib belajar selalu berpedoman dan sesuai peraturan perundang- undangan yang ada. Hal itu sejalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bentuk pelaksanaan hak masyarakat, antara lain:

a. Ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program;

b. Mengikut sertakan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti program wajib belajar;

c. Ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau anak usia wajib belajar yang belum mengikuti wajib belajar, menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat tinggalnya;

d. Ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib belajar.

Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain:

a. Sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya yang sesuai program wajib belajar;

b. Berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggaraan, manajemen) menjadi orang tua asuh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 47 berbunyi: Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

a. Biaya pribadi peserta didik;

b. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan / satuan pendidikan;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan

d. Pendanaan biaya non personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan.

e. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa: Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

a. Menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

b. Mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas standar nasional pendidikan.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa:

(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.

(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan kepentingan pendidikan.

(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan dimedia cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Mentri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Tanggung jawab masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) katagori, yaitu tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Komponen biaya pendidikan pada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat akan meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan, biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Sedangkan tanggung jawab masyarakat diluar penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau dengan kata lain tanggung jawab masyarakat selaku orangtua atau wali peserta didik akan meliputi biaya pribadi peserta didik, biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan, biaya personalia yang diperlukan untuk menutupi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kekurangan pendanaan dan pendanaan sebagian dari biaya operasi pendidikan dalam rangka pengembangan sekolah yang biasanya dipungut berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui Komite Sekolah.

Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu menyatakan:. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik meliputi:

1. Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya.
2. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu menyatakan dengan jelas bahwa peran serta, tanggung jawab, hak dan kewajiban masyarakat sangat diperlukan dalam proses pendidikan di sekolah. Peran serta, tanggung jawab, hak dan kewajiban tersebut dapat berupa perorangan, kelompok, maupun organisasi. Komite Sekolah menjadi salah satu jembatan antara masyarakat dengan institusi sekolah. Peran serta tanggung jawab, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan dalam wadah Komite Sekolah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksaan kebijaksanaan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*eksektutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dari keempat peran itu, yang paling menonjol ialah peran ke-2 yaitu: Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, sedangkan peran ke-1, 3, dan 4 pada kenyataan di lapangan masih sangat kurang.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3) Menampung dan manganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
   a) Kebijakan dan program pendidikan.
   b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
   c) Kriteria kinerja satuan pendidikan.
   d) Kriteria tenaga pendidikan.
   e) Kriteria fasilitas pendidikan.
   f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Ke-7 fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. Komite Sekolah belum pernah mengundang para orang tua siswa untuk sasehan tentang pelaksanaan pendidikan di Sekolah, selain persoalan menyangkut pendanaan. Jika Komite Sekolah menuaikan peran dan fungsinya sebagimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentu peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan termasuk tercapainya target APK Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat diwujudkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. SMP/MTs swasta.

Prasojo (2007:1.25) mengemukakan: "Salah satu fungsi dari desentralisasi adalah penguatan lembaga-lembaga lokal. Dalam pelayanan publik, lembaga-lembaga lokal ini merupakan wadah artikulasi kepentingan masyarakat dan wadah pengwasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah." Lembaga lokal sebagai wadah artikulasi, salah satu wujudnya mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan, baik itu SMP maupun MTs.

Terlepas dari visi, misi, dan tujuan didirikannya SMP/MTs swasta oleh masyarakat, tentu keberadaannya telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dan disadari atau tidak disadari terhadap suksesnya kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari.

Masyarakat telah menyediakan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia berupa tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan *stake holder*nya masing-masing maupun sumber daya dana, sarana dan prasarana pendidikan .berupa gedung SMP/MTs.

Untuk tenaga pendidik SMP/MTs secara tolah berjumlah 266 guru (Tabel 4.7 Banyaknya Sekolah, Guru dan Siswa SMP/MTs) yang berasal dari SMPN 101 guru, dan dari SMP/MTs swasta 165 guru. Artinya masyarakat menyediakan tenaga pendidik 62.03 %.

Di Kecamatan Margasari ada 10 SLTP yang terdiri dari 3 sekolah negeri yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3 dan 7 sekolah swasta yaitu 3 SMP swasta dan 4 MTs swasta disamping 1 program kejar paket B dan 1 SMP Terbuka. Jumlah total siswa SLTP pada tahun pelajaran 2009/2010 adalah 5.415 anak terdiri dari 2.486 anak ditampung di 3 SMPN dan 2.929 anak ditampung pada SMP/MTs

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

swata. Berdasarkan data tersebut diatas (Tabel 4.6 Data SMP/MTs Kecamatan Margasari Tahun 2009/2010) SMP/MTs swasta dapat menampung 54, 1 %.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang berlangsung di Kecamatan Margasari dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokasi adalah: Kondisi faktor komunikasi dalam pelaksanaaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara umum sudah cukup baik, yaitu ditinjau kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; keberadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan memberikan pedoman tentang cara-cara teknis dan koordinasi antar bagian/seksi terkait oleh Tim Koordanasi Kecamatan (TKC), hanya saja TKC belum terbentuk sehingga tugas tersebut melekat pada Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari dalam melaksanakan suatu kebijakan; kondisi sumber daya cukup baik kualitas maupun kuantitas, walaupun belum ada Tim Koordinasi Kecamatan (TKC), sumber daya finansial secara umum memadai, dan sarana prasarana untuk SMP/MTs Reguler memadai termasuk SMP Terbuka, sarana dan prasarana untuk Kejar Paket B belum memadai; untuk faktor disposisi menunjukkan kondisi yang baik, terutama dilihat dari dukungan dan komitmen dari tenaga pendidik dan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Margasari; untuk faktor struktur birokrasi masih lemah yakni Tim

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Koordinasi Kecamatan (TKC) belum terbentuk dan standar operasinal prosedur (SOP) sudah ada tapi belum dilaksanakan sepenuhnya.

b) Dalam penelitian ditemukan adanaya faktor lain yang menjadi determinan atas keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yaitu: kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, yakni masih adanya di sebagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa untuk memperoleh penghidupan tidak harus bersekolah, rendahnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan dan lingkungan sosial yang tidak mendukung; kondisi ekonomi yang menghambat, yakni kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat kecamatan Margasari yang terkungkung dalam kemiskinan; kondisi politik yang kurang kondusif, yakni adanya penolakan beberapa pengelola lembaga pendidikan terhadap rencana pendirian SD-SMP Satu Atap maupun pendirian Unit Sekolah Baru berupa SMP Negeri yang berlokasi di desa Jatilaba; hambatan geografis, yakni jauhnya tempat tinggal anak dengan lokasi sekolah, khususnya SMP Negeri.

c) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal belum mencapai target minimum angka partisipasi kasar (APK) minimum 95% (Tuntas Paripurna) terbukti dengan APK tingkat SMP yang dicapai di Kecamatan Margasari pada tahun 2009 adalah 55.87%, ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal Dibawah Pratama: <80%. Sementara target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus dicapai pada tahun 2009/2010 dengan APK minimum 95% (Tuntas Paripurna).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Demikian juga program pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah (APS) 1% belum tercapai, terbukti angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Kecamatan Margasari pada tahun 2009/2010 mencapai 109 atau 2.01 %.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan diatas direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

Aplikasi konseptual model Implementasi Kebijakan George C.Edward III yang meliputi empat variabel yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam kasus Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah perlu dilengkapi dengan variabel Sosisal budaya, Ekonomi, Politik dan Geografis, karena variabel-varibel tersebut merupakan faktor-faktor determinan lain yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari.

b. Saran Praktis

1) Untuk kesuksesan dari program ini diperlukan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait yaitu orang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa dan dinas terkait untuk terus melakukan komunikasi, sosialisasi, publikasi, dan mobilisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pendidikan serta meningkatkan minat dan motivasi belajar anak.

2) Untuk faktor struktur birokrasi yang penting perlu segera dibentuk dan diberdayakan Struktur Organisasi GNP-PWB berupa Tim Koordinasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kecamatan (TKC) dan Tim Koordinasi Desa (TKD) di 13 Desa di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal untuk mempercepat perluasan akses anak usia 13-15 tahun di SMP/MTs/setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

3) Masyarakat yang mengalami hambatan sosial budaya dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diperlukan intervensi dari pemerintah antara lain berupa penyuluhan dan advokasi tentang pentingnya pendidikan.
4) Memberikan perhatian khusus kepada kelompok anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI, yaitu: anak miskin, pekerja anak, anak desa terpencil, yaitu dengan tetap membuka SMP Terbuka dan program kejar Paket B untuk menanpung anak–anak yang berusia 13-15 tahun yang tidak sempat menempuh jalur pendidikan formal karena alasan ekonomi, sehingga mereka harus bekerja membantu orang tua.
5) Perlu adanya Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap suksesnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
6) Perlu komitmen dan dukungan para pengelola lembaga pendidikan swasta (SMP/MTs swasta) akan keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Margasari yaitu dengan tidak protes atau menolak terhadap pendirian SMP Negeri di Desa Jatilaba.
7) Untuk daya tampung yang kurang dan karena letak geografisnya yang tidak mendukung karena terlalu jauh dan tidak ada sarana transportasi yang mendukung maka dari pihak Dinas Dikpora Kabupaten Tegal segera untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membuat sekolah baru guna memenuhi daya tampung siswa yaitu Unit Sekolah Baru (USB) berupa SMPN 4 Margasari yang terletak di Desa Jatilaba.

8) Untuk mencapai target mencapai target minimum APK minimum 95% (Tuntas Paripurna) dan menurunkan angka putus sekolah (APS) 1% Pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat terus melakukan komunisasi, sosialisasi, pencerahan kepada kelompok sasaran mengenai hak-hak dan kewajiban melalui media elektronik, media cetak, dan rapat koordinasi, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Sekolah-sekolah swasta perlu diberi peluang yang lebih besar untuk lebih berpartisipasi dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan menyediakan subsidi dan peningkatan beasiswa miskin, BOS, dan block grant sesuai dengan kebutuhan sekolah.

.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Barnadib, Imam. (1988). *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode.* Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Cetakan Kelima.

Chalid, Pheni. (2008). *Teori dan Isu Pembangunan.* Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka. Edisi Kesatu. Cetakan keempat.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Edisi Kedua.Gajah Mada university Press, Cetakan kelima.

Ekowati, Mas Roro Lilik. (2009). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi bijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis).* Surakarta: Pustaka Cakra. Cetakan IV.

Elu, Wilfridus B. & Purwanto, Agus Joko. (2009). *Inovasi dan Perubahan Organisasi.* Edisi ke-1. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.

Gibson, Ivancevich & Donelly.(1985). *Organisasi Perilaku,Struktur, Proses Edisi kelima jilid 1.* Jakarta: Elangga. Alih bahasa Djarkasih.

_____.(1985). *Organisasi Perilaku,Struktur, Proses Edisi kelima jilid 2.* Jakarta: Elangga. Alih bahasa Djarkasih.

Indiahono, Dwiyanto.(2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisiys.*Yoyakarta.Penerbit Gava Media.Cetakan pertama.

Irawan, Prasetya. (2007). *Metodologi Penelitian Administrasi.* Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. Cetakan ketiga.

Komar, Oong. (2006). *Filsafat Pendidikan Nonformal.* Bandung: Penerbit Pustaka Setia. Cetakan I.

Kismartini,dkk. (2009). *Analisis Kebijakan Publik.* Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. Cetakan ketiga.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Cetakan keduapuluh empat.

Nawawi, Ismail.(2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* Surabaya: Penerbit PNM.

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Cetakan ketiga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul Kasus Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Jembrana 2000-2006.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Cetakan I.

Prasojo, Eko, dkk. (2007). *Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. Cetakan ketiga.

Prayitno, Didi. (2008). Partrisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke), *Tesis, Magister Ilmu Adiministrasi Universitas Dipoinegoro*, Semarang.

Sa'ud, Udin S. (2008). *Substansi pendidikan Dasar Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun.* Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya "Kontribusi Ilmu Pendidikan dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun"Auditorium JICA FPMIPA UPI. 11 September 2008. Bandung.

Sidi, Indra Djati. (2001). *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan.* Jakarta: Logos.

Soedijarto. (2008). *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita.* Jakarta: Kompas.

_____. (1998). *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental Dalam Upaya Pembangunan Bangsa.* Jakarta: Balai Pustaka.

Soesilowati, Etty. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi.* Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. Cetakan pertama.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Penerbit Alfabeta. Cetakan keempat.

Tilaar, H.A.R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Cetakan Kedua.

_____. (1992). *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan.* Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Cetakan Kesembilan.

Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan II.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Malang: UMM Press. Cetakan Kedua.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Waudin. (2007). Aktualisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. Makalah disajikan pada *Seminar Pendidikan GP ANSOR Kecamatan Margasari tangga 17 Pebruari 2007*. Margasari.

Dokumen dari Internet, halaman Web

Anda Bertanya GN-OTA Menjawab. Diambil 8 Februari 2011, dari situs World Wide Web http://www.gnota.or.id/aboutus/tanya.php?sec=1&mode=id

Bentri, Alwen, dkk. (2008*). Efektifitas Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Sumatera Barat.* Diambil 31 Maret 2010 dari situs World Wide Web http://puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_peserta/

Ferdiansyah. *Refleksi Pendidikan Tak Tuntas*. Diambil 31 Maret 2010 dari situs World Wide Web file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/REFLEKSI%20WAJAR.htm.

Geiger, Matthew. *Implementation of public policy: Issues of theory and practice.* Diambil 01 Nopember 2010, dari situs World Wide Web http://www.helium.com/item/581381-implementation-of-public-policy-issues-of-theory-and-practice

Sadeli, Agus. 2007.*Sistem Pendidikan*. Diambil 31 Maret 2010 dari situs World Wide Web http://asadeli.wordpress.com/

Institusi pemerintah sebagai penerbit

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemuda. (2005). *Program-program Pendidikan Non Formal Tahun 2005.* Modul PelatihanTenaga LapanganDikmas. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemuda. Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemuda. Regional III Jawa Tengah.

BPPP Kecamatan Margasari. (2010). *Programa Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan.*

Departemen Pendidikan Nasional - Departemen Agama. (2007). *Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, Departemen Pendidikan Nasional - Departemen Agama.

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, Pemerintah Kabupatren Tegal. (2009). *Rencana Strategis (RENSTRA). Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, Pemerintah Kabupatren Tegal. (2010). *Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Tegal vs Program Pokok Pendidikan.* 22 Januari 2010. Tegal

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah (2009) *Buku Panduan BOS Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9Tahun Yang Bermutu* Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. (2006). *Konsep SMP Terbuka.* Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. (2010). *Panduan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemetaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.* Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

_____. (2010). *Panduan Pelaksanaan Pemantapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Bermutu melalui KKN Wajib Belajar Dan SAP2WB*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta.

_____. (2010). *Panduan Pelaksanaan Program Dharma Wanita Persatuan Penggerak Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (DWP2WB) Tahu 2010* Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

_____. (2010). *Panduan Pelaksanaan Program Sarjana dan Pemuda Penggerak Wajib Belajar Sembilan Tahun (SP2WB) TAHUN 2010.* Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

_____. (2007). *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007.* Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

_____. (2007). *Pelangi Pendidikan.* Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN Tahun 2004-2009

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanunan Jangka Menengah daerah (RPJM) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Artikel Koran/harian

Tajuk rencana (2011, 7 Mei). Mayoritas Pekerja Lulusan SD dalam *Suara Merdeka*, hal.6

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Waudin. (2011, 2 Februari). Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Tegal dalam *Suara Merdeka,* hal. C

Waudin. (2011, 19 Maret). Ratusan Siswa SD Tak Melanjutkan dalam *Suara Merdeka,* hal.A

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sebagai satu rangkaian gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati dan Walikota. untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dengan :

a. meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/-pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka parti-sipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
b. meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
c. menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEDUA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat :
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
   b. Membentuk Tim Koordinasi untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Ketua Harian Menteri Pendidikan Nasional, serta beranggotakan pimpinan instansi lain yang terkait.
2. Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
   b. Melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
3. Menteri Dalam Negeri :
   Memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
4. Menteri Agama :
   Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara di madrasah, pondok pesantren dan lembaga keagamaan yang menjadi binaannya.
5. Kepala Badan Pusat Statistik :
   Melakukan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional dalam pemutakhiran data nasional untuk mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
6. Gubernur, Bupati dan Walikota :
   Melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara kepada Presiden.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2: UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari Tahun Pelajaran 2008/2009 Tentang Jumlah Lulus SD/MI Yang Melanjutkan Ke SMP/MTs/PONPES

No.	Nama Sekolah	Jumlah siswa	Yang Melanjutkan				Tidak Melanjutkan
			SMP	MTs	Ponpes	Jml	
1	SDN Danaraja 01	22	9	7	3	19	3
2	SDN Danaraja 02	34	8	26	0	34	0
3	SDN Dukuhtengah 01	23	15	7	1	23	0
4	SDN Dukuhtengah 02	28	14	11	0	25	3
5	SDN Dukuhtengah 03	52	30	16	1	47	5
6	SDN Dukuhtengah 04	16	3	9	2	14	2
7	SDN Jatilaba 01	63	37	6	2	45	18
8	SDN Jatilaba 02	47	5	19	1	25	24
9	SDN Jatilaba 03	30	12	10	0	22	8
10	SDN Jatilaba 04	22	21	1	0	22	0
11	SDN Jembayat 01	24	14	10	0	24	0
12	SDN Jembayat 02	36	16	20	0	36	0
13	SDN Jembayat 03	27	18	2	0	20	7
14	SDN Jembayat 04	59	23	29	7	59	0
15	SDN Jembayat 05	39	11	28	0	39	0
16	SDN Jembayat 06	25	18	5	2	25	0
17	SDN Kaligayam 01	18	15	0	0	15	3
18	SDN Kaligayam 02	28	20	8	0	28	0
19	SDN Kalisalak 01	47	10	26	1	37	10
20	SDN Kalisalak 02	18	7	6	2	15	3
28	SDN Margasari 01	17	11	6	0	17	0
29	SDN Margasari 02	31	28	0	2	30	1
30	SDN Margasari 03	40	32	8	0	40	0
31	SDN Margasari 04	21	19	2	0	21	0
32	SDN Margasari 05	17	14	3	0	17	0
33	SDN Margasari 06	38	31	7	0	38	0
34	SDN Margasari 07	33	28	5	0	33	0
35	SDN Pakulaut 01	50	42	5	3	50	0
36	SDN Pakulaut 02	40	38	1	1	40	0
37	SDN Pakulaut 03	19	16	0	0	16	3
38	SDN Pakulaut 04	15	15	0	0	15	1
39	SDN Pakulaut 05	34	32	0	1	33	1
40	SDN Pakulaut 06	23	20	2	1	23	0
41	SDN Prupuk Selatan 01	16	16	0	0	16	0

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Nama Sekolah	Jumlah siswa	Yang Melanjutkan				Tidak Melanjutkan
			SMP	MTs	Ponpes	Jml	
42	SDN Prupuk Selatan 02	40	30	2	8	40	0
43	SDN Prupuk Selatan 03	44	37	7	0	44	0
44	SDN Prupuk Selatan 04	30	23	0	0	23	7
45	SDN Prupuk Utara 01	22	21	0	1	22	0
46	SDN Prupuk Utara 02	39	35	0	2	37	2
47	SDN Prupuk Utara 03	16	16	0	0	16	0
48	SDN Wanasari	37	16	17	0	33	4
49	SDI Al Fallah Margasari	36	36	0	0	36	0
50	SDS Ma'arif Marga Ayu	29	15	9	0	24	5
	JUMLAH	1625	969	446	47	1462	165

Sumber: Diadopsi dari Rekap Lulus SD/MI Yang Melanjutkan, UPTD DIKPORA Kec. Margasari, 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3: Rekap Jumlah Lulus SD/MI Yang Melanjutkan Ke SMP/MTs/PONPES Tahun Pelajaran 2010/2011 UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari

No.	Nama SD/MI	Jumlah Siswa						Tidak Melanjutkan	
		SMP		MTs		PONPES			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	SDN Danaraja 01	6	8	8	7	1	1	0	3
2	SDN Danaraja 02	5	3	12	5	1	0	0	1
3	SDN Dukuhtengah 01	5	3	4	3	1	1	0	2
4	SDN Dukuhtengah 02	15	19	0	0	0	0	2	1
5	SDN Dukuhtengah 03	15	17	5	7	0	0	0	0
6	SDN Dukuhtengah 04	6	5	2	1	0	0	0	0
7	SDN Jatilaba 01	22	12	3	6	0	0	9	8
8	SDN Jatilaba 02	7	1	11	13	3	0	9	10
9	SDN Jatilaba 03	14	5	0	2	1	0	4	2
10	SDN Jatilaba 04	7	5	3	2	0	0	0	0
11	SDN Jembayat 01	6	10	2	5	2	0	1	0
12	SDN Jembayat 02	3	2	12	11	0	0	0	0
13	SDN Jembayat 03	11	8	6	3	1	0	2	10
14	SDN Jembayat 04	2	3	17	19	3	1	0	0
15	SDN Jembayat 05	1	1	18	22	0	0	0	0
16	SDN Jembayat 06	9	10	0	2	0	0	0	0
17	SDN Kaligayam 01	7	8	0	0	0	0	0	0
18	SDN Kaligayam 02	10	6	0	1	1	1	0	3
19	SDN Kalisalak 01	7	5	8	5	1	0	1	5
20	SDN Kalisalak 02	8	2	0	3	0	0	0	1
21	SDN Kalisalak 03	10	9	5	6	0	0	0	0
22	SDN Kalisalak 04	11	9	3	4	0	0	0	1
23	SDN Marga Ayu	11	12	1	1	0	0	7	13
24	SDN Karangdawa 01	16	4	2	4	0	0	0	0
25	SDN Karangdawa 02	11	9	15	24	0	3	3	3
26	SDN Karangdawa 03	8	8	8	9	0	0	3	10
27	SDN Karangdawa 04	8	9	4	12	1	0	0	5
28	SDN Margasari 01	5	2	8	7	0	0	0	1
29	SDN Margasari 02	13	25	1	0	0	1	0	0
30	SDN Margasari 03	14	16	7	1	2	0	0	0
31	SDN Margasari 04	11	8	0	0	0	0	0	0
32	SDN Margasari 05	7	0	0	0	0	0	0	0
33	SDN Margasari 06	15	17	1	2	1	0	0	0
34	SDN Margasari 07	13	21	0	0	0	0	0	0
35	SDN Pakulaut 01	23	21	1	0	1	0	0	0
36	SDN Pakulaut 02	16	18	1	1	0	0	0	0
37	SDN Pakulaut 03	6	6	0	0	0	0	0	0
38	SDN Pakulaut 04	6	6	0	0	0	0	2	5
39	SDN Pakulaut 05	23	12	1	0	0	0	2	0
40	SDN Pakulaut 06	8	6	2	2	0	0	1	1

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Nama SD/MI	Jumlah Siswa						Tidak Melanjutkan	
		SMP		MTs		PONPES			
		L	P	L	P	L	P	L	P
41	SDN Prupuk Selatan 01	11	9	0	0	0	0	0	0
42	SDN Prupuk Selatan 02	10	9	0	0	1	2	0	7
43	SDN Prupuk Selatan 03	16	16	0	1	0	1	2	4
44	SDN Prupuk Selatan 04	10	17	0	0	0	0	0	0
45	SDN Prupuk Utara 01	10	12	0	0	0	0	0	1
46	SDN Prupuk Utara 02	10	14	0	0	1	3	0	2
47	SDN Prupuk Utara 03	21	10	0	0	0	0	0	0
48	SDn Wanasari	7	7	7	3	0	0	2	1
49	SDI Al Fallah Margasari	10	11	0	0	1	2	0	0
50	SDS Ma'arif Marga Ayu	3	0	13	12	0	0	0	1
	JUMLAH	509	464	191	206	23	16	50	101

Sumber: Diadopsi dari Rekap Lulus SD/MI Yang Melanjutkan, UPTD DIKPORA Kec. Margasari, 27 Juli 2010.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008/2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 5:

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA WARTONO, S.PD, KEPALA UPTD DIKPORA KECAMATAN MARGASARI TENTANG IMPLEMENTASI KIBAJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL PADA TANGGAL 30-NOPEMBER 2010

No	Peneliti	Informan
1	Adakah permasalahan dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal? Apa saja permasalahannya?	Ada permasalahannya, 1. Sosialisasi yang relatif terbatas belum menyentuh seluruhnya ke lapisan terbawah.2. Faktor sosial ekonomi pada desa-desa tertentu, yang pokok itu.
2	Apakah di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal dilaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Ya. dilaksanakan
3	Sejak kapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di canangkan di Kec. Margasari Kabupaten Tegal? Bukan 94?	Sejak 2008 sesuai dengan Permendiknas No. 47 Tahun 2008. Awalnya memang dulu 94, hanya terus waktu itu Pak kepala SMP 1 Pak Prapto mensosialisasikan di sini sejak itu memang sudah dilaksakan hanya gebrakannya ini sejak 2008
4	Apakah implementor memahami sasaran, tujuan, dan isi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Ya memahami.
5	Apa yang menjadi dasar/landasan hukum pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 , Permendiknas No. 47, 2008 itu
6	Bagaimana sesungguhnya tentang konsepsi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu?	Konsepsinya Anak-nak usia nol sampai e.. oh anak-nanak usia 7-15 harus tercover untuk menikmti pelayanan di bidang pendidikan dasar, jadi konsepsinya anak-anak usia 7-15 th harus bisa mengikuti pendidikan sampai pendidikan ke tingkat SLTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Peneliti	Informan
7	Bagaimana penentuan sistem pendataan dan pemetaan?	Sistemnya kami mendata dari tinkat lulusan SD/MI yang ada di Kecamatan Margasari, kemudian kami membuat peta masing-masing SD untuk menyampaikan data anak-anak yang melanjutkan/ tdk melanjutkan ke SLTP.
8	Bagaimana bentuk/ jenis pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Bentuk polanya setelah kami mendata , kemudian kami sasarkan bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan ke SMP Terbuka dan Kejar Paket B.
9	Bagimana penyuluhan dan publikasi itu dilakukan?	Publikasi bersifat lintas sektoral melalui rakor rapat koordinasi dihadiri Kepala Desa, kepada wali murid atu orang murid yang di SD/MI.publikasinya
10	Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Pertama kami sendiri Di jajaran UPTD Dikpora,kemudian Muspika, kemudian para guru, dan Kepala Sekolah.
11	Berapa dana yang dialokasikan untuk program/kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Kami kurang tahu betul,yang dulu karena kebetulan yang SMP perlu konfirmasi ke Kepala SMP.tidak hapal betul
12	Bagaimana prediksi anda tentang kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Kalau Kekuatan dana karena semua ditopang oleh pemerintah melalui dana BOS tentu kekuatan dana maksimal regular, BOS pendamping,juga BOS buku dan BOS untuk anak-anak miskin Bea Siswa Miskin (BSM).
13	Metode apa yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Menggunakan metode istilahnya pendekatan persuasif, metode ceramah melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di kecamatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
14	Bagaimana tingkat intensitas komunikasi yang dilakukan?	Komunikasi timbal balik antara pemangku kepentingan, dalam hal ini kami Dikpora, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, mengkomunikasikan secara formal, lewat non formal, melalui media di desa seperti pengajian, salapanan desa.itu sebagai media untuk melaksanakan
15	Bagaimana pemantauan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec.Margasari, Kabupaten Tegal?	Pemantaauan bersifat insiden, minimal itu satu kali dalam satu semester, kami memantau pada Kejar Paket B dan SMP Terbuka
16	Sejauh manakah komunikasi telah dilakukan agar tujuan dan sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec.Margasari, Kabupaten Tegal sampai kepada kelompok sasaran (target group)?	Jadi kami laksanakan sesuai dengan juknis, kami sampaikan ke kelompok,yang mengikuti kegiatan tadi termasuk di dalamnya ke orang tua dan peserta didik sendiri
17	Sejauhmanakah para implementor memiliki kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan?	Cukup bagus sesuai dengan bidangnya masing-masing, kalau misalnya kami di Dikpora, Penilik Luar Sekolah (PLS), Pengawas TKSD, dan para Kepala SD, di Kecamatan melalui rapat Kepala Desa dan dinas-dinas terkait
18	Siapakah yang bertanggung jawab dan kepada siapa, atas pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari?	Tanggung jawab secara struktural UPT Dikpora Kec Margasari dan Muspika Kec Margasari Kolektif semua unsur masyarakat yang ada di wilayah Margasari.
19	Apakah pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal dapat berhasil dengan tuntas paripurna (> 95%)?	Belum, masalahnya itu tadi ada daerah tertentu yang Sumber daya manusia masyarakat rendah, kalau sudah tamat SD dianggap cukup.karena masyarakat tertentu yang SDM masih rendah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
20	Apakah stakeholder mendukung pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Mendukung.
21	Siapa saja yang dimaksud dengan stakeholder tersebut?	Jajaran Dikpora, Penilik Luar Sekolah (PLS), Pengawas TK SD, Kepala SD intansi terkait, dan pihak Muspika.
22	Bagaimanakah bentuk dukungan stakeholder terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec.Margasari, Kabupaten Tegal?	Dalam bentuk itu secara teknis dan motivasi kepada masyarakat dan Peserta didik.
23	Seberapa besar kelompok kepentingan swasta dimobilisasi dalam mendukung atau menolak kebijakan?	Pada Prinsip memdukung hanya prosentasi relatif belum maksimal karena tergantung dengan bagaimana pihak Kecamatan yang bertanggung jawab mampu merangkul para swasta, ada dukungan tapi masih minim, sekitar 25%.
24	Bagaimana upaya pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran?	Meberikan kami memberikan informasi dan tanggung jawab moral kepada jajaran kami dan memberikan arahan pentingnya pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer jadi kepada pihak instansi–instansi sektoral untuk mengentaskan dan kami memberi masukan-masukan agar dalam peningkatan sumber daya manusia sesuai yang diharapkan untuk mengentas derajat tingkat pendidikan yang ada di Margasari.
25	Apakah para legislator sering diminta nasihatnya agar pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal dapat berhasil tuntas paripurna?	Kalau sering belum,tetapi bersifat insiden kami informasikan.dan secara umum memberikan dukungan karena ini merukan bagian dari tanggung jawab antara legislator dengan kami eksekutif
26	Faktor-faktor apa yang potensial mempengaruhi upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan?	1.Faktor geografis.kemudian faktor kepentingan individu. Dan ke-3. Faktor para pemangku kepentingan tadi untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
27	Apa yang menjadi ukuran dan penilaian tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Yang menjadi ukuran dan tingkat keberhasilan itu manakala Angka Putus Sekolah /Drop Out itu dapat diminimalkan taruhlah misalkan kemudian turun menjadi kurang dari 50% itulah tingkat keberhasilan masyarakat sadar belum menyangkut kualitas tapi kuantitas. Masyarakat sadar sebgai standard wajib belaja 9 tahun belum mencapai kualitas tapi kuantitas
28	Bagaimana upaya meningkatkan APK SMP/MTs pada tahun 2010?	Melalui rapat orang tua/wali murid yang dilaksanakan oleh setiap SD/MI agar anak-anak itu tanpa satu alasan apapun bisa melanjutkan tanpa alasan apapun bisa melanjutkan ke SLTP.
29	Bagaimana upaya menurunkan angka putus SMP/MTs pada tahun 2010?	Upaya yang dilakukan kami Menjaring anak-anak drop out melaluli kegiatan PLS pendidikan luar sekolah agar mereka mau melanjutkan minimal di Kejar Paket B.
30	Bagaimana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal akan diperbaharui berdasarkan pengalaman pelaksanaannya?	Ada, jenisnya mengadakan semacam aksi tentang kemampuan ketrampilan, anak-anak yang sudah mengikuti kejar paket B mempunyai daya tarik sendiri di PKBM buat kerajinan rotan, bambu dsb, disamping materi-materi akademik juga *life skill* (kecakapan hidup).
31	Bagaimana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan terutama pendidikan dasar? .	Upaya kami tetap berorientasi informasi dan mengarahkan tentang kepentingan pendidikan kepada masyarakat di pedesaan.
32	Bagaimana penguatan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan terutama pendidikan dasar?	Pemantauan kami laksanakan secara insiden, kemudian dalam rangka untuk pemerataan kami menginformasikan dan menjaring kepada desa yang masih tinggi tingkat drop outnya. Setalah kami menemukan kami jaring dan sosialisasikan untuk di pusatkan di wilayah kecamatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	Peneliti	Informan
33	Bagaimana tata kelola pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Jadi kami dalam menata kelola ini kami Koordinasi dengan UPTD SMPN I untuk tetap menyelenggarakan SMP Terbuka , yang tidak tercover di SMP Terbuka diarahkan ke Kejar Paket B melalui stakeholder PLS dan PKBM.
34	Sejauhmana akuntabilitas dan pencitraan publik terkait dengan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec.Margasari, Kabupaten Tegal?	Bagi yang sudah mengikuti dan merasakan itu cukup bagus menilai dari akuntabilitasnya karena unsur keterbuaan dikedepankan.
35	Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Jelas ada, jelas itu sumber daya khususnya sumberdaya orang tua dari sarana yang ada yang ketiganya faktor geografis jauhnya tempat tinggal siswa dengan sekolah lanjutan yang ada di Margarsari 3. .
36	Bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Kami kebetulan Tidak memiliki.
37	Apakah para implementor kebijakan memiliki disposisi yang baik, seperti komitmen, kejujuran,komunikatif, cerdik dan sifat demokratis?	Secara umum baik mendudukung pada kebijaksaan tadi.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Peneliti	Informan
38	Adakah prosedur operasi yang standar (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam setiap bertindak?	Ada.
39	Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten c.q. Kepala UPTD Dikpora Kec.Margasari/ Sekolah/ Masyarakat untuk mensukseskan dalam pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Pemerintah sudah yang bersifat membantu mendirikan SMP Terbuka , alternatif Kejar Paket B, dana BOS, pemerintah saat muncul untuk didirikan SMP satu atap tetap dipandang kurang efektif, sehingga untuk menuntaskan wajar dikdas sudah diprogramkan mendidirikan SMPN 4 di Jatilaba, karena ada kantong-kantong DO.
40	Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Dilakukan melalui sosialisasi di segala aspek kehidupan terutama melalui ormas-ormas yang ada dengan diimplementasikan melalui media seperti pengajian dan salapanan desa.
41	Sejauh mana derajat keterlibatan pada penerima program?	Secara umum menerima dengan baik sekalipun dalam teknis ditanggung oleh Dinas Dikpora.
42	Apa yang menjadi penyebab tamatan SD/MI tidak berminat mengikuti program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal	Faktor sumber daya manusia orang tua, faktor tingkat sosial ekonomi yang taraf kemakumaran dan kesejateraan relatif rendah, ada kecenrungan membantu orang tua.
43	Sejauh mana daya tampung pendidikan setingkat SMP/MTs di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Sebenarnya kalau melihat lembaga yang ada baik negeri /swasta cukup menampung lulusan SD/MI, hanya sebagian masyarakat Jatilaba mempercayai Sekolah Negeri sekolah idola, yang swasta kurang, tidak bonafid , sedang di planning SMPN 4.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Peneliti	Informan
44	Adakah Program Sarjana dan Pemuda Penggerak Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Belum pernah ada konfirmasi secara formal tidak ada.
45	Adakah Program Dharma Wanita Persatuan Penggerak Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Secara lintas sektoral ikut terlibat untuk memberikan dorongan dan informasi kepada warga di desa masing-masing.
46	Adakah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Belum , untuk PAUD ada, wajar dikdas belum.
47	Bagaimana upaya Dikpora membantu masyarakat pada lokasi yang secara geografis atau geologis menyebabkan anak yang berusia 13-15 tahun tidak dapat mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Jelas ada memfasilitasi berdirinya sekolah baru, yang akan datang tergantung renstranya diknas.
48	Bagaimana upaya Kepala UPTD Dinas Pendidikan Dan Olah Raga (Dikpora) Kec.Margasari membantu masyarakat yang patuh dan hormat terhadap tradisi yang melemahkan keinginan anak berusia 13-15 tahun untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Kami melalui pemberian informasi tentang bimbingan melalui pertemuan orang tua. Investasi di bidang pendidikan lebih bagus, akan menikmati tingkat kesejateraan lebih tinggi , orang pinter akan menikmati taraf hidup yang lebih bagus, akan menikmati hidup sejahtera dari pada orang bodoh.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Peneliti	Informan
49	Bagaimana upaya Kepala UPTD Dinas Pendidikan Dan Olah Raga (Dikpora) Kec.Margasari membantu masyarakat yang mengalami depresi budaya, yang karena malas belajar maka anak berusia 13-15 tahun tidak mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Melalui sosialisasi ke sek kpd wali murid pd ortu memberikan pencerahan manfaatnya menimba ilmu , merintis gerakan di Dukuh Tengah gerakan bersama mematikan TV (GEBERMAVI) pada jam 6-9 malam agar belajar konsentrasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 6:

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA MARNADI, S.PD, KEPALA SEKSI DIKDAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL TENTANG IMPLEMENTASI KIBAJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KABUPATEN TEGAL PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2010

No	Peneliti	Informan
1	Adakah permasalahan, kendala, kesulitan dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kab. Tegal? Apa saja?	Ada, diantaranya:1. kesadaran orang tua yang belum semuanya menyekolahkan anaknya SD sampai dengan SMP; 2. Belum adanya aturan yang mengikat untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan SMP.
2	Sejak kapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dicanangkan di Kab. Tegal?	Tahun 2006.
3	Apa yang menjadi dasar/landasan hukum pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2006.
4	Bagaimana sesungguhnya tentang konsepsi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu?	Bahwa setiap anak atau penduduk di Indonesia minimal bersekolah SD 6 tahun ditambah SMP 3 tahun.
5	Adakah prosedur operasional yang standar (POS) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam setiap bertindak	Ada, yaitu buku: Panduan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemetaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 2010.
6	Siapakah yang bertanggung jawab dan kepada siapa, atas pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal ?	Tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Tegal, tapi *leading*-nya Dinas Dikpora dan Kemendag.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
7	Bagaimana penentuan sistem pendataan dan pemetaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Pendataan setiap tanggal 31 Agustus, yang meliputi data usia anak, anak itu sudah sekolah dimana?
8	Bagaimana bentuk/ jenis pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Bagi anak-anak usia SD dan SMP di tampung di SD dan SMP, bagi yang belum ditampung di Kejar Paket B.
9	Bagimana penyuluhan dan publikasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu dilakukan?	Publikasi lewat Pengawas SD, Pengawas SD disampaikan kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah kepada Guru, Guru kepada masyarakat sekitar.
10	Sejauhmana ketersediaan sumberdaya bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Kalau di SD, Guru-guru SD, Sarjana Direkrut dan Guru-guru SD yang Sarjana diminta membantu di Kejar Paket B.
11	Apakah para implementor memahami sasaran, tujuan, dan isi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Memahami, karena sudah ada pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
12	Berapa dana yang dialokasikan untuk program/kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Tegal?	Rincinya tidak hafal, setiap tahun ada anggaran baik itu Kejar Paket A maupun Paket B.
13	Apakah kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal telah disosialisasikan?	Sudah, caranya kepada masyarakat, di Radio, Kepala Sekolah pada saat pengambilan raport, rapat orang tua di awal tahun ajaran baru. Disosialisasikan kepada masyarakat, wali murid SD, Lurah, Perangkat Desa dan pada saat musrembang.
14	Sejauhmanakah tingkat kepatuhan para implementor melaksanakan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	Bagus dari penyelenggaraan SD,SMP, SMP Terbuka berjalan baik, Kejar Paket B bagus.
15	Apakah stakeholder mendukung pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	Mendukung, Perangkat Desa, Lurah mendukung, warga yang belum sekolah di data dimasukkan Kejar Paket B, penjaga sekolah tamatan SD ditingkatkan kualifikasinya menjadi lulusan SMP, masyarakat industri yang anak-anaknya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		bekerja diberi kesempatan masuk Kejar Paket B dan dunia usaha juga mendukung.

No	Peneliti	Informan
16	Adakah kerjasama atau kordinasi dengan istansi lain dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	Dengan Kemenag, Pemerintah Desa, Badan Statistik.
17	Bagaimana upaya pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran?	Adakan sosialisasi tentang wajr dikdas, koordinasi dengan DPRD tentang wajar dikdas, minta anggaran diperbesar untuk wajar dikdas.
18	Faktor-faktor apa yang potensial mempengaruhi upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan?	Guru-guru sudah tersedia, jumlah siswa yang melanjutkan sekolah sudah terdata, jumlah SMP, juga pemetaan dari kecamatan mana yang lulusan SD yang tidak melanjutkan, kalau jumlah lulusan Sd banyak dan daya tampung sedikit, maka didirikan SMP Satu Atap.
19	Bagaimana upaya meningkatkan APK SMP/MTs pada tahun 2010 (tahun 2009:93,27%= Tuntas Utama)?	Pendirian- pendirian Sekolah Satu Atap, jejak anak lulusan SD walau anak itu pindah ke Jakarta tetap ada laporan dari SD.
20	Bagaimana upaya menurunkan angka putus SMP/MTs pada tahun 2010?	BOS regular, BOS pendamping untuk memenuhi kebutuhan individu anak, seperti tidak punya sepatu dibelikan sepatu, tidak punya tas dibelikan tas, bahkan membeli sepeda untuk transportasi, ada Bea Siswa Miskin (BSM).
21	Bagaimana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan terutama pendidikan dasar?	Pendirian SMP baru, SMP Satu Atap dalam rangka pemerataan, jika jauh dan sulit dariSMP didirikan SMP Satu Atap.
22	Bagaimana tata kelola pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	SD lulus baru didaftarkan ke SMP.
23	Sejauh mana akuntabilitas dan pencitraan publik terkait dengan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	Sangat bagus, ternyata yang mengikuti Kejar Paket B tidak hanya anak usia sekolah, tapi ada anak didik yang melebihi usia anak sekolah, bahkan penjaga, pesuruh ingin naik golongan ke 1b atau agar pensiun agak tinggi

UNIVERSITAS TERBUKA

		mengikuti Kejar Paket B.
No	Peneliti	Informan
24	Faktor-faktor apa yang menjadi kendala masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI belum mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kab. Tegal?	Yang menjadi kendala Wajar Dikdas diantaranya: "1. Kesadaran orang tua yang belum semuanya menyekolahkan anaknya SD sampai dengan SMP. 2. Belum adanya aturan sangsi tegas yang mengikat setiap warga negara agar sekolah sampai dengan SMP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 7:

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA SUDARTO, S.PD, KEPALA SMP NEGERI 2 MARGASARI KABUPATEN TEGAL TENTANG IMPLEMENTASI KIBAJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI MARGASARI KABUPATEN TEGAL
PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2010

No	Peneliti	Informan
1	Adakah permasalahan dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di SMP Negeri 02 Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal? Apa saja permasalahannya?	Secara umum relatif tidak ada, kalau toh ada permasalahan sesungguhnya terkendala oleh aturan, seperti contoh adanya pembatasan jumlah siswa dalam kelas, dalam PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru ketentunanya adalah 40 siswa, sehingga ketika mentukan kuota sekian, maka jumlah siswa yang diterima hanya sekian, padahal yang mendaftar melebihi, terpaksa ditolak, ketika anak ditolak ketika anak tidak tersalurkan di sekolah lain di situ timbul masalah tentang wajar dikdas 9 tahun.secara umum di SMP 2 tidak ada, sepanjang daya tampung mampu berarti kesempatan belajar bagi tamatan SD terbuka
2	Bagaimana sesungguhnya tentang Konsepsi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu?	Saya coba jawab pertanyaan ini secara umum tentang konsep kebijakan Wajib Belajar 9 tahun kami mengacu pada substansi pengertian Wajar 9 tahun yaitu bahwa Anak-anak Indonesia agar sepaya bisa mengenyam pendidikan minimal 9 tahun,dengan demikian kalau dikaitkan dengan jenjang pendidikan anak Indinesia diharapkan setelah lulus SD sekolah dasar kemudian bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Sehingga secara komulatif apabila tamat SMP maka anak-anak usia sekolah ini Telah melaksanakan wajib belajar 9 tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
3	Apakah Bapak dilibatkan dalam pendataan dan pemetaan dalam rangka menunjang pemantapan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kec, Margasari atau di Kab.Tegal?	Kalaau scoupenya wilayah Kec. Margasari barangkali terpengaruh oleh kedudukan saya bertugas sekarang di wilayah Margasari setelah mengalami mutasi diberbagai tempat saya selaku Kepala SMP 2 Margasari baru bertugas tiga tahun sehingga untuk kegiatan pendataan dan pemetaan ini tentu menjadi bagian dari lembaga dinas dikopra baik tingkat kecamatan maupun kabupaten yang mungkin kebetulan saja sudah dilaksanan tapi kebetulan saya belum bertugas di margasari tentunya kan secara umum kepentingan dikdas 9 tahun semua sekolah dalam hal ini kepala sekolah sangat berkompenten sehingga tentunya akan dilibatkan
4	Apakah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal telah disosialisasikan?	Untuk pertanyaan ini apabila berbicara tentang sosialisasi berpijak pada pihak yang berwenang yang berkompeten dikpora Itu ranah Dikpora, tapi kalau intern melalui jalur Komite Sekolah, dan langsung kepada kebijakan melalui Penerimaan Siswa Baru dengan membuka penerimaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kuota.intinya kami lebih kepada action
5	Apakah stakeholder mendukung pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal? Sejauh manakah dukungan stakeholder? Bagaimanakah bentuk dukungan stakeholder?	Dukungan stakeholder kami melihatnya dari sisi kondisi realita secara umum, Semua mendukung, sebagai contoh dari unsur Komite Sekolah, Orang tua murid , dan sudah barang tentu Pemerintah melalui program-program bantuan, misalnya bantuan Siswa Miskin (BSM), kemudian dari pemerintah daerah dana pendampingan BOS untuk membantu transport, transport sekolah bagi siswa miskin, muaranya adalah sukses wajar 9 tahun dengan sasaran siswa yang

UNIVERSITAS TERBUKA

		dikhawatirkan rentan untuk tidak bisa menyelesaikan pendidikan di SMP.
No	Peneliti	Informan
	Disamping BOS, BSM masih ada banyak bantuan apa saja?	Kebijakan lokal sekolah adanya pembebasan dari kewajiban-kewajiban keuangan. Yang secara nyata manfaat dua itu BSM, kemudian Bantuan siswa prestasi karena sasarannya jelas ke siswa
6	Sejauh mana kelompok kepentingan (stakeholder) terutama pihak swasta dimobolasasi dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut?	Selama ini kami belum pernah melihat ataupun bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka sukses wajar 9 tahun, barang kali secara umum lebih-lebih di daerah setingkat kecamatan untuk mengajak swasta berperan dalar wajar 9 tahun masih belum bisa
7	Adakah komunikasi dengan istansi lain dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal?	Ada yaitu melalui rapat koordinasi terutama dengan instansi terkait vertikal dalam hal ini yaitu Dikpora, secara incidental dengan pemerintah daerah setempat, secara fungsional adalah dengan instansi vertikal.
8	Faktor-faktor apa yang potensial mempengaruhi upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan?	Ini yang sangat mendasar adalah kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang tingkat SMP, terbukti dengan banyaknya calon murid pada penerimaan peserta didik baru sehinga sampai melebihi batas kuota.yaitu sebagai tanda kesadaran akan pentingnya pendidikan
9	Apa yang menyebabkan anak putus sekolah?	Yang perlu saya sampaikan dulu bahwa siswa SMP Negeri 02 Margasari itu latar belakang keluarganya itu dari kalangan menengah ke bawah yang ditandai dengan pekerjaan orang tua siswa sebagai adalah buruh tani dan bekerja di perantauan, hal itu menyebabkan atau berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi dari keluarga siswa maka diantara siswa SMPN 2 Margasari itu ada tidak berkumpul dengan orang tuanya karena ditinggal

UNIVERSITAS TERBUKA

		merantau. Dengan kondisi sosial ekonomi rendah mengalami kesulitan dalam pembiayaan, walaupun sudah
No	Peneliti	Informan
		sudah ada bantuan namun bantuan (insidental), bantuan sifatnya tidak terus menerus, maka kesulitan pembiayaan ini masih dialami, dengan kata lain penyebab drop out adalah faktor keluarga yaitu dari keluarga ekonomi miskin, yang kedua keluarga yang broken atau anak ditinggal oleh orang tuanya.
10	Bagaimana upaya menurunkan angka putus SMP pada tahun 2010?	Upaya agar anak tetap sekolah melalui pembinaan, komunikasi dengan pihak keluarga, tapi terkendala oleh ketidak hadiran otang tua, ketika diundang ke sekolah maka komunikasi putus, akibatnya anak dalam kondisi yang betul-betul sulit, sehingga anak tidak bisa melanjutkan sekolah alias drop out walaupun sekolah tetap mengusakan agar anak tetap sekolah dengan berusaha mendekatkan jarak sekolah dengan memindahkan anak ke sekolah terdekat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 8:

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA JUWAHIR DIRGAHAYU, S.PD, KEPALA SMP NEGERI 3 MARGASARI KABUPATEN TEGAL TENTANG IMPLEMENTASI KIBAJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI MARGASARI KABUPATEN TEGAL PADA TANGGAL 06 DESEMBER 2010

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Bapak menyadari/ memahami (maaf) di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dilaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ?	Memahami dan menyadari adanya kebijakan pemerintah melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
2	Adakah permasalahan dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari, Kabupaten Tegal? Apa saja permasalahannya?	Pasti ada, dari sekian anak yang masuk, ternyata jumlahnya sekian-sekian, ternyata setelah terserap di negeri ternyata tidak sepenuhnya data di SD dan setelah pengumuman penerimaan, lewat guru kami menggorek yang belum sekolah ternyata masih ada anak yang tidak sekolah dengan alasan ekonomi dan lain sebagainya, kami tarik dan kami ajak kesini, disuruh masuk tidak melalui penyaringan, mereka diberi pakaian, ada sekitar 12 anak tapi 3 mengundurkan diri karena kultur rumah tangganya, ekonomi, orang tua, broken home dan lokasi, ada yang 5 km jalan kaki, ada yang 7 km jalan kaki, ada yang 4 km jalan kaki, ada yang melewati 3 sungai.
3	Apa yang menyebabkan anak putus sekolah?	Faktor anak sendiri yang tidak mau sekolah, dorongan orang tua yang kurang, banyak anak-anak disini yang berlatar belakang broken home, artinya anak itu korban perceraian, ikut mbahnya dan kadang hidup sendiri, karena ikut mbahnya sehingga tanggung jawabnya kurang, komunikasi karena letak geografis yang jauh sudah miskin jauh, itu masalah klasik, masalah transport 5 km dari rumah ke jalan raya baru naik angkot.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
4	Bagaimana upaya menurunkan angka putus sekolah SMP?	Memberikan motivasi kepada siswa, memberikan bantuan transport, bea siswa dan bantuan-bantuan lain yang bisa diusahakan sekolah.
5	Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan terutama dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Sosialisasi lewat komite, siwa, masyarakat pada pertemuan dengan orang tua, pada rapat dewan guru tentang sosialisasi kesadaran wajib belajar, karena memasuki era global minimal SMP, karena di dunia kerja atau dunia lainnya untuk jadi supir Sinar Jaya saja minimal berijazah SMP sehingga mereka menyadari arti pentingnya ijazah SMP dalam dunia kerja.
6	Bagaimana usaha Sekolah membantu masyarakat pada lokasi yang secara geografis menyebabkan anak yang berusia 13-15 tahun dapat mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Memberikan bantuan transport bagi anak-anak yang jauh tapi miskin baik dari BOS atau BOS pendamping, karena wilayahnya pegunungan disini tidak ada yang pakai sepeda, ada gagasan untuk beli perahu untuk penyeberangan karena ada peserta didik yang harus menyeberangi 3 sungai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 9: Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Dinas Dikpora Kab. Tegal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika sudah, jika sudah melalui apa informasi-informasi terbeut diberikan?
2. Apakah Dinas Dikpora Kab.Tegal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk juknis atau juklak mengenai apa yang harus dilakukan oleh UPT Dikpora Kec.Margasari untuk melalukan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika sudah begaimana kejelasan juknis dan juklak tersebut.
3. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari secara kuantitas mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahaanya?
6. Bagamana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? apakah jumlahnya mencukupi dan dari mana alokasi anggaran itu diperoleh?
7. Bagaimana dengan konisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
8. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
9. Bagaimana dengan tranparansi pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Apakah ada laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
10. Apakah unit organisasi pelaksana wajar dikdas memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
11. Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjaliundengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
12. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 10:

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN WARTONO, S.PD, KEPALA UPTD DIKPORA KECAMATAN MAARGASARI TENTANG KIBAJAKAN WAJIN BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2010

No	Peneliti	Informan
1	Apakah Dinas dikpora Kab. Tegal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Wajar Dikdas? Jika sudah melalui apa informasi-informasi terbeut diberikan? Sudah, informasinya itu melalui rapat koordinasi ditingkat kecamatan di tingkat kecamatan secara lintas sektoral, sesudah itu baru mengundang tokoh masyarakat melalui komite sekolah yang pada saat itu bernama BP3, hal itu sudah lama disosialisasikan.	Sudah, informasinya itu melalui rapat koordinasi ditingkat kecamatan di tingkat kecamatan secara lintas sektoral, sesudah itu baru mengundang tokoh masyarakat melalui komite sekolah yang pada saat itu bernama BP3, hal itu sudah lama disosialisasikan.
2	Apakah Dinas Dikpora Kab.Tegal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk juknis atau juklak mengenai apa yang harus dilakukan oleh UPT Dikpora Kec.Margasari untuk melakukan implementasi kebijakan Wajar Dikdas? Jika sudah begaimana kejelasan juknis dan juklak tersebut.	Sudah, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan hampir sama dengan Permendiknas nomor 35 tahun 2006 disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,hanya evaluasinya belum.
3	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik? .	Kalau saya cermati itu fivety-fivety artinya belum sepenyuhnya optimal,jadi koordinasinya berjalan, merealisasikannya itu belum sepenuhnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Peneliti	Informan
4	Apakah SDM pelaksana kebijakan Wajar Dikdas di Kec. Margasari secara kuantitas mencukupi?	Belum, belumnya: 1. dari garis koordinasi, struktur belum jelas; 2.Personalianya belum jelas, aksinya belum muncul secara gerakan bersinergi, kesannya seolah itu tertumpu pada dinas Dikpora, dinas Dikpora masih mengacu pada yang formal, yang nonformal merupakan bagian yang diselesaikan seperti kejar Paket B.
5	Apakah SDM pelaksana kebijakan Wajar Dikdas di Kec.Margasari secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahaanya?	Belum, kelemaahannya : 1. Dari sisi tenaga tutor kadang- kadang sulit mencari; 2. Jangankan secara kualitas, kuantitaspun masih belum banyak diharapkan, karena kantong-kantong drop out itu kadang-kadang banyak alasan yang klasik yaitu factor sosial ekonomi, contoh di Desa Jatilaba, kami kondisikan Paket B, tapi respon mereka mengatakan sekolah Paket B itu sekolah apa?
6	Bagamana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas ? apakah jumlahnya mencukupi dan dari mana alokasi anggara itu diperoleh?	Kalau kejar Paket B itu normatif, artinya dana cukup, Tutor ada honornya, sarana juga ada, dana dari pusat, pakaian juga dapat.
7	Bagaimana dengan konisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?	Belum memadai, pertama masalah media pembelajaran, kalau sekolah regular SMP misalnya IPA ada laborat, Paket B teori semua.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Peneliti	Informan
8	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas ? apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.	Mendukung, alasannya pertama agar anak-anak usia sekolah dalam target wajib belajar 9 tahun jangan sampai gagal, warga Negara kita teretas dari pendidikan 9 tahun. Dukungan kami diantaranya memperbaiki sistem, Camat harus membangun garis koordinasinya harus diperbaiki, masih banyak masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah tidak sempat tercover, walaupun sekarang ada BOS.
9	Bagaimana dengan tranparansi pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas? Apakah ada laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?	Kalau kejar Paket B laporan persemester dalam bentuk SPJ tentang penggunaan dana bantuan dan administrasi tes, nilai dan sebagainya dikirim ke Kabupaten dan lalu ke Propinsi.
10	Apakah unit organisasi pelaksana wajar dikdas memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?	SOP ada, setiap seksi-seksi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.
11	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas? (terkait dengan jawaban informan nomor 10, peneliti tidak bertanya nomor 11).	-
12	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan wajar dikdas ? jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaan-nya sudah sesuai aturan yang ada?	Juknis juklak sudah ada tetapi pelaksanaanya belum sepenuhnya dilaksanakan; awalnya dari koordinasi, penanggung jawab tingkat kecamatan, ketika ada mutasi Camat tentu ada sertijab yang perlu ada memori, tetapi selama ini tidak tahu persis.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 11:
TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA ABUSERI, S.IP, CAMAT MARGASARI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL PADA TANGGAL 09 NOPEMBER 2010

NO	Peneliti	Informan
1	Bagaimana dengan Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) dalam struktur organisasi GNP-PWB?	Kangge Tim Koordinasi Wajib Belajar 9 Tahun langkung detil niko Dikpora, ngaten langkung detil, nanging koordinasi kita biasanya ya tetap dilibatkan karena didalam struktur mungel mekaten, umpami jenengan madosi data secara rinci mangke wonten dinas teknis Dikpora Pak Wartono, kalau kebijakan se-kebijakan cara umum camat, sepanjang kita tahu ngaten kita sampaikan Pak Taufik
2	Apakah Dinas Dikpora Kab. Tegal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika sudah melalui apa informasi-informasi terbeut diberikan?	Pemerintah Pusat melalui pemerintah Daerah, ya kebijakan-kebijakannya sudah dilontarkan melalui surat, maupun rapat koordinasi secara umum seperti itu , termasuk pemerintah kabupaten menggratiskan wajib belajar 9 tahun dari mulai SD sampai dengan SLTP
3	Apakah Dinas Dikpora Kab.Tegal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk juknis atau juklak mengenai apa yang dilakukan oleh UPT Dikpora Kec.Margasari untuk melalukan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika sudah begaimana kejelasan juknis dan juklak tersebut?	Yang jelas itu Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Dikpora itu sudah memberikan juklak juknisnya, namun juklak juknis secara rinci ya lewat jalur sektoralnya dari mulai Dikpora Kabupaten melalui jalur ke bawahnya secara formal yaitu Dikpora Kecamatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NO	Peneliti	Informan
4	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?	Yang jelas karena itu program Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau melalui Pemerintah daerah masing-masing bidang/masing-masing bagian sudah terkoordinasi dengan baik termasuk pelaksanaanya juga berjalan dengan baik ini ternyata tidak kendakala selama ini tidak ada kendala-kendala yang menonjol. lancar
5	Apakah SDM pelaksana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kec. Margasari secara kuantitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahaanya?	Secara kuantitas untuk wajib belajar yang jelas itu pengamatan kami mencukupi/ memadai. Apabila menjumpai ada kekurangan – kekuraangan biasanya melalui bintek bimbingan teknis. Dulu memang pernah diadakan insya Allah semacam Bimbingan teknis dari Camat dan Kepala SLTP itu di Yogya pernah yang berkaitan dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, Kepalanya Pak Diyono, termasuk Dikpora.
6	Bagaimana tentang GN-OTA di Kecamatan Margasari?	GN-OTA itu berjalan di tingkat kecamatan, namun tidak sesuai harapan atau belum sesuai harapan, karena kepedulian-kepedulian mereka-mereka belum secara keseluruhan tersentuh, walaupun kita lewat forum-forum tertentu,rapat koordinasi, salapan desa dan pengajian.sering kita lontarkan namun belum sesuai dengan harapan kami.

UNIVERSITAS TERBUKA

NO	Peneliti	Informan
7	Apakah organisasi GN-OTA pernah terbentuk?	Organisasinya pernah terbentuk nanti strukturnya dicari di seketariat ada di kecamatan pada Pak Sek, nanti Kasi Kesos yang menangani
8	Bagamana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? apakah jumlahnya mencukupi dan dari mana alokasi anggara itu diperoleh?	Anggaran yang lebih tahu Pak Wartono aja walaupun tahu gambaran
9	Bagaimana dengan konisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?	Ya jadi untuk sarana prasarana sudah, yang belum yang berkaitan dengan buku-buku yang litaraturnya disuguhkan untuk itu.
10	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.	Yang jelas aparat di kecamatan Mendukung, alasannya pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua itu jelas mengena pada sasaran anak usia wajib belajar yang semula DO (*Drop Out*) nya SD bisa sampai ke SLTP. Sehingga mereka-mereka pengetahuannya lebih meningkat.

UNIVERSITAS TERBUKA

NO	Peneliti	Informan
11	Bagaimana pemahaman Bapak secara umum tentang kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang menjadi tanggung jawab Bapak untuk mengimpelmentasikannya? Jika belum paham, hal-hal apa saja yang belum Bapak pahami?	Secara umum ya kami jelas mendukung hal itu, agar masyarakat tahu, mengerti,atau paha setiap momentum mensosialisasikan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga desa yang ada, tokoh-tokoh masyarakat yang termasuk , ulama-ulama setenpat.kemudian secara umum seperti itu kemudian tentunya secara teknis mungkin tidak tahu secara keseluruhan, kita tahu secara umum
12	Apakah Bapak memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Jika ya, jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan?	Yang jelaskita memiliki komitmen, kemudian buktibukti apa komitmen terwujud yang jelas dalam bentuk kaitanyanya dengan kelancaran dalam pembelajaran, itu kita sering membahas permasalahan-permasalahan yang ada.dikandung maksud itu biar program tersebut itu berjalan dengan lancar sesaui dengan yang kita diinginkan
13	Bagaimana dengan tranparansi pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun? Apakah ada laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?	Laporan secara periodik dari teknis Dikpora ke kmi itu diadakan setiap bulan sekali, tapi pada saat itu itu saja, sementara ini agak tersendat.laporanya sehingga untuk kami apabila mungkin kita membutuhkan data dalam rangka pemutahiran data, kami jemput bola.
14	Bagaimana dengan Tim Koordinasi Desa (TKD), apa pernah diadakan koordinasi dengan Kepala Desa terkait Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?	Kalau koordinasi otomatis, katakanlah program kemudian masing-masing desa ada TKD, cuman TKD belum bisa berjalan sesuai dengan harapan, jadi ada yang aktif, adanaya kurang aktif, sedang-sedang saja, kalau ada gerakan baru kiprah.

Lampiran 12:

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA KEPADA GURU SD KELAS VI, KEPALA SD, GURU BP/BK SMP, TOKOH MASYARAKAT DAN KASI DIKDAS DINAS DIKPORA KAB.TEGAL TENTANG KENDALA WAJIB BELAJAR DI WILAYAH KECAMATAN MARGASARI

No	Nama yang diwawancarai	Waktu	Hasil wawancara	Keterangan
1	Suherman, S. Pd	20-Nop-2010	Ada beberapa faktor penyebab anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP yaitu: ingin masuk SMP Negeri tapi tidak diterima; masalah ekonomi orang tua, utamanya ekonomi; rata-rata anak-anak Jatilaba di rumah dengan mbahnya (nenek atau kakeknya); mereka rata-rata anak seorang janda, jauhnya tempat tinggal (Jatilaba) dengan SMP Negeri yang berlokasi di Desa Margasari sekitar 5 KM; orang tua mereka bercerai; kesadaran pendidikannya orang tua mereka masih rendah, ketika seorang guru mendatangi orang tua yang anaknya tidak sekolah ternyata perhatian orang tua terhadap anaknya yang tidak sekolah rendah. Sedangkan di Desa Margaayu faktor penyebab anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP ialah orang tua yang mencari penghidupan di daerah trasmigrasi, orang tua yang menjadi Tenaga Kerja di Luar negeri (TKI) dan anaknya ikut neneknya, juga faktor transportasi yang menjadi beban berat karena harus menyediakan ongkos setiap harinya. Di Desa Kalisalak faktor penyebabnya adalah banyak anak disuruh orang tuanya mengembala sapi dan orang tua berpendidikan rendah yang menyebabkan kesadaran akan pendidikan rendah.	Kepala SDN Jatilaba 01

No	Nama yang	Waktu	Hasil wawancara	Keterangan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	diwawancarai			
			Di desa Prupuk Utara banyak anak tidak sekolah SLTP dikarenakan ikut menjadi pedagang asongan di Kereta Api dan di Panorama tempat pemberhentian bis.	
2	Parwiti S. Pd.	20-Nop-2010	Sebab lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP rendahnya kemampuan untuk membiayai kebutuhan penunjang seperti ongkos transportasi dan uang saku, kemudian bagi anak puteri lebih memilih bekerja untuk membantu orang tua, seperti tetangganya yang bekerja di Jakarta.	Guru Kelas VI SDN Jatilaba 01
3	Setiya, SPd.	27-Nop-2010	Ada 7 anak yang tidak melanjutkan ke SLTP. Mengapa lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP menurut analisa kami faktor utama yang mereka sampaikan, kebanyakan dikarenakan alasan ekonomi walaupun bahwa SLTP pendidikan dasar yang bebas dari biaya, tetapi menurut mereka pendidikan tetap memerlukan biaya, mereka merasa tidak mampu, mereka tidak melanjutkan, mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja untuk membantu orang tua. Bukan mereka mau tidak mau pinter. Padahal melihat nilai mereka nilainya di atas rata-rata, mereka bisa masuk di Sekolah Margasari, karena NEM/ UASBN anak-anak peringkat ke tiga se kecamatan.	Guru Kelas VI SDN Prupuk Selatan 04

No	Nama yang	Waktu	Hasil wawancara	Keterangan

UNIVERSITAS TERBUKA

	diwawancarai			
4	Wahyudin, S. Pd	20-Nop-2010	Ada 4 SD di Desa Jatilaba, tapi banyak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP dan sangat memprihatinkan dikarenakan secara geografis/lokasi cukup jauh dari lokasi sekolah SLTP, masyarakatnya termasuk desa IDT, masyarakat berpenghasilan dari sektor pertanian yang tidak menetap/cukup, 75% masyarakatnya petani, tingkat kesadaran pendidikan rendah sebagai efek dari masyarakat yang berpenghasilan rendah, masih adanya pomeo "sekolah buat apa, toh nantinya di dapur kemudian mau jadi apa", faktor geografis yang jauh dari lokasi sekolah, bersekolah bukan masalah gratisnya tetapi masalah kebutuhan sehari-hari misalnya untuk transportasi asumsinya sehari Rp5000,- 30 hari sudah Rp 150.000,- , bagaimana untuk makan saja masih kurang.	Sekretaris Desa Jatilaba/ Tokoh Masyarakat
5	Sujono, AmPd..	20-Nop-2010	Banyak lulusan SD Jatilaba tidak melnajutkan ke SLTP dikarenakan anak membantu orang, terutama anak perempuan bekerja ke Jakarta, jauhnya tempat ke lokasi sekolah mereka tidak keberatan bayar sekolah tapi yang berat ongkos harian Rp 5000,-	Kepala SDN Jatilaba 04
6	Teguh Setiaadi, S. Psi,	06-Peb-2011	Penyebab anak putus sekolah karena pengaruh teman- sebaya yang tidak bersekolah dalam lingkungan tempat tinggalnya. Bermula dari sering tidak masuk, dan ahirnya putus sekolah atau drop out. Juga pengaruh orang tua yang bercerai, anak terlantar ikut nenek dan dengan kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua menyebabkan anak putus sekolah.	Guru BP/BK SMPN1 Margasari

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Nama yang diwawancarai	Waktu	Hasil wawancara	Keterangan
7	Sukadarini	19-Nop-2010	Anak putus sekolah ada 22 anak dalam periode 3 tahun, siswa keluar karena berat ongkos hariannya, rumahnya jauh dari sekolah, juga kerena lingkungan dimana teman-temannya tidak sekolah, dan orang tuanya broken home.	Guru BP/BK SMP Bakti Praja Margasari
8	Dra. Endang Marhaeni	27-Nop-2010	Mengapa banyak anak putus sekolah hal itu dikarenakan rata–rata disebabkan oleh faktor intern (anak sendiri) dan faktor ekstern (lingkungan keluarga), rata-rata anak disini dititipkan ke tetangga atau ke mbahnya sehingga anak kurang perhatian, tidak ada monitor orang tua, sehingga anak malas, BK panggil orang tua tapi yang datang saudaranya. BK home visit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, ternyata bukan masalah ekonomi. Adakan konferensi kasus yang hasilnya anak mengundurkan diri. Memindahkan ke sekolah lain harus tetap sekolah.	Guru BP/BK SMPN 2 Margasari
9	Marnadi, S. Pd.	29-Des-2010	Yang menjadi kendala wajar dikdas diantaranya: 1. Kesadaran orang tua yang belum semuanya menyekolahkan anaknya SD sampai dengan SMP. 2.Belum adanya aturan sangsi tegas yang mengikat setiap warga negara agar sekolah sampai dengan SMP.	Kasi Dikdas Dinas Dikpora Kab.Tegal

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 13:

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI, KABUPATEN TEGAL

Nara Sumber : Kasubdit Program - Direktur Pembinaan SMP- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar - Kemendiknas

Hari/Tanggal : 22 September 2011

1. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
2. Bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan? Metode yang digunakan? Intesitas komunikasi?
3. Bagaimana kemampuan implementor? Tingkat pendidikan? Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program? Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan?
4. Berapa dana/pembiayaan yang dialokasikan untuk program/kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di setiap kecamatan?Kabupaten?Propinsi? Nasional?
5. Bagaimana prediksi anda tentang kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di setiap Kecamatan, Kabupaten, Propinsi? Nasional?
6. Bagaimana tingkat komitmen, kejujuran dan demokratis implementor?
7. Bagaimana dengan kersediaan SOP yang mudah dipahami?
8. Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana? Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat merespon perkembangan program!
9. Apakah meningkatnya persentase peserta didik SMP/MTs/pendidikan yang setara terhadap penduduk usia 13-15 tahun (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir Tahun 2008 tercapai?
10. Apakah menurunnya angka putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% dan SMP/MTs/ pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% tercapai?
11. Apakah terlengkapi sarana dan prasarana pendidikan sehingga 75% 75% SMP/MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan?
12. Bagaimana strategi pelaksanaan GNP-PWB?
13. Bagaimana organisasi dan tata kerja GNP-PWB?
14. Bagaimana tahapan pelaksanaan GNP-PWB?
15. Bagaimana mekanisme pelaksanaan GNP-PWB?
16. Bagaimana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan?
17. Adakah komunikasi dengan istansi lain dalam rangka mensukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
18. Adakah kerjasama atau kordinasi dengan istansi lain dalam rangka mensukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
19. Bagaimana upaya pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

20. Apakah para legislator sering diminta nasihatnya agar pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat berhasil dengan tuntas paripurna (> 95%)?
21. Sejauh manakah pemahaman terhadap sasaran dan tujuan kebijakan antara perencana dengan pelaksana, maupun antara perencana dan pelaksana dengan kelompok sasaran?
22. Faktor-faktor apa yang potensial mempengaruhi upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan?
23. Apa yang menjadi ukuran dan penilaian tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
24. Bagaimana upaya meningkatkan APK SMP/MTs pada tahun 2011
25. Bagaimana upaya menurunkan angka putus SMP/MTs pada tahun 2011?
26. Bagaimana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan terutama pendidikan dasar?
27. Bagaimana penguatan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan terutama pendidikan dasar?
28. Bagaimana upaya peningkatan mutu relevansi dan daya saing pendidikan terutama pendidikan dasar?
29. Sejauh mana akuntabilitas dan pencitraan publik terkait dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
30. Adakah kendala sumber daya baik manusia, finansial, atau metode?
31. Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
32. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang tamatan SD/MI belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
33. Strategi apa saja yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
34. Bagaimana struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
35. Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana?
36. Apakah para implementor kebijakan memiliki disposisi/karakter yang baik, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis?
37. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah c.q. Direktur Pembinaan SMP untuk mensukseskan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
38. Sejauhmana efektifitas Program Sarjana dan Pemuda Penggerak wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ?
39. Sejauhmana efektifitas Program Dharma Wanita Persatuan Penggerak wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
40. Sejauhmana Efektifitas Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
41. Bagaimana paket kelompok belajar (kejar) B setara SMP ikut menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
42. Bagaimana SMP Terbuka terkait pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43. Bagaimana upaya Pemerintah dalam hal ini …membantu masyarakat pada lokasi yang secara geografis atau geologis menyebabkan anak yang berusia 13-15 tahun tidak dapat mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
44. Bagaimana upaya Pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga anak yang berusia 13-15 tahun tidak dapat mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
45. Bagaimana upaya Pemerintah membantu masyarakat yang patuh dan hormat terhadap tradisi yang melemahkan keinginan anak berusia 13-15 tahun untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
46. Bagaimana upaya Pemerintah membantu masyarakat berpendidikan rendah sehingga anak berusia 13-15 tahun tidak mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
47. Bagaimana upaya Pemerintah membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam, musibah atau konflik sehingga anak berusia 13-15 tahun tidak mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
48. Bagaimana upaya pemerintah membantu masyarakat yang mengalami depresi budaya, yang karena malas belajar maka anak berusia 13-15 tahun tidak mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
49. Bagaimana upaya Pemerintah membantu masyarakat di kawasan industri atau perkebunan atau pertanian yang kurang tertarik mengikuti pendidikan sehingga anak berusia 13-15 tahun tidak mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?
50. Bagaimana kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan diperbaharui berdasarkan pengalaman pelaksanaannya?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 14:

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA KEPADA DRS HADIYANTO, M.ED MEWAKILI MUMUNG BASTAMAN, M.Si KASUBDIT PROGRAM - DIREKTUR PEMBINAAN SMP- DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN SMP – KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN. PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2011

NO	Peneliti	Informan
1	Memberikan daftar pertanyaan seperti pada lampiran 13	Ini kalo menjawab pertanyaan sebanyak ini ndak mungkin, kalo kita beri dokumen aja, kita beri dokumen kemudian nanti bapak dari dokumen itu bisa kemudian kejawab pertanyaan-pertanyaan ini, siapakah implementator ini saya kira ada, Bapak sudah punya Inpres No 5, Per Men Nomor 35, dari situ kan tau kan siapa yang harus melakukan, yang dari Menko Kesra itu Per Menko Kesra No.22 Tahun 2006
2	Mengenai dana, di Inpres ada persentase, berapa dana/ pembiayaan yang dialokasikan untuk program/kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di setiap kecamatan?Kabupaten?Propinsi? Nasional?	Kalau dana gak bisa, kalau perkiraan kalau dana secara rinci tidak bisa, acara apa ya? Tanya pada temannya, acara lauching sosialisasi oleh menteri tahun 2008 kemudian peneliti diberi majalah pelangi, ini banyak informasi tentang wajib belajar. Tahun 2008 launching itu untuk percepatan. Kalau dana kita sudah melakukan banyak sekali misalnya kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat itu untuk melakukan sosialisasi Wajib Belajar ke kabupaten-kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NO	Peneliti	Informan
3	Di Kab. Tegal Kec. Margasari ketika mencari Struktur Organisasi tentang contoh Tim Koordinasi, kami mencari dukumentasinya tidak mendapatkan	Kita tidak tahu , karena di Menko Kesra ada disebutkan Tim Nasional Tim Propinsi tim Kabupaten minimal di Tim Kabupaten, kalau sampai di kecamatan belum tentu membentuk dan itu sudah tanggung jawab mereka masing-masing. (Infoman sambil membuka Buku Wajib Belajar) untuk kecamatan tertentu, di Kabupaten juga tertentu ada tim yang pernah bekerja tim yang terdiri pemuda ... di situ, ini KKN, ini yang kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan ini dibeberapa kabupaten, ini kabupaten Tegal Cuma tidak teridentifakasi di kecamatan mana (kemudian peneliti diberi Buku Wajib Belajar)
4	Mengenai sumber daya mengenai Wajib Belajar yang mengimplentasi di tingkat pusat seperti yang tertuang pada Inpres No. 5 atau Permendiknas	Kalau yang melakukan yang itu yang Permen 35, itu timnya Tim implementor yang secara Nasional, Permendiknas, kalau di Kabupaten seperti apa? itu yang membentuk Kabupaten
5	Monitor dari Pusat ke Kabupaten apalagi tingkat Kecamatan bagaimana?	.Kalau secara umum nasional itu kita tanya misalnya pada saat work shop- work shop di tingkat provinsi atau kabupaten itu terkait berapa Angka Partisipasi Kasar masing-masing itu, kemudian setelah melihat Angka Partisipasi Kasar seperti itu kemudian apa yang dilakukan? Tapi secara khusus bahwa kita punya kerjasama dengan tim perguruan tinggi atau orgnisasi kemasyarakatan atau Dharma Wanita itu di tiap-tiap kabupaten yang memperoleh bukan memperoleh yang ada Tim Nasional yang bekerja di situ menjelang akhir kegiatan itu kita

UNIVERSITAS TERBUKA

NO	Peneliti	Informan
		melakukan kita mengadakan seminar dan lokakarya tentang penuntasan Wajib Belajar. Kalau ada. Kalau tidak ada monitringnya ya secara umum aja bahwa di tingkat kabupaten itu Angka Partisipasi Kasarnya seperti apa? Dengan APK tertentu kita melakukan langkah-langkah misalnya Kabupaten tertentu APK rendah dengan APK rendah perlu Unit Sekolah Baru mungkin penambahan Paket A Paket B penyebaran SD-SMP Satu Atap itu termasuk SMP Terbuka Pentyebaran SD-SMP Satu Atap itu pasti mempertimbangkan AKP dari masing-masing, indikator utamanya itu tetap APK
6	Sampai akhir tahun 2011 adakah evaluasi dari kebijakan, apa ada pembaharuan atau perbaikan?	Sebenarnya menurut Inpres itu target nasional yang dikatakan tuntas untuk SMP APK mencapai 95% pada akhir tahun 2008 nah kita tahun2008 terakhir 2008 sudah mencapai lebih 95% secara nasional jadi artinya secara nasional tuntas kalau sekedar mengikuti Inpres itu saja itu berarti jadi artinya seolah–olah tugas secara nasional sudah selesai tapi kita tidak seperti itu, cuma frekuensi kegiatan atau program-program di direktorat SMP ini itu sudah menurun untuk kaitannya dengan penuntasan wajib belajar ,menurun dalam artian kalau dulu sebelum mencapai 95% itu dalam satu tahun membangun USB jatah 200 lebih, tapi setelah tuntas ya artinya karena wajar terkait akses penekanannya kegiatan bukan pada akses setelah tahun 2009 atau mulai tahun 2009 terkait dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

NO	Peneliti	Informan
		meningkatkan mutu, semangat untuk menuntaskan wajib belajar dari sisi akses mencapai puncaknya pada tahun 2009 tapi setelah secara nasional dinyatakan tuntas dengan melihat APK 95% lebih dari target maka penuntasanya pada peningkatan mutu, makanya kemudian penuntasan wajib belajar pada penuntasan wajib belajar yang bermutu

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 15: Jumlah Siswa, Tenaga Pendidik,Guru Pamong, Dan Tenaga Kependidikan SMP Terbuka Margasari Tahun Pelajaran 2010/2011

Jumlah Siswa SMP Terbuka Margasari Tahun Pelajaran 2010/2011

No.	Nama TKB	Kelas 7			Kelas 8			Kelas 9			Jumlah		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kalisalak	3	3	6	1	-	1	2	3	5	6	6	12
2	Margasari	2	3	5	-	1	1	-	3	3	2	7	9
3	Pakulaut	5	-	5	-	-	-	2	4	6	7	4	11
4	Prupuk	-	-	-	1	1	2	4	-	4	5	1	6
5	Wanasari	2	1	3	-	-	-	3	-	3	5	1	6
Jumlah		12	7	19	2	2	4	11	10	21	25	19	44

1. Guru Bina

No.	Nama Guru	Jenis Kelamin		Latar Belakang Pendidikan	Mengajar Mata Pelajaran
		L	P		
1	Agus Karsono, SPd	v		S1-BK	Penjasorkes
2	Nurakhmat,SPd	v		SI-B.Ind	Bhs. Inggris
3	Agus Budiyanto, SPd	v		SI-B.Ind	Bhs. Indonesia
4	Agus santoso, SPd	v		S1-IPS Sej	IPS
5	Sri Sukiyanti, SPd		v	SI-B.Ind	Bhs.Indonesia
6	Dwi Widayanti, SPd		v	S1-B.Ingg	Bhs.Inggris
7	Moch.Kapsin A., SPd	v		S1-BK	Seni budaya
8	Dra. Muji Asri		v	S1-PPKn	PKn
9	Agus Ali Humaidi, Sag	v		S1-PAI	PAI

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2.Data Guru Pamong

No.	Nama Guru Pamong	Jenis Kelamin		Latar Belakang Pendidikan	Pekerjaan di luar sebagai GP
		L	P		
1	Rina Mulati		v	S1-Ekon akuntansi	Guru SMP
2	Anik Sulistyani,S.Pd		v	S1-Matematika	Guru SMP
3	Sigit Probojati Siwi H,S.Pd	v		S1-IPS Geografi	Guru SMP
4	Ahmad Cahyono,S.Pd	v		S1-Matematika	Staf TU
5	Siti Rochmanika,S.Pd.		v	S1-Biologi	Guru SMP

3.Tenaga Kependidikan (Pegawai Tata Usaha, Teknisi, Petugas Perpustakaan, Penjaga Sekolah, dan Pesuruh)

No.	Nama Guru Pamong	Jenis Kelamin		Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
		L	P		
1	URIP ARTIKAH		v	SMK	Tata Usaha (Bendahara)
2	AJI KUWATNO	v		SMA	Staf Tata Usaha
3	SUMARTO	v		SMP	Pesuruh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 16: Daftar Peserta Didik, Tutor/Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Paket B Baru "Tunas Bhakti" Kelas VII PKBM Setia Bhakti Margasari Tahun 2010

1. Peserta Didik

No	Nama Peserta Didik	Tempat lahir	Tgl lahir	L/P	Thn Lulus SD	Tahun Masuk Setara
1	Linda Astuti	Tegal	10-09-1994	P	2008	2007
2	Rismita Dwi Wulandari	Tegal	17-08-1994	P	2008	2007
3	Apipudin	Tegal	27-11-1994	L	2008	2007
4	Alian Prasetyo	Tegal	06-10-1946	L	2009	2007
5	Tita Eka Maryana	Tegal	29-05-1997	P	2009	2007
6	Ali Sakidin	Tegal	03-01-1995	L	2009	2007
7	Santi Lusianingsih	Tegal	13-02-1992	P	2007	2008
8	Ahmad Saepul Amin	Tegal	20-09-1990	L	2007	2008
9	Eko Prasetyo Wibowo	Tegal	02-08-1987	L	2004	2008
10	Sinta Dwi Jayanti	Tegal	12-04-1991	P	2000	2008
11	Nurkholik	Tegal	09-10-1981	L	1994	2008
12	Ari Susanti	Tegal	23-07-1989	P	2002	2008
13	Muhammad Arman	Tegal	14-12-1992	L	2007	2008
14	Wati Murnaksikhuroh	Tegal	27-04-1991	P	2003	2008
15	Lusi Setiawati	Tegal	08-02-1992	P	2001	2008
16	Ahmad Khadafi	Tegal	22-03-1992	L	2001	2008
17	Muhammad Riskon	Tegal	18-06-1979	L	1992	2008
18	Eko Wachyudi	Tegal	08-07-1987	L	2000	2008
19	Kartika Sari	Tegal	07-09-1991	P	2003	2008
20	M.Darminto	Tegal	18-11-1988	L	2002	2009
21	Wulandari	Tegal	15-12-1991	P	2003	2007
22	Tri Aji Setiawan	Tegal	07-05-1989	L	2000	2007
23	Ferryanto	Tegal	19-09-1992	L	2003	2007
24	Alan Hamdani	Tegal	25-12-1987	L	2000	2007
25	Eka Septiana	Tegal	22-09-1989	P	2000	2007

2. Daftar Tutor/Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Nama Tutor	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	L/P	Ijasah Terakhir	Mapel
1	Dra.Widi Astutiningsih	Tegal	31-12-1969	P	S1PMP-KN	PKN
2	Drs. Akhmad Jarokhi	Tegal	29-05-1966	L	S1 B.Ind	B.IND
3	M.SalimMubarok, SPd.	Tegal	29-11-1975	L	S1 Mtk	MTK
4	Dwi Widayanti, SPd.	Tegal	30-04-1970	P	S1 B.Inggris	B.ING
5	Afifudin, SPd.	Tegal	26-10-1975	L	S1 Fisika	IPA
6	Drs.Eko Heri Prasetyo	Tegal	30-08-1969	L	S1 Fisip	IPS
7	Agus Ali Khumaedi	Tegal	18-01-1978	L	S1 PAI	PAI

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 17: Gambar Peta Administrasi Kecamatan Margasari



UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 18: Gambar Foto Ujian Sekolah SMP Terbuka Margasari Tahun 2010/201



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 19: Surat Rekomendasi Riset/ Kerja Praktik

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417
Telp. (0283) 491694 – Faks. (0283) 492023

SURAT REKOMENDASI RISET/KERJA PRAKTIK
Nomor : 072/019/I/2011

I. D a s a r : Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal :
Nomor : 070/ 19/2011
Tanggal : 10 Januari 2011

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian/riset dalam wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Drs. MOH. TAUFIK (NIM.015635686)
2. Pekerjaan : Mahasiswa UPBJJ-UT Semarang
3. Alamat : Jl. Arjuna no. 5 Margasari Tegal
4. Penanggungjawab : Kepala UPBJJ-UT Semarang
5. Maksud/tujuan : Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN KEC.MARGASARI, KAB. TEGAL"
6. Lokasi : Kec. Margasari Kab.Tegal
7. Pembimbing : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
b. Sebelum melaksanakan riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
c. Setelah riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Tegal.

III. Rekomendasi riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 10 Januari 2011 s/d 10 April 2011

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 10 Januari 2011

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL,
KEPALA BIDANG LITBANG DAN STATISTIK

BAMBANG K. ARIBAWA, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19690326 199403 1 004

Tembusan : Kepada Yth.
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Kab.Tegal;
3. Kepala BPS Kab.Tegal;
4. Kepala Dinas Dikpora Kec.Margasari;
5. Kepala SMP/MTS Kec. Margasari;
6. Camat Margasari;
7. Kepala Desa Se-Kec. Margasari;
8. Ybs;
9. Arsip

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 20: Surat Keterangan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI
Jl. Bisma No. 03 Margasari,Telp. (0283) 3466024

SURAT KETERANGAN
Nomor : 475 / / 2011

Dasar Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor: 072/019/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Rekomendasi Riset, Camat Margasari Kabupaten Tegal dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : Drs. Moh. Taufik
N I M : 015635686
Pekerjaan : Mahasiswa UPBJJ-UT Semarang
Alamat : Jl. Arjuna No. 5 Margasari – Tegal

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul TAPM " IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KECAMATAN MARGASARI, KABUPATEN TEGAL" dari tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 di Kecamatan Margasari.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Margasari, 27 Mei 2011
CAMAT MARGASARI

A B U S E R I, SIP.
NIP. 19590919198503 1 016

Tembusan:
Yth. Bapak Bupati Tegal

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka